

**ANALISIS DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PADA
PROYEK TOL SOLO-JOGJA TERHADAP KONDISI SOSIAL
EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN KLATEN**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

NUR AISYAH

NIM. 2017201075

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Aisyah
NIM : 2017201075
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Proyek Tol Solo-Jogja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 29 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Nur Aisyah

NIM. 2017201075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PADA PROYEK
TOL SOLO-JOGJA TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT DI KABUPATEN KLATEN

Yang disusun oleh Saudara NUR AISYAH NIM 2017201075 Program Studi S-1
Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari
Selasa, 02 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Safrina Muarrifah, S.E., M.Si.
NIP. 19921230 201903 2 026

Pembimbing/Penguji

Umdah Aulia Rohmah, M.H.
NIP. 19930421 202012 2 015

Purwokerto, 4 April 2024

Mengetahui dan menyetujui,
Ketua Dewan Penguji Skripsi,

Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Nur Aisyah NIM 2017201075 yang berjudul :

"Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Proyek Tol Solo-Jogja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten"

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 01 Februari 2024
Pembimbing,



Umdah Aulia Rohmah, M.H

NIP. 19930421 202012 2015

MOTTO

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"Hanya dengan mengingat Allah SWT hati menjadi tenteram"

(Q.S Ar-Ra'd:28)



ANALISIS DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PADA PROYEK TOL SOLO-JOGJA TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN KLATEN

Nur Aisyah

NIM. 2017201075

E-mail: 2017201075@mhs.uinsaizu.ac.id

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur berupa jalan tol diadakan guna memperlancar mobilitas manusia dan barang, sehingga dengan adanya pembangunan jalan tol diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pembangunan jalan tol Solo-Jogja yang melewati Kabupaten Klaten menyebabkan alih fungsi lahan pertanian masyarakat yang tentu banyak sedikitnya akan berdampak kepada tatanan kehidupan masyarakat. Sehingga penelitian ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui dampak dari adanya alih fungsi lahan pertanian masyarakat terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Klaten dan mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Klaten setelah adanya alih fungsi lahan pertanian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Kabupaten Klaten. Dari total 50 desa/kelurahan yang terdampak alih fungsi lahan di Kabupaten Klaten, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* untuk memilih desa yang akan dijadikan sampel penelitian berdasarkan kriteria desa dengan lahan yang terdampak paling banyak, yaitu Desa Joton dan Desa Dompoyongan, Kecamatan Jogonalan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi cara, dan triangulasi waktu. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model reduksi data, penyajian data, sampai ke tahap penyimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dampak alih fungsi lahan pertanian yang dialami masyarakat dalam aspek sosial ekonomi. Dampak aspek sosial meliputi: meningkatnya status sosial masyarakat serta adanya kepuasan terhadap pembangunan jalan tol, perubahan parameter lingkungan sekitar, polusi udara, gangguan kesehatan yang dirasakan masyarakat, serta konflik emosional yang terjadi antara masyarakat dengan pihak pengadaan tanah. Adapun dampak dalam aspek ekonomi meliputi: Adanya perubahan mata pencaharian masyarakat bahkan sampai ada beberapa yang kehilangan pekerjaan, Berkurangnya luas lahan produktif sehingga berakibat pada menurunnya pendapatan di bidang pertanian. Kedepannya diharapkan dalam pembuatan kebijakan alih fungsi lahan dapat lebih bijak lagi, agar dampak yang dirasakan tidak banyak merugikan masyarakat.

Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Pembangunan, Kondisi Sosial Ekonomi

**ANALYSIS THE IMPACT OF AGRICULTURAL LAND CONVERSION ON
THE SOLO-JOGJA TOLL ROAD PROJECT ON THE SOCIO-ECONOMIC
CONDITION OF THE COMMUNITY IN KLATEN REGENCY**

Nur Aisyah

NIM. 2017201075

E-mail: 2017201075@mhs.uinsaizu.ac.id

Sharia Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Infrastructure development in the form of toll roads is carried out to facilitate the mobility of people and goods, so that with the construction of toll roads it is hoped that it can increase the economic growth of a region. The construction of the Solo-Jogja toll road which passes through Klaten Regency has caused a change in the function of people's agricultural land, which of course will have a greater or lesser impact on the order of people's lives. So this research was conducted with the aim of finding out the impact of the conversion of community agricultural land on the socio-economic conditions of the community in Klaten Regency and knowing the socio-economic conditions of the community in Klaten Regency after the conversion of agricultural land.

This research is field research located in Klaten Regency. From a total of 50 villages/sub-districts affected by land conversion in Klaten Regency, researchers used a purposive sampling method to select villages to be used as research samples based on the criteria of villages with the most affected land, namely Joton Village and Dompnyongan Village, Jogonalan District. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Test the validity of the data using source triangulation, method triangulation and time triangulation techniques. Meanwhile, data analysis techniques use data reduction models, data presentation, up to the conclusion stage.

The results of this research show the impact of agricultural land conversion experienced by the community in socio-economic aspects. The impact of social aspects includes: increasing the social status of the community and satisfaction with the construction of the toll road, changes in surrounding environmental parameters, air pollution, health problems felt by the community, as well as emotional conflicts that occur between the community and the land procurement party. The impacts in the economic aspect include: Changes in people's livelihoods, even some have lost their jobs, a reduction in the area of productive land, resulting in a decrease in income in the agricultural sector. In the future, it is hoped that policy making on land conversion can be more wise, so that the impacts are not detrimental to the community.

Keywords: Land Use Conversion, Development, Socio-Economic Conditions

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | ba' | B | be |
| ت | ta' | T | te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | jim | J | je |
| ح | h | H | ha (dengan garis di bawah) |
| خ | kha' | Kh | ka dan ha |
| د | dal | D | de |
| ذ | žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | ra' | R | er |
| ز | zai | Z | zet |
| س | sin | S | es |
| ش | syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | S | es (dengan garis di bawah) |
| ض | d'ad | D | de (dengan garis di bawah) |
| ط | ṭa | T | te (dengan garis di bawah) |
| ظ | ža | Z | zet (dengan garis di bawah) |
| ع | 'ain | ' | koma terbalik di atas |
| غ | gain | g | ge |
| ف | fa' | f | ef |
| ق | qaf | q | qi |
| ك | kaf | k | ka |
| ل | lam | l | 'el |
| م | mim | m | 'em |
| ن | nun | n | 'en |
| و | waw | w | w |
| ه | ha' | h | ha |
| ء | hamzah | ' | apostrof |
| ي | ya' | y | ye |

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

| | | |
|--------|---------|--------|
| عِدَّة | ditulis | 'iddah |
|--------|---------|--------|

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

| | | | | | |
|------|---------|--------|------|---------|--------|
| حكمة | ditulis | hikmah | جزية | ditulis | jizyah |
|------|---------|--------|------|---------|--------|

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|------------------|
| كرامة الاولياء | ditulis | Karâmah al-aulyâ |
|----------------|---------|------------------|

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t.

| | | |
|------------|---------|---------------|
| زكاة الفطر | ditulis | Zakât al-fitr |
|------------|---------|---------------|

4. Vokal Pendek

| | | | |
|----|---------|---------|---|
| ◌َ | Fathah | ditulis | a |
| ◌ِ | Kasrah | ditulis | i |
| ◌ُ | Dhammah | ditulis | u |

5. Vokal Panjang

| | | | |
|----|-----------------------|---------|------------|
| 1. | Fathah + alif ditulis | ditulis | A |
| | جاهليّة | ditulis | Jâhiliyyah |
| 2. | Fathah + ya' mati | ditulis | a |
| | تنسى | ditulis | tansâ |
| 3. | Kasrah + ya' mati | ditulis | i |
| | كريم | ditulis | karîm |
| 4. | Dhammah + wawu mati | ditulis | u |
| | فروض | ditulis | furrûd |

6. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------|---------|----------|
| 1. | Fathah + ya' mati | ditulis | ai |
| | بينكم | ditulis | bainakum |
| 2. | Fathah + wawu mati | ditulis | au |

| | | | |
|--|-----|---------|------|
| | قول | ditulis | qaul |
|--|-----|---------|------|

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

| | | |
|------|---------|---------|
| أنتم | ditulis | a'antum |
| أعدت | ditulis | u'idat |

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

| | | |
|--------|---------|----------|
| القياس | ditulis | al-qiyâs |
|--------|---------|----------|

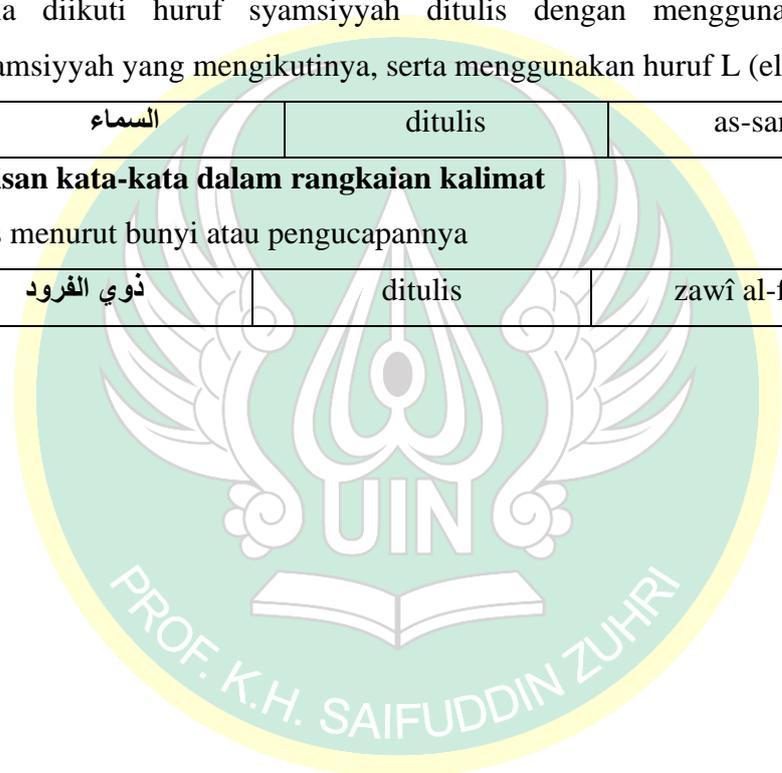
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf L (el)-nya

| | | |
|--------|---------|----------|
| السماء | ditulis | as-samâ' |
|--------|---------|----------|

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

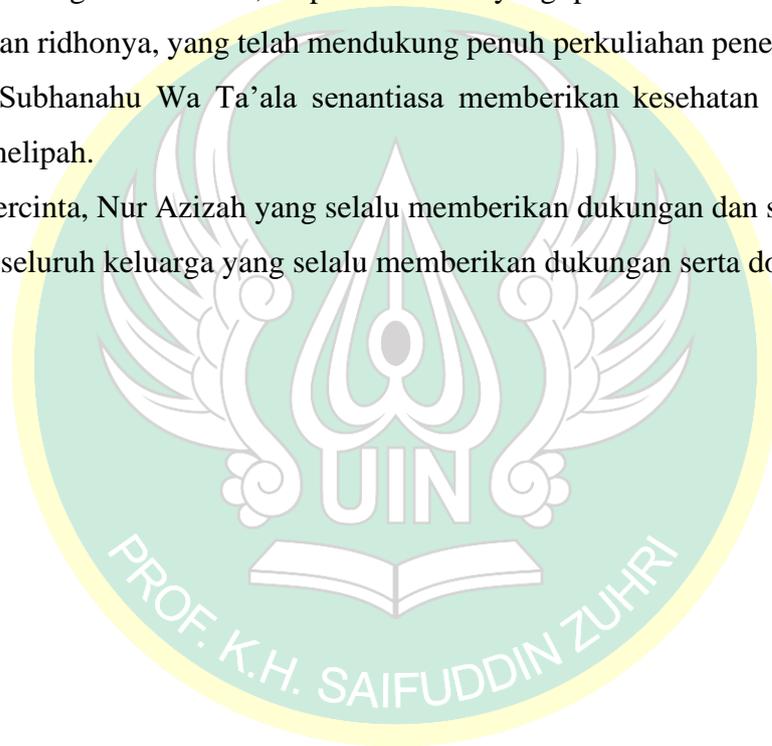
| | | |
|------------|---------|---------------|
| ذوي الفرود | ditulis | zawî al-furûd |
|------------|---------|---------------|



PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta, kasih sayang yang tulus, serta ketulusan hati peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki dan karunia-Nya sehingga atas izin-Nya peneliti mampu menyelesaikan studi hingga sarjana.
2. Diriku sendiri, selamat telah menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh perjuangan. Selamat karena sudah mampu berjuang melawan kemalasan untuk sampai di titik ini, dan semangat untuk terus berkarya kedepannya.
3. Kedua orang tua tercinta, bapak dan ibu yang peneliti cintai serta selalu harapkan ridhonya, yang telah mendukung penuh perkuliahan peneliti. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah.
4. Adik tercinta, Nur Azizah yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
5. Untuk seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan serta do'a.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyusun skripsi dengan judul “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Proyek Tol Solo-Jogja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten”.

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan atas do'a, dukungan, serta bimbingan dalam menyusun skripsi ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Jamal Abdul Aziz., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. H. Sochimim, Lc., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Umdah Aulia Rohmah, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Saya ucapkan terima kasih atas bimbingan, motivasi, dukungan, kesabaran, waktu dan pikiran

untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan membalas segala kebaikan ibu.

10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti selama perkuliahan.
11. Segenap staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Pembina ADIKSI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari semester awal sampai dengan akhir, beserta seluruh keluarga besar ADIKSI yang telah memberi ruang untuk berproses.
13. Pengasuh Pondok Pesantren Modern El-Fira beliau Prof. Dr. K.H. Fathul Aminuddin Aziz M.M, Asatidz/ah Pondok Pesantren Modern el-Fira 4, beserta segenap keluarga Pondok Pesantren Modern El-Fira 4.
14. Bapak Sukirmo dan Bu Fisca pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten yang sudah bersedia memberikan informasi beserta data-data penelitian yang dibutuhkan.
15. Bapak Kepala Desa Joton dan Bapak Kepala Desa Dompnyongan beserta pegawai terkait yang sudah memberikan izin penelitian, serta masyarakat Desa Joton dan Desa Dompnyongan yang sudah bersedia memberikan informasi selama wawancara.
16. Dewi Fajar Handayani teman yang sudah bersedia menemani dan membantu selama proses penelitian.
17. Partner-partner pondok kamar Reguler Sultan dari Angkatan 2020 sampai 2023, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi kepada peneliti.
18. Teman-teman Ekonomin Syariah B Tahun 2020 yang telah kebersamaian selama masa perkuliahan.
19. Semua pihak yang selalu ada, memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada peneliti dan sudah membantu peneliti dalam proses menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga peneliti berharap adanya kritik dan saran yang membangun untuk skripsi ini. Semoga banyak manfaat yang bisa didapatkan dari skripsi ini nantinya.

Purwokerto, 29 Januari 2024



Nur Aisyah

NIM. 2017201075



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 1.1 | Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2020..... | 4 |
| Tabel 1.2 | Luas Lahan yang Terdampak Proyek Tol Solo-Jogja di Kabupaten Klaten..... | 8 |
| Tabel 1.3 | Penelitian Terdahulu..... | 15 |
| Tabel 4.1 | Jumlah Penduduk Desa Joton..... | 62 |
| Tabel 4.2 | Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Joton..... | 62 |
| Tabel 4.3 | Mata Pencaharian Penduduk Desa Joton..... | 63 |
| Tabel 4.4 | Daftar Nama Pejabat Kepala Desa Dompoyongan..... | 64 |
| Tabel 4.5 | Jumlah Penduduk Desa Dompoyongan..... | 67 |
| Tabel 4.6 | Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Dompoyongan..... | 67 |
| Tabel 4.7 | Mata Pencaharian Penduduk Desa Dompoyongan..... | 68 |
| Tabel 4.8 | Pekerjaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Lahan Pertanian..... | 74 |
| Tabel 4.9 | Luas Lahan Pertanian Masyarakat Sebelum Terdampak dan Besarnya Luas Lahan Pertanian yang Terdampak Alih Fungsi..... | 76 |
| Tabel 4.10 | Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2022..... | 80 |
| Tabel 4.11 | Indikator Kependudukan Kabupaten Klaten Tahun 2022..... | 81 |
| Tabel 4.12 | Indikator Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2022..... | 82 |
| Tabel 4.13 | Indikator Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2022..... | 83 |
| Tabel 4.14 | Indikator Lapangan Usaha Kabupaten Klaten Tahun 2022..... | 84 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 4.1 | Peta Kabupaten Klaten..... | 55 |
| Gambar 4.2 | Peta Lokasi Penelitian..... | 58 |
| Gambar 4.3 | Peta Desa Joton..... | 60 |
| Gambar 4.4 | Struktur Organisasi Pemerintah Desa Joton..... | 61 |
| Gambar 4.5 | Peta Desa Dompoyongan..... | 65 |
| Gambar 4.4 | Struktur Organisasi Pemerintah Desa Dompoyongan..... | 66 |



DAFTAR LAMPIRAN

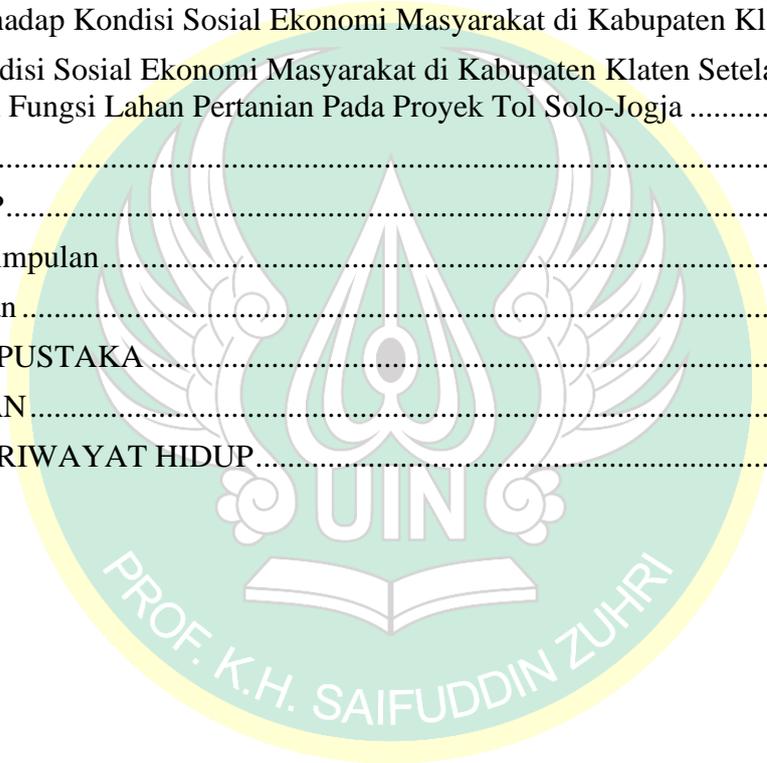
| | | |
|-------------|---|-----|
| Lampiran 1 | Pedoman Wawancara..... | 89 |
| Lampiran 2 | Dokumentasi Penelitian..... | 120 |
| Lampiran 3 | Surat Izin Observasi Pendahuluan di BPN Kabupaten Klaten..... | 129 |
| Lampiran 4 | Surat Balasan dari Pihak BPN Kabupaten Klaten..... | 130 |
| Lampiran 5 | Surat Permohonan Izin Riset Individual..... | 131 |
| Lampiran 6 | Surat Balasan Izin Riset Individual..... | 135 |
| Lampiran 7 | Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal..... | 137 |
| Lampiran 8 | Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif..... | 138 |
| Lampiran 9 | Sertifikat Lulus BTA PPI..... | 139 |
| Lampiran 10 | Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab..... | 140 |
| Lampiran 11 | Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris..... | 141 |
| Lampiran 12 | Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)..... | 142 |
| Lampiran 13 | Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)..... | 143 |
| Lampiran 14 | Sertifikat Praktik Bisnis Mahasiswa (PBM)..... | 144 |



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iv |
| MOTTO | v |
| ABSTRAK | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA | viii |
| PERSEMBAHAN..... | xi |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| DAFTAR GAMBAR | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvii |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 11 |
| C. Rumusan Masalah..... | 12 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Kajian Pustaka | 13 |
| BAB II..... | 20 |
| LANDASAN TEORI..... | 20 |
| A. Teori Alih Fungsi Lahan Pertanian | 20 |
| B. Teori Pembangunan..... | 22 |
| C. Teori Jalan Tol..... | 29 |
| D. Teori Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat..... | 29 |
| E. Teori Ekonomi Kelembagaan Baru (<i>New Institutional Economics</i>) | 32 |
| F. Landasan Teologis..... | 37 |
| BAB III | 44 |
| METODE PENELITIAN..... | 44 |
| A. Jenis penelitian | 44 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 45 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian..... | 45 |

| | |
|--|-----|
| D. Jenis dan Sumber Data | 46 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 47 |
| F. Uji Keabsahan data | 49 |
| G. Teknik Analisis Data | 51 |
| BAB IV | 53 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 53 |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Klaten | 53 |
| B. Gambaran Khusus Desa Joton dan Desa Dompok Kecamatan Jogonalan | 58 |
| C. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Proyek Tol Solo-Jogja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten | 68 |
| D. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten Setelah Adanya Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Proyek Tol Solo-Jogja | 79 |
| BAB V | 86 |
| PENUTUP | 86 |
| A. Kesimpulan | 86 |
| B. Saran | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | 89 |
| LAMPIRAN | 93 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 149 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang hingga saat ini masih berjuang mengatasi berbagai permasalahan ekonomi. Salah satunya adalah masalah ketimpangan pembangunan. Ketimpangan merupakan salah satu masalah serius untuk ditanggulangi (Raharja & Lestari, 2022). Ketimpangan pembangunan disebabkan karena faktor perbedaan sumber daya alam dan kondisi demografi masing-masing wilayah (Andiny & Mandasari, 2017). Hal ini yang kemudian menyebabkan adanya wilayah maju dan wilayah terbelakang. Jika ketimpangan ini dibiarkan secara terus menerus maka akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat di masing-masing wilayah tersebut.

Pembangunan dirasa perlu diadakan untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik (Khasanah et al., 2017). Pembangunan ekonomi adalah salah satu bagian dari langkah pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Kholifah, 2020). Tujuan utama pembangunan adalah untuk memajukan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan hak dan kesamarataan seluruh masyarakat. Pembangunan tidak cukup dilakukan dari segi pemberdayaan masyarakat saja, akan tetapi pembangunan infrastruktur juga perlu diperhatikan. Infrastruktur dirasa penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai pendukung perekonomian, infrastruktur secara signifikan mempengaruhi perkembangan suatu daerah. Penelitian mengemukakan bahwa peningkatan kapasitas infrastruktur suatu daerah berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Sukwika, 2018).

Periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini sangat mendorong pembangunan infrastruktur secara besar-besaran khususnya bidang transportasi darat. Presiden Joko Widodo berpendapat bahwa ledakan

pembangunan infrastruktur akan dapat mengurangi ketimpangan nasional, menciptakan peluang ekonomi di daerah terluar, dan dapat menggenjot laju pertumbuhan ekonomi yang semula hanya stagnan (Sembrani, 2020). Pembangunan infrastruktur yang digencarkan oleh pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo ini adalah pembangunan jalan dan jembatan. Dalam kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo menargetkan agar pembangunan infrastruktur tersebut dapat merata. Infrastruktur jalan merupakan hal yang penting dalam keperluan perhubungan dan transportasi untuk menyokong pembangunan (Siddiq,2016). Permasalahan kemacetan yang sudah sering terjadi di jalan menyebabkan fungsi keterjangkauan antar suatu daerah menjadi terhambat. Oleh karena itu, salah satu solusi untuk menangani kemacetan tersebut yaitu dengan pembangunan infrastruktur berupa jalan tol. Dibangunnya jalan tol diharapkan agar dapat mengurangi waktu tempuh antar wilayah.

Pada pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol telah dijelaskan bahwasanya jalan tol merupakan jalan umum yang termasuk sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang dalam penggunaannya diwajibkan untuk membayar tol (Khasanah et al., 2017). Tujuan dari dibangunnya jalan tol adalah agar dapat mengoptimalkan efisiensi distribusi barang dan jasa guna menyokong perekonomian (Ahmad, 2022). Pembangunan jalan tol tergolong program pembangunan nasional jangka panjang. Pembangunan nasional sendiri merupakan rangkaian pembangunan berkesinambungan yang mencakup segala bidang kehidupan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bangsa sesuai draft pembukaan UUD 1945.

Pembangunan jalan tol yang saat ini sedang berjalan yaitu pembangunan jalan tol Solo-Jogja. Dibangunnya jalan tol Solo-Jogja diharapkan dapat memudahkan aksesibilitas transportasi di wilayah tersebut yang semulanya dari Solo-Jogja harus menempuh waktu 90 menit, maka dengan adanya tol Solo-Jogja ini dapat mempersingkat waktu tempuh menjadi 20 menit. Rencana proyek tol Solo-Jogja ini akan dibangun sepanjang 96,58 km dan akan

dibangun menjadi tiga seksi, yakni Seksi I Kartasura-Purwamartani sepanjang 42,38 km terbagi dalam paket 1.1 Solo-Klaten sepanjang 22,30 km dan paket 1.2 Klaten-Purwomartani sepanjang 20,08 km. Seksi II yaitu Purwomartani-Gamping sepanjang 23,43 km terbagi dalam paket 2.1 Purwomartani-Monjali sepanjang 9,43 km dan paket 2.2 Monjali-Gamping sepanjang 14 km. Lalu Seksi III Gamping-Purworejo sepanjang 30,77 km terbagi dalam paket 3.1 Gamping-Wates sepanjang 17,45 km dan paket 3.3 Wates-YIA Kulonprogo sepanjang 13,32 km (cnbcindonesia.com diakses pada 15 Mei 2023)

Pembangunan jalan tol Solo-Jogja ini akan melewati tiga kabupaten, diantaranya Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten sendiri menjadi wilayah terpanjang yang terkena dampak pembangunan proyek tol Solo-Jogja yaitu sepanjang 30 km (Huntoro & Raharjo, 2022). Dengan adanya pembangunan infrastruktur berupa jalan tol Solo-Jogja yang melewati Kabupaten Klaten ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, terutama dalam hal peningkatan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat, melancarkan transportasi, mempercepat waktu tempuh perjalanan, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan mempercepat laju perekonomian masyarakat (Ompusunggu, 2019).

Jalan tol termasuk dalam pembangunan berskala besar, dimana dalam pelaksanaan pembangunannya memerlukan lahan yang luas. Akan tetapi tanah yang dikuasai oleh negara terbatas (Shofi et al., 2022). Akibatnya pemerintah harus melakukan pengadaan tanah dengan membebaskan tanah rakyat. Adapun pengadaan tanah adalah proses menyediakan tanah dengan memberikan imbalan sepadan kepada yang berhak menerimanya. Upaya pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Kegiatan pengadaan tanah diperbolehkan apabila tujuannya untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Pihak yang memegang hak harus memberikan tanahnya setelah pemberian imbalan diberikan kepadanya. Kemudian tanah yang dilepaskan tersebut selanjutnya akan dibangun untuk kepentingan umum dan menjadi milik negara.

Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Solo-Jogja didalamnya juga melibatkan lahan pertanian, yang mana lahan pertanian memiliki peranan penting dalam usaha pertanian. Kabupaten Klaten sendiri merupakan daerah dimana sektor pertanian lebih mendominasi terutama dalam komoditas padi. Kabupaten Klaten merupakan lumbung padi Jawa Tengah dan juga berkontribusi sebagai penyokong ketahanan pangan nasional. Sebagai daerah yang berada diantara dua kota yaitu Solo dan Jogja, Kabupaten Klaten turut berkontribusi sebagai penyedia hasil pangan yang mencakup penyebaran produk pertanian, perdagangan, dan jasa di sepanjang jalur Surakarta-Yogyakarta. Kabupaten Klaten juga termasuk Kawasan Penyangga Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (Website DKPP Kabupaten Klaten diakses pada 13 September 2023)

Tabel 1.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan, Lahan Pertanian dan Lahan Bukan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2020 (Ha)

| No | Kecamatan | Lahan Pertanian | | Lahan Bukan Pertanian | Luas Wilayah |
|-----|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | Sawah | Bukan Sawah | | |
| 1. | Prambanan | 1.219,6 | 12,0 | 1.211,4 | 2.443 |
| 2. | Gantiwarno | 1.607,5 | 155,0 | 801,5 | 2.564 |
| 3. | Wedi | 1.540,8 | 18,0 | 879,2 | 2.438 |
| 4. | Bayat | 808,4 | 784,1 | 2.350,4 | 3.943 |
| 5. | Cawas | 2.135,7 | 46,0 | 1.265,3 | 3.447 |
| 6. | Trucuk | 1.870,3 | 2,0 | 1.508,7 | 3.381 |
| 7. | Kalikotes | 708,0 | 8,0 | 582,0 | 1.298 |
| 8. | Kebonarum | 702,3 | 2,0 | 262,7 | 967 |
| 9. | Jogonalan | 1.467,1 | 1,0 | 1.201,9 | 2.670 |
| 10. | Manisrenggo | 1.429,7 | 138,4 | 1.127,9 | 2.696 |

| | | | | | |
|-----|----------------|----------|---------|----------|--------|
| 11. | Karangnongko | 722,9 | 850,5 | 1.100,6 | 2.674 |
| 12. | Ngawen | 1.019,1 | 8,0 | 669,9 | 1.697 |
| 13. | Ceper | 1.403,0 | 7,0 | 1.035,0 | 2.445 |
| 14. | Pedan | 836,2 | 444,3 | 636,5 | 1.917 |
| 15. | Karangdowo | 2.044,0 | 69,0 | 810,0 | 2.923 |
| 16. | Juwiring | 1.934,8 | 12,0 | 1.032,2 | 2.979 |
| 17. | Wonosari | 2.126,9 | 14,0 | 973,1 | 3.114 |
| 18. | Delanggu | 1.254,4 | 1,0 | 622,6 | 1.878 |
| 19. | Polanharjo | 1.732,9 | 92,0 | 559,1 | 2.384 |
| 20. | Karanganom | 1.624,5 | 11,0 | 770,5 | 2.406 |
| 21. | Tulung | 1.665,7 | 466,5 | 1.067,8 | 3.200 |
| 22. | Jatinom | 572,0 | 1.541,1 | 1.439,8 | 3.553 |
| 23. | Kemalang | 25,4 | 1.847,8 | 3.292,8 | 5.166 |
| 24. | Klaten Selatan | 766,5 | 2,9 | 673,6 | 1.443 |
| 25. | Klaten Tengah | 277,1 | 1,0 | 613,9 | 892 |
| 26. | Klaten Utara | 276,2 | 39,9 | 721,9 | 1.038 |
| | Jumlah | 31.771,1 | 6.574,5 | 27.210,4 | 65.556 |

Sumber : Website BPS Kabupaten Klaten diakses pada 13 September 2023

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 luas wilayah Kabupaten Klaten 65.556 hektar, terdiri dari lahan pertanian sebesar 38.345,6 hektar (58,49 persen) dan lahan bukan pertanian seluas 27.210,4 hektar (41,51 persen). Lahan pertanian dibagi menjadi lahan sawah seluas 31.771,1 hektar (82,85 persen) dan lahan bukan sawah seluas 6.574,5 hektar (17,15 persen). Selama tahun 2020 lahan pertanian seluas 95,6 hektar beralih fungsi menjadi lahan bukan pertanian, dimana di tahun 2020 terjadi peningkatan alih fungsi lahan pertanian seluas 14,8 Ha dari tahun sebelumnya (BPS Kabupaten Klaten, 2021).

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Klaten sebesar 1.261.000 jiwa, terdiri dari 628.000 jiwa penduduk laki-laki dan 633.000 jiwa penduduk perempuan. Penduduk terbanyak berada pada kelompok umur 35-39 tahun, yaitu sebesar 96.743 jiwa, sedangkan kelompok umur 70-74 tahun sebesar 32.399 jiwa. Kepadatan penduduk di

Kabupaten Klaten pada tahun 2020 mencapai 1.923 jiwa per km² (BPS Kabupaten Klaten, 2021).

Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan termasuk diantaranya adalah gedung sekolah maupun tenaga pengajarnya. Jumlah gedung sekolah jenjang pendidikan SD/ sederajat di Kabupaten Klaten tahun 2020 sebanyak 836 sekolah, SMP/ sederajat 138 sekolah dan untuk SMA/ sederajat hanya 82 sekolah. Sedangkan tenaga pengajar untuk jenjang pendidikan SD/ sederajat ada sejumlah 8.225 guru, SMP/ sederajat 3.647 guru dan SMA/ sederajat 3.125 guru. Dilihat dari lamanya bersekolah penduduk Kabupaten Klaten sampai dengan kondisi tahun 2020 tergolong belum memenuhi Wajar 9 Tahun, indikator ini ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah tahun 2020 masih berada di angka 8,58 tahun, atau setara dengan kelas 2 SMP. Meskipun begitu, angka ini masih lebih tinggi dari Jawa Tengah yaitu 7,69 tahun (BPS Kabupaten Klaten, 2021).

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), pada tahun 2020 sebanyak 606.253 jiwa merupakan penduduk yang bekerja, sedangkan pengangguran berjumlah 34.992 jiwa. Lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Klaten adalah perdagangan sebesar 29,42 persen, disusul dengan industri pengolahan sebesar 24,72 persen dan pertanian sebesar 18,93 persen. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten meningkat menjadi 151.000 jiwa. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat diketahui dari persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebesar Rp 419.510,- per kapita perbulan (BPS Kabupaten Klaten, 2021).

Alih fungsi lahan umumnya merupakan suatu hal yang logis terjadi akibat adanya peningkatan aktivitas, jumlah penduduk, dan pembangunan. Namun apabila alih fungsi lahan dilakukan pada lahan yang produktif, maka hal ini menjadi tidak wajar. Alih fungsi lahan tersebut biasanya disebabkan karena bertambahnya populasi manusia, sedangkan luas lahan yang ada tidak bertambah (Umanilo, 2016: 3). Allah SWT menganjurkan kepada manusia

untuk menjaga dan memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dalam Q.S Al-A'raf [7] ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan."

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan bumi ini beserta kelengkapannya yang meliputi daratan, lautan, lembah, gunung, hutan, sungai, dan masih banyak lagi. Semua itu diciptakan untuk kesejahteraan manusia, dengan harapan agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin (Tafsir Kemenag: dari quranweb.id diakses pada 16 September 2023).

Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa alih fungsi lahan disamping memberikan keuntungan juga dapat memberikan permasalahan bagi para petani, diantaranya: hilangnya mata pencaharian, berkurangnya suplai pendapatan padi, dan menyebabkan daerah resapan air menjadi berkurang. Dengan demikian sebelum melakukan pengalihfungsian lahan pertanian ke non pertanian hendaknya harus melalui berbagai pertimbangan terlebih dahulu agar dapat lebih banyak memberikan maslahat dan tidak merugikan masyarakat (Rosalina, 2020).

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bapak Sukirmo, selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengadaan Tanah Kabupaten Klaten (wawancara pada Rabu 11 Oktober 2023), di Kabupaten Klaten sebanyak 4.071 bidang lahan tanah terkena pembebasan yang tersebar di 11 kecamatan dalam 50 desa/kelurahan. Sebetulnya proses pembebasan tanah tersebut sudah dimulai sejak tahun 2020, namun hingga saat ini masih tersisa 217 bidang tanah yang masih proses pembebasan. Seharusnya keseluruhan tanah tersebut sudah

selesai dibebaskan, akan tetapi menjadi tidak sesuai target yang ditentukan karena harus melalui banyak kendala, diantaranya: ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan besarnya ganti rugi yang diberikan, kemudian kalau tanah wakaf yang terkena pembangunan maka harus mencari tanah pengganti sehingga memerlukan waktu karena tidak bisa diganti uang, kemudian untuk tanah kas desa harus ada izin dari bupati dan gubernur, dan ada beberapa tanah warga yang masih menjadi sengketa keluarga sehingga belum bisa diberikan ganti rugi. Berikut ini data mengenai banyaknya luas lahan yang terdampak proyek tol Solo-Jogja di Kabupaten Klaten:

Tabel 1.2

**Luas Lahan yang Terdampak Proyek Tol Solo-Jogja di
Kabupaten Klaten**

| No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Jumlah Bidang Tanah | Luas Tanah (m ²) |
|-----|------------|----------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | Delanggu | Sidomulyo | 48 | 65.778 |
| | | Mendak | 23 | 40.873 |
| 2 | Polanharjo | Kranggan | 154 | 86.642 |
| | | Sidoharjo | 113 | 69.888 |
| | | Keprabon | 90 | 67.852 |
| | | Polan | 7 | 3.370 |
| 3 | Ceper | Kuncen | 109 | 61.372 |
| 4 | Karanganom | Ngabeyan | 21 | 15.408 |
| | | Brangkal | 138 | 134.432 |
| | | Beku | 64 | 71.096 |
| | | Tarubasan | 135 | 129.748 |
| | | Kadirejo | 92 | 102.599 |
| | | Jungkare | 16 | 24.101 |
| 5 | Ngawen | Kwaren | 12 | 5.123 |

| | | | | |
|----|--------------|--------------|-----|---------|
| | | Manjungan | 109 | 120.848 |
| | | Tempursari | 3 | 15.237 |
| | | Pepe | 145 | 108.898 |
| | | Kahuman | 58 | 60.117 |
| | | Ngawen | 145 | 129.112 |
| | | Senden | 171 | 198.886 |
| | | Gatak | 126 | 71.910 |
| | | Duwet | 56 | 68.214 |
| 6 | Klaten Utara | Barenglor | 32 | 3.997 |
| | | Gergunung | 130 | 19.632 |
| | | Jebugan | 13 | 1.648 |
| 7 | Kebonarum | Malangjiwan | 56 | 50.996 |
| | | Malangduren | 81 | 76.209 |
| | | Menden | 70 | 87.213 |
| 8 | Karangnongko | Karangnongko | 14 | 27.050 |
| | | Demakijo | 51 | 86.303 |
| | | Jagalan | 76 | 97.922 |
| | | Gumul | 61 | 56.384 |
| 9 | Jogonalan | Tambakan | 53 | 52.372 |
| | | Tangkisanpos | 7 | 3.928 |
| | | Prawatan | 28 | 28.671 |
| | | Somopuro | 74 | 30.190 |
| | | Joton | 231 | 283.527 |
| | | Wonobudoyo | 59 | 34.820 |
| | | Granting | 38 | 51.669 |
| | | Dompyongan | 281 | 214.939 |
| 10 | Manisrenggo | Borangan | 122 | 67.665 |
| | | Barukan | 6 | 971 |
| | | Nangsri | 61 | 54.363 |
| | | Taskombang | 86 | 58.615 |

| | | | | |
|-------|-----------|---------------|-------|-----------|
| 11 | Prambanan | Joho | 69 | 81.368 |
| | | Kebondalemlor | 69 | 49.483 |
| | | Kokosan | 45 | 39.390 |
| Total | | | 4.071 | 3.775.215 |

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2023

Setelah melihat data banyaknya luas lahan yang terdampak proyek tol Solo-Jogja di Kabupaten Klaten tersebut, sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di Desa Joton dan Desa Dompoyongan, Kecamatan Jogonalan karena yang memiliki lahan terdampak paling banyak diantara yang lainnya.

Dengan adanya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan proyek tol Solo-Jogja yang melewati Kabupaten Klaten ini, tentu saja akan berpengaruh pada berubahnya fungsi pemanfaatan lahan serta berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat terutama dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat, seperti pernyataan salah satu warga Desa Dompoyongan bernama Pak Sugiyatno, beliau memiliki lahan pertanian seluas 1.259 m² dimana lahan seluas 512 m² terdampak alih fungsi, beliau mengatakan "*Dampak yang saya rasakan tidak menyebabkan saya kehilangan pekerjaan, akan tetapi penghasilan saya jadi berkurang karena lahan yang terdampak alih fungsi itu lahan produktif sedangkan kalau yang sisanya kurang produktif*" (Wawancara 17 Oktober 2023). Sehingga dengan ini penulis bermaksud melakukan penelitian tentang: **"Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Proyek Tol Solo-Jogja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten"** untuk mengetahui secara mendalam mengenai dampak sosial ekonomi yang dirasakan akibat adanya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan jalan tol Solo-Jogja di Kabupaten Klaten serta melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Klaten setelah adanya alih fungsi lahan pertanian akibat adanya pembangunan proyek tol Solo-Jogja.

B. Definisi Operasional

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis dapat diartikan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

2. Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak juga dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang terjadi sebab adanya suatu aktivitas yang dikerjakan (Syahdan et al., 2018).

3. Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan sendiri didefinisikan sebagai perubahan fungsi Sebagian atau keseluruhan kawasan lahan dari fungsi semula seperti yang telah direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya dan potensi kawasan lahan itu sendiri. Sedangkan alih fungsi lahan pertanian ialah tindakan pengalihgunaan lahan yang semulanya diperuntukkan kegiatan pertanian berubah menjadi penggunaan non pertanian (Rupini et al., 2017).

4. Jalan Tol

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, yang dimaksud dengan jalan tol ialah jalan umum yang termasuk sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan untuk membayar tol (PP Nomor 15 Tahun 2005).

5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kondisi memiliki arti suatu keadaan atau situasi. Kondisi sosial ekonomi ialah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang dalam posisi tertentu di masyarakat, pemberian posisi tersebut disertai pula dengan adanya seperangkat hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh si pembawa status. Kondisi sosial ekonomi masyarakat ditandai dengan adanya saling

keterkaitan antara status sosial dengan kehidupan sehari-hari yang telah menjadi budaya dalam suatu individu atau kelompok tertentu (Basrowi & Juariyah, 2010).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas sehingga muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak dari adanya alih fungsi lahan pertanian pada proyek tol Solo-Jogja terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Klaten setelah adanya alih fungsi lahan pertanian pada proyek tol Solo-Jogja?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dampak alih fungsi lahan pertanian pada proyek tol Solo-Jogja terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Klaten
 - b. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah adanya alih fungsi lahan pertanian pada proyek tol Solo-Jogja di Kabupaten Klaten
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat secara akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Proyek Tol Solo-Jogja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten” sehingga dapat dijadikan rujukan dan sumber tinjauan literatur peneliti.
 - b. Manfaat secara umum atau praktis
 - 1) Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis dan memberikan pengalaman dalam penyusunan karya ilmiah.

2) Bagi masyarakat

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampak yang terjadi dari adanya alih fungsi lahan pertanian dalam pembangunan jalan tol Solo-Jogja terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

c. Manfaat bagi pemerintah

Untuk dijadikan bahan pertimbangan selanjutnya dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pembebasan lahan pertanian masyarakat untuk pengadaan jalan tol agar keputusan yang diambil dapat lebih bijak lagi.

E. Kajian Pustaka

Beberapa rujukan yang penulis pilih untuk menjadi bahan referensi dalam melakukan pengkajian ini antara lain:

Pertama, jurnal yang ditulis Triana Rosalina Noor, et al. STAI An Najah Indonesia Mandiri yang berjudul “Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kec. Wringinanom, Kec. Kedamean, Kec. Drirorojo, Kabupaten Gresik)”. Jenis penelitian ini memakai deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto tidak memberi pengaruh yang signifikan bagi penduduk, karena di daerah tersebut hanya sedikit yang bekerja sebagai petani. Hanya sekitar 7% orang yang beralih pekerjaan dari petani ke pekerjaan lain.

Kedua, jurnal yang ditulis Tari Purwanti (2018), Universitas Padjajaran yang berjudul “Petani, Lahan dan Pembangunan: Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Kehidupan Ekonomi Petani”. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan teknik pengumpulan data *in-depth interview* dan *participant observation* untuk mendapatkan data secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani meningkat pendapatannya setelah adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian seperti berdagang, menjadi buruh pabrik, dan kuli bangunan, sedangkan sebagian yang lain menurun pendapatannya karena

faktor hilangnya lahan pertanian dan tidak memiliki keahlian. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah alih fungsi lahan pertanian tidak selalu berdampak negatif pada perekonomian rumah tangga petani. Alih fungsi lahan mendorong petani mencari peluang penghasilan dari sektor non pertanian yang ternyata justru menyebabkan meningkatnya penghasilan.

Ketiga, jurnal yang ditulis Raja Doli Sinaga et al. (2021), Universitas Udayana yang berjudul “Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Subak Sesetan”. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa alih fungsi lahan memberikan dampak sosial yang dialami oleh petani di Subak Sesetan, yaitu dalam hal: (1) ritual subak; (2) konflik sosial antara petani di Subak Sesetan dengan masyarakat di sekitar lahan sawah Subak Sesetan. Sedangkan dampak ekonomi yang dialami oleh petani di Subak Sesetan yaitu: (1) adanya pekerjaan baru; (2) perubahan jam kerja para petani; (3) perubahan luas lahan garapan. Selain dampak diatas, kegiatan alih fungsi lahan di lahan sawah Subak Sesetan yang tidak memperhatikan aliran air menimbulkan permasalahan dalam hal kebutuhan air untuk kegiatan bertani di Subak Sesetan serta menimbulkan kerusakan lingkungan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Mukhammad Irsyad Siddiq (2016). Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Surabaya, yang berjudul “Dampak Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Terhadap masyarakat Petani Yang Lahannya Dibebaskan di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan”. Disini peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan melalui wawancara dalam bentuk pengisian kuisisioner. Dari penelitian tersebut diketahui pengadaan jalan tol Gempol-Pandaan berdampak kepada pola kehidupan petani akibat adanya pembebasan lahan pertanian. Beberapa dari mereka akhirnya memilih beralih ke profesi lain, namun ada juga yang akhirnya menjadi pengangguran. Sebagiaian besar mereka merasakan kesusahan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena menjadi pengangguran dan tidak dapat mencukupi kebutuhannya, sehingga berakibat pada gangguan

keamanan di wilayah tersebut. Dampak lain yang terjadi adalah penyempitan lahan pertanian dan gangguan-gangguan pada kegiatan pertanian.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Yety Septania Intanni, (2016). Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Surabaya, yang berjudul “Dampak Pembangunan Jalan Tol Surabaya Mojokerto Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto”. Disini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, kemudian pengumpulan data diambil dari observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya perubahan mata pencaharian petani akibat dampak dari pembebasan lahan pertanian. Disamping itu pendapatan mereka cenderung mengalami penurunan karena lahan yang biasanya digunakan sebagai sumber produksi kini sudah tidak ada lagi. Awalnya mereka tidak setuju lahannya harus dibebaskan, tetapi karena lahan tersebut akan dimanfaatkan bagi kepentingan umum maka mereka menyetujuinya dengan pemberian ganti rugi.

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

| No. | Judul Penelitian dan Nama Peneliti | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|-----|---|--|--|
| 1. | Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jalan Tol Surabaya Mojokerto (Studi Kasus Kondisi Sosial | Jika meninjau perubahan mata pencaharian sebelum dan sesudah adanya pembangunan jalan tol, maka dapat dikatakan bahwa pengaruhnya hanya sekitar 7% saja. Karena tidak semua masyarakat di Kecamatan Wringinanom, Kedamean, dan Driyorejo bermata pencaharian sebagai petani. | - lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Joton dan Desa Dompnyongan Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | <p>Ekonomi Masyarakat di Kec. Wringinanom, Kec. Kedamean, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik) (Noor et al.)</p> | | <p>- jumlah sampel penelitian ini ada 9 orang masyarakat dari kedua desa tersebut yang lahan pertaniannya terdampak proyek tol Solo-Jogja</p> |
| 2. | <p>Petani, Lahan dan Pembangunan: Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Kehidupan Ekonomi Petani (Purwanti, 2018)</p> | <p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah alih fungsi lahan pertanian tidak selalu berdampak negatif padaperekonomian rumah tangga petani. Alih fungsi lahan mendorong petani mencari peluang penghasilan dari sektor non pertanian yang ternyata justru menyebabkan meningkatnya penghasilan</p> | <p>- lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Joton dan Desa Dompnyongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten -jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 9 orang, sedangkan pada penelitian terdahulu sebanyak 12 orang</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 3. | <p>Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Subak Sesetan (Sinaga et al., 2021)</p> | <p>Alih fungsi lahan sawah yang dilakukan di Kecamatan Subak Sesat memberikan dampak kepada petani dalam aspek sosial dan ekonomi. Selain itu juga menyebabkan permasalahan dalam hal kebutuhan air untuk kegiatan bertani dan menimbulkan kerusakan lingkungan.</p> | <p>- lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Joton dan Desa Dompnyongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten -sampel penelitian ini berjumlah 9 orang sedangkan pada penelitian terdahulu sebanyak 7 orang</p> |
| 4. | <p>Dampak Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan terhadap Masyarakat Petani yang Lahannya</p> | <p>Adapun lahan yang dilepaskan untuk pembangunan ini yaitu seluas 500 m² masing-masing petani. Akibat yang dialami dari adanya pembebasan lahan tersebut antara lain: jumlah petani makin berkurang, lahan pertanian semakin sempit, dan</p> | <p>- lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Joton dan Desa Dompnyongan, Kecamatan Jogonalan,</p> |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | Dibebaskan di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan (Siddiq, 2016) | mengalami masalah-masalah pertanian. | Kabupaten Klaten - jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sedangkan jenis penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif |
| 5. | Dampak Pembangunan Jalan Tol Surabaya Mojokerto Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto (Intanni, 2016) | Dampak terhadap kondisi sosial yang dirasakan akibat pembangunan jalan tol Surabaya-Mojokerto adanya peralihan mata pencaharia dari petani ke mata pencaharian lain. Pada awalnya para petani tidak setuju lahannya dibebaskan, akan tetapi karena lahan tersebut akan digunakan bagi kepentingan orang banyak, maka mereka menyetujui lahannya dibebaskan. Sedangkan dampak terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat yaitu adanya penurunan pendapatan dari | - lokasi yang diteliti ini dilakukan di Desa Joton dan Desa Dompoyongan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten - jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sedangkan jenis penelitian pada |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | sektor pertanian karena lahan pertanian berkurang. | penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif |
|--|--|--|---|



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Alih Fungsi Lahan Pertanian

1. Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No 1 Tahun 201. Pasal 35 menyatakan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan kecuali tindakan tersebut dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang bersangkutan dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau terjadi bencana (Umanailo, 2016: 12).

Selanjutnya pasal 36 menerangkan bahwa diperbolehkannya pengalih fungsian lahan pertanian berkelanjutan guna pengadaan pembangunan hanya boleh dilakukan terbatas untuk kepentingan umum yang meliputi aspek: pembangunan jalan umum, waduk, bendungan, saluran irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan perairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam dan pembangkit jaringan listrik (Umanailo, 2016: 12).

Ketentuan mengenai syarat-syarat alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan juga telah ditetapkan dalam pasal 30 sebagaimana berikut (Umanailo, 2016: 12-13):

- a. Melakukan kajian kelayakan strategis
- b. Membuat rencana alih fungsi lahan
- c. Memberikan kebebasan kepemilikan hak atas tanah
- d. Harus ada lahan pengganti

2. Faktor-Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian

Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi bukan pertanian tentunya terdapat penyebab-penyebab yang mendasarinya. Berikut ini

adalah faktor-faktor penyebab adanya alih fungsi lahan pertanian yang seringkali terjadi dalam suatu wilayah, yang terbagi menjadi dua jenis faktor, yaitu (Umanailo, 2016: 14-17):

a. Faktor Internal

Adapun faktor internal yang mendasari adanya alih fungsi lahan pertanian meliputi:

1) Faktor ekonomi

Dalam hal ekonomi, pendapatan yang diperoleh dari hasil panen terutama yang berasal dari tanaman padi dirasa masih kurang tinggi apabila dipadankan dengan pendapatan yang diperoleh dari non pertanian, misalnya kegiatan industri. Sehingga dalam hal ini penggunaan lahan sawah dinilai tidak menjanjikan di bidang pertanian, dibandingkan apabila digunakan untuk industri, perumahan, atau tempat usaha. Terlebih lagi, usaha padi dianggap melelahkan karena sulit dan lama prosesnya, serta pendapatan yang diperoleh cenderung berubah-ubah. Hal ini yang kemudian mendorong mereka untuk berinvestasi diluar pertanian dengan harapan dapat meningkatkan penghasilan.

2) Faktor demografi

Dari waktu ke waktu jumlah penduduk akan selalu mengalami pertambahan, karena generasi yang akan datang pastinya membutuhkan tempat tinggal dan tempat untuk mendirikan usaha. Sehingga akan menyebabkan luas tanah semakin menyempit dari sebelumnya.

3) Faktor pendidikan

Masyarakat Indonesia cenderung memilih cara cepat untuk mengatasi permasalahan, seperti halnya: membangun usaha seadanya, mengeksploitasi lahan pertanian hingga tidak produktif, menjual tanah, atau mengubah lahan pertanian ke non pertanian tanpa memikirkan dampak untung dan ruginya. Ini

disebabkan karena kurangnya pendidikan karakter dan pengetahuan IPTEK yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

4) Faktor sosial dan politik

Faktor sosial dapat dilihat dari perubahan perilaku, konversi, dan pemisahan lahan. Sementara faktor politik dapat dilihat dari dinamika perkembangan masyarakat karena otonomi daerah dan perkembangan masyarakat global. Hal ini mendorong keinginan untuk menuntut hak pengelolaan lahan yang lebih besar sehingga memunculkan upaya untuk melakukan perubahan fungsi lahan pertanian.

5) Perubahan perilaku

Sebagian besar masyarakat petani yang sudah merasakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku yang berlebihan.

b. Faktor Eksternal

Sedangkan faktor-faktor eksternal penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian, biasanya disebabkan oleh:

- 1) Kepadatan penduduk pedesaan dengan agroekosistem lahan sawah memiliki tekanan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering
- 2) Banyak persawahan yang letaknya di dekat kota
- 3) Akibat dari pola pembangunan yang dilakukan sebelumnya
- 4) Di daerah yang memiliki topografi datar seperti lahan pertanian, pembangunan infrastrukturnya cenderung berjalan cepat.

B. Teori Pembangunan

1. Definisi Pembangunan

Pembangunan (*development*) memiliki definisi sebagai serangkaian proses yang dilalui sehingga dapat mengakibatkan sesuatu tumbuh (*growth*), menjadi lebih matang, lebih maju atau lebih terstruktur (Nurul Huda et al., 2017: 77). Sederhananya, pembangunan

dapat didefinisikan sebagai suatu transformasi menuju arah yang lebih baik dan lebih maju.

Secara terminologis, istilah pembangunan serupa halnya dengan *development, modernization, westernization, economic growth, europeanization, terma political change*. Definisi *development* itu sendiri adalah suatu upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat di suatu daerah atau negara dengan menggunakan rencana perbaikan yang telah ditentukan sebelumnya (Jamaludin, 2016: 5-6).

Selain itu, pembangunan juga dapat didefinisikan dalam hal usaha memajukan, membenahi, serta menjadikan sesuatu bernilai lebih tinggi dari sebelumnya. Arti lain pembangunan yaitu seperangkat upaya yang ditempuh manusia untuk mencapai peradaban sosial dan kebudayaan agar selaras dengan arah dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara (Jamaludin, 2016: 6).

2. Konsep Pembangunan

Dalam Buku *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat* (Hasan dan Aziz, 2018: 6) menjelaskan bahwa saat ini, para berbagai pakar ilmuwan, pejabat tinggi pemerintah dari negara-negara maju, serta beberapa badan internasional, menunjukkan kekhawatiran luar biasa terhadap sektor-sektor pembangunan di negara-negara berkembang. Adapun faktor-faktor penyebabnya yaitu:

- a. Semakin tingginya rasa untuk mengejar keterbelakangan dalam bidang ekonomi. Negara-negara berkembang tidak hanya memiliki penduduk miskin tertinggi, tetapi juga memiliki permasalahan serius dalam hal jumlah penduduknya. Sehingga dengan adanya pembangunan ekonomi di negara berkembang dianggap penting karena diharapkan dapat memberantas pengangguran dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.
- b. Negara-negara maju memerhatikan permasalahan pembangunan di negara-negara berkembang atas dasar perikemanusiaan, karena mereka ingin membantu negara-negara berkembang untuk mengejar

ketertinggalannya dari negara-negara maju serta dapat memperoleh dukungan politik.

3. Dampak Pembangunan

Pembangunan ekonomi yang sedang dilakukan oleh suatu negara tentu mempunyai dampak positif dan negatif (Hasan dan Aziz, 2018: 17). Pada dasarnya pembangunan ekonomi merupakan suatu kebijakan yang diambil dari banyaknya pilihan strategi. Kebijakan pembangunan yang dipilih tersebut akan selalu memunculkan dua sisi yang bertolak belakang. Sehingga dari kebijakan yang telah dipilih tersebut akan selalu ada akibat yang harus ditanggung. Adapun manfaat dari adanya pembangunan ekonomi antara lain:

a. Meningkatnya tingkat produksi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan meningkat setelah adanya pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya jumlah barang dan jasa yang di produksi oleh suatu negara.

b. Banyaknya berbagai pilihan kemudahan

Apabila output yang dihasilkan meningkat, maka akan menyebabkan masyarakat menjadi lebih terbuka dalam menentukan pilihannya. Adanya kebebasan menentukan pilihan berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan hal-hal yang disukainya.

c. Perubahan di bidang sosial, ekonomi, dan politik

Adanya pembangunan pastinya menyebabkan perubahan-perubahan yang tidak selalu dirasakan secara fisik saja, akan tetapi juga di bidang sosial, ekonomi, dan politik.

d. Nilai-nilai kebersamaan semakin meningkat

Kedepannya apabila pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara sukses, maka masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang makmur. Karena ketika kebutuhan pada diri sendiri sudah mampu tercukupi, sehingga sebagai imbalannya

mereka mulai memberikan perhatiannya terhadap lingkungan sekitar.

e. Meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk

Kemajuan ekonomi suatu negara ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dimana tingkat produksinya juga semakin tinggi, sehingga nantinya ekonomi masyarakat akan mengalami peningkatan yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakat secara tidak langsung.

Selain manfaat yang ditimbulkan tersebut, ada juga beberapa kerugian yang mungkin terjadi akibat pembangunan ekonomi:

a. Pencemaran lingkungan

Pembangunan ekonomi di negara berkembang biasanya sama dengan pembangunan industri. Selama industri tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi negara, maka hal lain tidak dianggap dan dipertimbangkan lebih serius. Misalnya, kerugian pencemaran lingkungan yang dapat ditimbulkan dari limbah industri.

b. Lunturnya nilai-nilai sosial dan budaya

Adanya pembangunan memberikan kebebasan dalam menyerap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Kebebasan tersebut membuka kesempatan terjalinnya hubungan global dengan dunia internasional, yang mana nilai-nilai sosial dan budaya internasional kemudian akan berinteraksi dengan nilai-nilai sosial dan budaya setempat yang dapat menyebabkan pergeseran. Pergeseran ini seringkali menyebabkan permasalahan dalam masyarakat, karena nilai-nilai sosial dan budaya yang berasal dari luar negeri mungkin tidak cocok apabila dipraktikkan dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat.

c. Munculnya ketimpangan di segala bidang

Model pembangunan yang ideal diikuti dengan kemajuan yang setara di segala bidang dan semua daerah. Meskipun

demikian, faktanya pembangunan seringkali menghasilkan ketidakseimbangan yang sulit untuk dihindari karena terbatasnya dana dan manajemen.

d. Meningkatnya kaum urban

Pembangunan yang hanya terpusat di perkotaan saja pasti akan menyebabkan rasa iri masyarakat di pedesaan. Penduduk desa memandang pendapatan yang dihasilkan di perkotaan jauh lebih baik, sehingga penduduk pedesaan terdorong untuk migrasi ke kota dan mendapatkan pekerjaan baru di kota.

e. Meningkatnya pengangguran

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat merupakan penyebab langsung meningkatnya jumlah pengangguran. Selain itu, masalah pengangguran juga dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan lapangan kerja. Di negara berkembang seringkali menerapkan model pembangunan yang lebih ditunjukkan kepada tenaga kerja berbakat yang ditekankan pada sektor industri. Padahal kebanyakan masyarakatnya merupakan masyarakat agraris.

f. Adanya perubahan mata pencaharian

Ketika pembangunan difokuskan pada bidang industri, tentunya akan terjadi peralihan pekerjaan ke sektor industri yang juga berpengaruh pada pendapatan nasionalnya. Adanya peralihan ini tentunya akan menyebabkan perubahan mata pencaharian. Pergeseran ini bisa terjadi karena dipaksa ataupun sukarela. Pergeseran karena dipaksa misalnya, pelebaran jalan yang mengenai sawah-sawah atau pembangunan *real estate*. Sedangkan pergeseran secara sukarela lebih dikarenakan keinginan dari masing-masing individu untuk memperbaiki tingkat pendapatan.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) Untuk Menunjang Pembangunan Ekonomi

Menurut konsep ekonomi, adanya pembangunan infrastruktur bermaksud untuk memberikan pelayanan publik seperti: telekomunikasi, pembangkit listrik, sanitasi, saluran air, pipa gas, dan pembuangan limbah padat. Sedangkan pelayanan umum meliputi: jalan, irigasi, sarana transportasi seperti kereta api, angkot, pelabuhan, dan bandara. Apabila investasi di bidang infrastruktur mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan pula. Sebaliknya, apabila investasi infrastruktur mengalami peningkatan, maka secara langsung pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat (Adisasmita, 2018: 94). Selain mendukung pengembangan kegiatan ekonomi secara langsung, investasi infrastruktur juga pasti dapat mendukung berbagai bidang kegiatan lainnya.

Disamping itu infrastruktur juga memiliki peran ganda, sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan serta berdampak positif dalam meningkatkan taraf hidup. Sebagaimana pemanfaatan infrastruktur berupa jalan raya, pelabuhan laut, bandar udara, transportasi perkotaan dan telekomunikasi memberikan peran langsung dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengembangan infrastruktur jalan daerah, saluran air bersih, dan pembuangan limbah akan mendukung masyarakat dari golongan kurang mampu untuk mendapatkan lingkungan hidup yang lebih sehat (Adisasmita, 2018: 95).

5. Pembangunan Infrastruktur Jalan

Pada dasarnya wilayah perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Di perkotaan lebih banyak melakukan kegiatan ekonomi seperti: industri, perdagangan, dan jasa. Seiring waktu, kegiatan di bidang pertanian cenderung semakin sedikit karena maraknya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan prasarana jalan dan daerah permukiman. Ketersediaan sarana dan prasarana

perkotaan adalah bagian penting dari pembangunan daerah untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan aksesibilitas lalu lintas orang maupun barang guna mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat perkotaan (Sjafrizal, 2012: 254).

Syarat pokok untuk menunjang pertumbuhan kawasan perkotaan yaitu dengan adanya sistem jaringan jalan yang baik. Sistem jaringan jalan dan jembatan di kawasan perkotaan diatur menurut Rencana Induk Pengembangan Kota (*City Master Plan*) kemudian disepakati dan disahkan oleh pihak berwenang yang didalamnya terdapat DPRD dan pemerintah kota setempat, serta kelompok masyarakat dan lembaga sosial yang berkepentingan. Sebelum membuat sistem jaringan jalan, perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan arah pengembangan kota yang bersangkutan untuk jangka waktu panjang. Selain itu, sistem jaringan jalan harus mempertimbangkan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kawasan kota yang bersangkutan (Sjafrizal, 2012: 255).

Tujuan pembuatan sistem jaringan jalan di perkotaan adalah untuk mempermudah mobilitas barang dan penumpang antara pusat kota dengan kawasan industri dan jasa, perkantoran, kawasan perumahan dan permukiman serta daerah pinggiran. Selain itu sistem jaringan jalan juga bertujuan untuk mendukung fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan dan mendorong pemerataan pembangunan di dalam kota dan meningkatkan hubungan dengan daerah belakangnya.

Sedangkan jika dari fungsinya, sistem jaringan jalan berfungsi ganda dalam kaitannya dengan pembangunan perkotaan. Di satu sisi, ia berfungsi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempermudah arus barang dan jasa antara pusat produksi dan lokasi pemasaran atau sebaliknya. Disisi lain ia berfungsi mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan meniadakan pembatasan kegiatan sosial ekonomi di wilayah tertinggal. Sehingga pembuatan sistem

jaringan jalan merupakan dasar utama bagi perkembangan kawasan perkotaan (Sjafrizal, 2012: 256).

C. Teori Jalan Tol

1. Definisi Jalan Tol

Jalan tol sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2 adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol (PP Nomor 15 Tahun 2005). Adapun pengguna jalan tol adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor dan diwajibkan membayar jalan tol.

2. Tujuan Pembangunan Jalan Tol

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 Pasal 2 bahwasannya penyelenggaraan jalan tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan membina jaringan jalan yang dananya berasal dari pengguna jalan. Adapun tujuan dari pembangunan jalan tol yaitu agar dapat meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya (PP Nomor 15 Tahun 2005).

D. Teori Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

1. Perubahan Sosial

Dalam Buku *Sosiologi Pembangunan* (Hatu, 2013: 25) Soemardjan (2009) menjelaskan perubahan sosial adalah suatu modifikasi aturan hidup yang diterima masyarakat baik karena kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, percampuran ataupun penemuan baru dalam masyarakat. Segala perubahan pada pranata-pranata kehidupan masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku

masyarakat dianggap sebagai suatu perubahan sosial. Perubahan sosial ini dapat berupa perubahan material maupun imaterial.

Penyebab terjadinya perubahan sosial dibedakan menjadi (Hatu, 2013: 28):

a. Perubahan dari dalam (internal)

Perubahan internal termasuk pertumbuhan atau penurunan jumlah penduduk, terdapat temuan baru, terjadinya konflik, dan pemberontakan atau revolusi.

b. Perubahan dari luar (eksternal)

Faktor eksternal pendorong perubahan sosial yaitu masuknya budaya luar yang semakin berkembang dan diserap oleh masyarakat baik melalui interaksi sosial, politik ataupun teknologi.

2. Perubahan Struktur Ekonomi

Transformasi struktural merupakan istilah yang kerap menggambarkan perubahan struktur ekonomi yang mencakup perubahan komposisi permintaan agregat, penawaran agregat, dan perdagangan luar negeri yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Perubahan-perubahan tersebut saling berkorelasi antara satu sama lain (Hasan & Aziz, 2018: 220).

Dalam Buku *Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Hasan & Aziz, 2018) mengungkapkan bahwa menurut penelitian Chenery dan Syrquin (1975) bahwa struktur ekonomi suatu negara mengalami pergeseran, yang semula lebih dominan pada sektor primer seperti pertanian, kemudian beralih ke sektor non primer, seperti: industri, perdagangan, dan jasa. Penyebab terjadinya pergeseran ini antara lain karena adanya akumulasi kapital fisik dan manusia (SDM), terjadi peningkatan pada pendapatan perkapita sehingga mengubah jenis permintaan konsumen dari kebutuhan pokok menjadi barang industri dan jasa, kota dan industrinya yang semakin

berkembang bersamaan dengan banyaknya penduduk yang pindah dari pedesaan, serta terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk dan semakin mengecilnya ukuran keluarga.

3. Perubahan Indikator Sosial Ekonomi Masyarakat

Dalam menjalankan suatu proyek pasti memiliki dampak positif dan negatif yang masing-masing dirasakan langsung oleh berbagai pihak. Oleh karenanya, aspek sosial dan ekonomi ini perlu dipertimbangkan sebelum menjalankan suatu proyek, karena dampak kedepannya sangat luas. Dengan harapan, dampak positif lebih banyak yang diberikan dibandingkan dampak negatif. Artinya dengan adanya suatu proyek dapat memberikan banyak manfaat daripada kerugiannya dalam aspek sosial dan ekonomi (Gunawan et al., 2020: 18).

Menurut (Sulistyodewi Nur Wiyono, Utami, & Karyani, 2017) dalam *Buku Sosial Ekonomi Pertanian* (Gunawan et al., 2020: 24-26) dampak sosial yang dapat ditimbulkan oleh pembangunan proyek antara lain:

1. Adanya perubahan demografi yang meliputi: perubahan tingkat kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, perubahan struktur penduduk, dan perubahan komposisi tenaga kerja.
2. Perubahan kebudayaan yang meliputi: kemungkinan perubahan kebudayaan, terjadinya proses sosial; perubahan pranata sosial di bidang ekonomi (hak ulayat), pendidikan, agama dan keluarga; perubahan warisan budaya; perubahan pelapisan sosial berdasarkan pendidikan, ekonomi, pekerjaan dan kekuasaan; perubahan kekuasaan dan kewenangan melalui kepemimpinan formal maupun informal; perubahan sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha dan atau kegiatan; kemungkinan terjadinya kriminalitas dan konflik antar warga asli dan pendatang; dan perubahan adaptasi ekologis

3. Perubahan kesehatan masyarakat, yang meliputi: perubahan parameter lingkungan karena dampak pembangunan sehingga berdampak pada kesehatan, perubahan sumber daya kesehatan masyarakat, perubahan kondisi gizi masyarakat, potensi terjadinya pencemaran dan timbulnya penyakit lebih tinggi, perubahan karakteristik tertentu pada penduduk yang berisiko terjangkit penyakit, perubahan pada sanitasi lingkungan dan perubahan kondisi lingkungan yang dapat mempermudah penyebaran penyakit.

Sedangkan menurut (Marphy & Priminingtyas, 2019) dalam *Buku Sosial Ekonomi Pertanian* (Gunawan et al., 2020: 19-20) dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan akibat adanya pembangunan proyek antara lain:

1. Dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui:
 - a. Peningkatan tingkat pendapatan keluarga
 - b. Perubahan pola nafkah. Misalnya, dari semula bekerja di bidang pertanian kemudian beralih profesi menjadi karyawan pabrik
 - c. Adanya pola nafkah ganda.
2. Tersedianya jumlah dan ragam produk dan jasa di masyarakat, sehingga masyarakat punya banyak pilihan untuk produk yang diinginkan
3. Membuka kesempatan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran
4. Tersedianya berbagai sarana dan prasarana yang dapat memberikan fasilitas bagi masyarakat luas

E. Teori Ekonomi Kelembagaan Baru (*New Institutional Economics*)

1. Konsep NIE

Dalam *Buku Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi* (Jaya, 2021:9-10) Oliver Williamson 1985 memperkenalkan NIE (*New Institutional Economics*) sebagai ilmu yang menelaah dampak

kelembagaan (peraturan dan cara penegakan peraturan) terhadap perilaku individu yang rasional dalam lingkungan yang ada ketidakpastian dan biaya transaksi di dalamnya, serta menelaah konsekuensi dari perilaku ini terhadap kesejahteraan individual dan kolektif. Beberapa konsep dasar mengenai NIE adalah sebagai berikut:

- a. Biaya transaksi dan komponen dari biaya transaksi (*transaction cost*) yang berasal dari adanya informasi asimetris serta biaya administrative yang digunakan untuk meminimalisasi ketidaksimetrisan masalah tersebut.
- b. Masalah kontrak yang tidak lengkap (*incomplete contract*), yakni mengenai cara mendesain kontrak ketika terdapat variabel yang tidak diketahui.
- c. Masalah *principal-agent*, yakni mengenai kondisi ketika *principal* tidak dapat melakukan kontrol langsung terhadap aktivitas *agent*, namun dapat memberikan pengaruh agar *agent* melaksanakan tugasnya dengan baik.
- d. Masalah *adverse selection*, yaitu masalah terkait dengan penciptaan pasar ketika produk yang beredar atau pelaku pasar yang terlibat kualitasnya dipertanyakan.
- e. Masalah *collective action*, yakni mengenai cara *agent* yang rasional melakukan *undersupply* terhadap sumber daya dan kapasitas yang dimiliki untuk memecahkan masalah kelompok.

2. Pengertian Kelembagaan

Kata kelembagaan sering diartikan sebagai "organisasi". Namun dalam pendekatan NIE, kelembagaan memiliki definisi yang berbeda. Menurut North, 1990 dan Williamson 1985 pada NIE, mendefinisikan kelembagaan sebagai "aturan formal dan informal beserta mekanisme penegakannya yang membentuk perilaku individu dan organisasi dalam masyarakat. Organisasi dan individu mencapai kepentingan mereka dalam sebuah struktur kelembagaan berupa aturan-aturan formal (hukum, peraturan, kontrak, hukum konstitusional) dan aturan informal

(etika, kepercayaan, dan norma-norma yang tidak tertulis lainnya) (Jaya, 2021:20-21).

Studi kelembagaan dan perubahan kelembagaan diperlukan sebagai kebutuhan dasar untuk konsep pemisahan lembaga dari organisasi. Dalam konteks penataan kelembagaan, perubahan kelembagaan tidak terlepas dari dimensi "besaran organisasi", yaitu perampingan (*downsizing*) dan pembesaran (*upsizing*). Oleh karena itu menurut Tony dan Utomo (2004), format kelembagaan dapat mengalami pengembangan (*expansion*) ataupun pengecilan (*contraction*), tergantung dari perubahan dinamis variabel-variabel yang memengaruhinya. Variabel-variabel yang memengaruhi penataan kelembagaan setidaknya minimal mencakup dua level, yaitu level *institutional environment* dan level *transaction cost*. Williamson (2000) mendeskripsikan level *institutional environment* sebagai perangkat aturan politik, sosial, dan legal yang memapankan kegiatan (Jaya, 2021:131-132)

3. Tingkatan Kelembagaan

Williamson (2000) dalam *Buku Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi* (Jaya, 2021:22-23) membagi kedalam 4 tingkatan kelembagaan yang saling berhubungan timbal balik.

- a. Tingkatan pertama berhubungan dengan *social theory* yang merupakan kelembagaan informal yang telah melekat dalam masyarakat, seperti: tradisi, norma, dan sebagainya.
- b. Tingkatan kedua berhubungan dengan *economics of property right* atau *positive political theory* yang merupakan lingkungan institusi yang terdiri dari aturan main (hukum), politik, lembaga hukum, dan birokrasi.
- c. Tingkatan ketiga adalah *transaction cost economics* atau biaya transaksi, yang mana tingkatan ini terdiri dari pelaksanaan kontrak, pengaturan, dan penegakannya, yang semuanya tidak terlepas dari biaya transaksi.

d. Tingkatan keempat adalah *agency theory* yang terikat dengan pengaturan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

4. Hubungan Kelembagaan dengan Motivasi Manusia dan Struktur Sosial

Motivasi individu dan struktur sosial merupakan faktor tersulit yang dapat diubah oleh pihak yang akan membantu jalannya pembangunan disuatu negara. Hal ini dikarenakan tata sosial (*social order*) merupakan dasar dari pembangunan suatu negara, dan *social order* sangat bergantung dari kepercayaan, motivasi, dan struktur sosial. Mengutip teori North et. al (2000) dalam *Buku Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi* (Jaya, 2021:10) mengenai dasar tata sosial dan aplikasinya terhadap pertumbuhan komparatif, Noth et al., berpendapat bahwa tata sosial terdiri dari:

- a. Sistem kepercayaan mengenai hak dan keistimewaan lembaga swasta dan lembaga publik
- b. Adanya kesepakatan yang jelas mengenai hak dan keistimewaan tersebut
- c. Struktur insentif baik secara implisit maupun eksplisit
- d. Pemberian pemahaman terhadap masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya deviasi terhadap perilaku yang diekspektasikan
- e. Pemberian pemahaman terhadap peraturan yang berlaku.

Menurut Casari dan Plott (2003) dalam *Buku Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi* (Jaya, 2021:11), desain kelembagaan yang baik tidak akan berusaha mengubah perilaku manusia, melainkan akan mengekang keegoisan dan kualitas-kualitas moral yang buruk dalam suatu masyarakat. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Casari dan Plott, ketika dalam suatu masyarakat terdapat pihak-pihak yang merugikan orang lain atau pelanggar peraturan (*violators*) maka pihak yang merasa dirugikan akan memiliki keinginan yang cukup kuat untuk mencari dan memberikan sanksi terhadap *violators* tersebut,

meskipun tidak ada insentif yang rasional untuk melakukan hal tersebut. Apabila sistem insentif dibuat untuk memberikan dukungan pada pihak yang merasa dirugikan oleh *violators* dalam melakukan identifikasi dan pencarian terhadap *violators* tersebut maka akan terjadi peningkatan *outcome* yang tajam.

James Coleman (1988) dalam *Buku Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi* (Jaya, 2021:11) mengatakan bahwa salah satu aspek yang dipandang dapat mencerminkan struktur sosial dalam dunia politik ialah modal sosial (*social capital*). James Colman menyebutkan bahwa modal sosial merupakan bagian dari struktur sosial yang memiliki pengaruh terhadap kinerja ekonomi. Sementara itu, pembentukan modal sosial sendiri merupakan proses yang kompleks.

5. Pentingnya Kelembagaan dalam Pembangunan Sosial Ekonomi

Menurut (Burky & Perry, 1998) dalam *Buku Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi* (Jaya, 2021:25) mengemukakan bahwa kelembagaan penting untuk membangun pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena kelembagaan membentuk suatu struktur insentif (aturan) untuk menjalankan perekonomian bagi pelaku yang terlibat. Kelembagaan yang baik haruslah memiliki aturan yang jelas, dikenal secara luas, masuk akal atau logis, dapat diterima secara luas, dapat diperkirakan (*predictable*), dapat dipercaya, disusun dengan benar, dan juga dilaksanakan dengan benar. Walaupun stabilitas kelembagaan sangat penting dalam meningkatkan investasi, memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, tetapi adaptasi dan perubahan merupakan hal yang juga perlu untuk diperhatikan. Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dapat didapat dalam struktur insentif yang mengakomodasi perubahan teknologi, preferensi sosial, faktor eksternal, maupun inovasi kelembagaan.

F. Landasan Teologis

1. Konsep Kepemilikan Tanah Dalam Islam

Pada dasarnya Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini agar dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Sehingga dengan begitu berarti tanah adalah karunia Allah SWT, dan kepemilikan tanah oleh manusia hanyalah amanah atau titipan dari Allah SWT yang diberikan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan dari Allah SWT (Mohammad Muhibbin, 2017). Kepemilikan tanah sebagaimana yang tertuang dalam Q.S Al-A'raf [7] ayat 128:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْعَيْنَا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ ۖ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ ۝
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

"Musa berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah; diwariskan-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa."

Hukum islam mengajarkan bahwasanya manusia diberi wewenang untuk memakmurkan bumi, memikirkan dan memahami aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Oleh karena itu, orang yang memiliki hak kepemilikan tanah diharapkan dapat memanfaatkannya sesuai aturan Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk kepentingan semua umat manusia.

Dalam Islam tidak ada pembatasan kepemilikan tanah menurut luasnya, akan tetapi berdasarkan kesanggupannya dalam memproduksi tanah tersebut. Karena pada dasarnya tujuan agama adalah sejauh mana tanah tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk golongan tertentu.

Selain itu, dalam sebuah hadis juga diriwayatkan:

"Dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda: tidak ada seorang muslimpun yang menanam pohon atau memelihara tanaman, kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang ternak,

niscaya itu menjadi sedekah baginya". (Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari: 2152, Muslim: 2094, Tirmizi:1303, dan Ahmad:12038, 12529, 130636).

Hadis tersebut menganjurkan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk produktif agar dapat mengelola sumber daya alam yang ada. Sehingga tidak selayaknya tanah dibiarkan menganggur begitu saja atau tidak memanfaatkan secara produktif. Karena dalam ilmu ekonomi bisnis islam produksi bermaksud membuat sesuatu yang telah ada menjadi sesuatu yang bernilai dan lebih bermanfaat (Qur'an, 2018).

2. Alih Fungsi Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Allah SWT menganjurkan kepada manusia untuk menjaga dan memanfaatkan lahan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dalam Q.S Al-A'raf [7] ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan."

Ayat tersebut menerangkan bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan di muka bumi ini diantaranya: merusak jasmani dan rohani orang lain, merusak hubungan orang lain, merusak lingkungan hidup, serta merusak kehidupan beserta sumber-sumber penghidupannya. Allah SWT telah menciptakan bumi ini beserta kelengkapannya yang meliputi daratan, lautan, lembah, gunung, hutan, sungai, dan masih banyak lagi. Semua itu diciptakan untuk kesejahteraan manusia, dengan harapan agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin (Tafsir Kemenag : quranweb.id).

Adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Akan tetapi, tidak

dapat dipungkiri bahwa alih fungsi lahan disamping memberikan keuntungan juga dapat memberikan permasalahan bagi para petani, diantaranya: hilangnya mata pencaharian, berkurangnya suplai pendapatan padi, dan menyebabkan daerah resapan air menjadi berkurang. Dengan demikian sebelum melakukan pengalihfungsian lahan pertanian ke non pertanian hendaknya harus melalui berbagai pertimbangan terlebih dahulu agar dapat lebih banyak memberikan maslahat dan tidak merugikan masyarakat (Rosalina, 2020).

Sehingga dengan demikian sebelum melakukan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian haruslah memenuhi prinsip-prinsip, yaitu (Faozi & Syariffudin, 2017):

a. Adil

Adil dalam bahasa Arab berarti sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil didefinisikan sebagai: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, dan sepatutnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa [4] ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

b. Maslahat

Selanjutnya setelah adil, prinsip yang kedua adalah maslahat. Kata maslahat berasal dari kata shalah yang artinya manfaat. Maslahat tersebut bisa diperoleh secara langsung maupun melalui perantara. Menurut para ahli ushul fiqh cara memperoleh maslahat dapat melalui dua kategori yaitu: *falbu al-mashalih* (upaya untuk

mendapatkan maslahat) dan *dar'u al-mafashid* (menolak bahaya atau kerusakan). Allah SWT berfirman dalam Q.S Hud [11] ayat 171:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ

"Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan."

3. Pembangunan Infrastruktur Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Meskipun landasan pembangunan ekonomi islam bersifat multidimensi, namun konsep pembangunan ekonomi islam lebih luas dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi konvensional. Dalam pembangunan ekonomi islam aspek spiritual dan moral memegang peran penting, karena dalam islam pembangunan spiritual dan moral harus diintegrasikan dengan pembangunan ekonomi. Islam menyebut hal ini menggunakan istilah *tazkiyah an-nafs*, terdapat pada Q.S As-Syams [91] ayat 7-10:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۗ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ ۘ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَقَهَا ۗ ۙ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۗ ۚ

"Dan jiwa serta penyempurnaannya (Ciptaan-Nya) (7), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya (8), sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu (9), dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya."

Dalam ayat tersebut, sesudah Allah SWT bersumpah dengan penyebutan matahari, bulan, siang, malam, langit, dan bumi, Allah SWT kemudian bersumpah atas nama jiwa manusia serta penciptaannya yang sempurna. Setelah itu, Allah SWT menanamkan kefasikan dan ketakwaan ke dalam jiwa manusia. Kata *وَمَا سَوَّاهَا* mengandung makna bahwa Allah SWT menciptakan semua manusia dengan cara yang sama, tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya (Nurul Huda et al., 2017).

Dalam pembangunan ekonomi Islam selalu mengedepankan kemakmuran serta kesejahteraan penduduknya tanpa membedakan status sosialnya. Sehingga dalam pembangunan infrastruktur tidak luput dari perhatian, yang harus mengedepankan kepentingan seluruh komponen masyarakat, bukan hanya mengedepankan kepentingan individu tertentu. Hal ini diatur dalam Q.S Al-Furqon ayat 48-49:

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

"Dan Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih,"

لِنُحْيِيَ بِهِ ۖ بَلَدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيهِهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَا سَيِّ كَثِيرًا

"Agar (dengan air itu) Kami menghidupkan negeri yang mati (tandus), dan Kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah Kami ciptakan, (berupa) hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak."

Dari kedua ayat tersebut Allah SWT memrintahkan agar manusia senantiasa mensyukuri apapun yang karuniakan oleh Allah SWT di dunia ini. Cara bersyukur tersebut dapat dibuktikan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dengan tetap menjaga kelestariannya dan tidak merusaknya (Qur'an, 2018). Dalam melakukan pembangunan infrastruktur kehidupan hendaknya pembangunan tersebut tidak merugikan satu sama lain untuk kebaikan bersama. Terkadang pembangunan yang tidak didasarkan pada aturan-aturan islam dapat menimbulkan berbagai masalah yang besar kedepannya (bappedalitbang.banjarmasinkota.go.id diakses pada 13 September 2023).

4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Islam

Model pembangunan islam memberikan makna baru pada konsep masyarakat kaya atau miskin. Seseorang tidak dapat dikatakan

memiliki ekonomi rendah jika hanya mengacu pada kelangkaan lahan subur, letak geografis yang kurang menguntungkan, tidak tersedianya tambang serta sumber daya alam yang lainnya. Karena tujuan utama islam adalah memajukan umat islam itu sendiri, terkhusus sumber daya manusianya. Islam menuntut manusia untuk menjalankan peran sebagai individu, keluarga, masyarakat dengan menerapkan pembagian kerja sosial dan keadilan. Pembagian kerja sosial tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing individu, keluarga dan masyarakat. Sedangkan penetapan keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk imbalan dalam menjalankan tugasnya. Atas dasar inilah kemudian hak-hak sosial dan ekonomi didefinisikan.

Berdasarkan pendapat Joni Tamkin Borhan (Gultom & Tini, 2020) menyatakan bahwa pembangunan yang dapat meningkatkan perkembangan perekonomian suatu daerah mempunyai beberapa kebijakan yang mana sumber daya manusia menjadi objek utama dalam kebijakan pembangunan. Dengan demikian sumber daya manusia telah memiliki *Islamic Worldview* yang kuat sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Oleh sebab itu dalam mengambil kebijakan aspek sosial ekonomi selalu dilandasi oleh nilai-nilai islam.

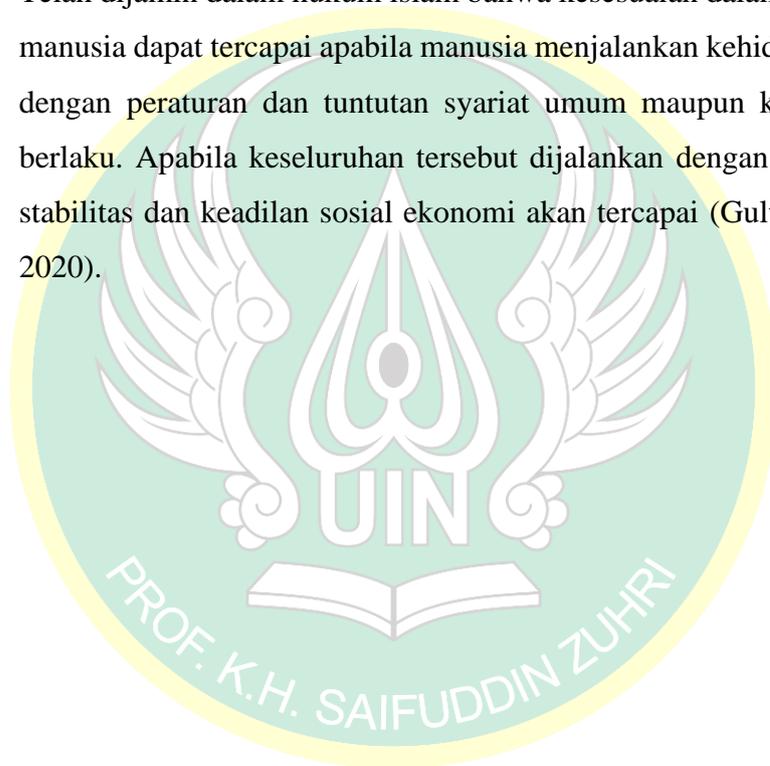
Ketepatan pembangunan harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas keseimbangan pembangunan ekonomi yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Sebagaimana dari awal, bahwa pembangunan ekonomi islam bertujuan agar dapat memenuhi dan memelihara *maqashid syari'ah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), untuk dapat mencapai *falah* atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari

rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

Ayat tersebut bermakna secara umum apa yang menjadi kewajiban untuk mengeluarkan biaya dan membangun fasilitas yang menunjang keberhasilan tersebut. Pembangunan dalam islam sangat menjadi perhatian penting dalam memajukan peradaban. Oleh karena itu, hukum islam dimaksudkan untuk mengarahkan manusia agar dapat meraih nilai-nilai kehidupan yang terbaik di dunia maupun akhirat. Telah dijamin dalam hukum islam bahwa kesesuaian dalam kehidupan manusia dapat tercapai apabila manusia menjalankan kehidupan sesuai dengan peraturan dan tuntutan syariat umum maupun khusus yang berlaku. Apabila keseluruhan tersebut dijalankan dengan baik, maka stabilitas dan keadilan sosial ekonomi akan tercapai (Gultom & Tini, 2020).



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sehingga yang perlu diperhatikan dalam suatu penelitian yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan penelitian tersebut (Sugiyono, 2022: 2). Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian "Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Proyek Tol Solo-Jogja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten" adalah sebagai berikut:

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara mendalam langsung ke lokasi penelitian dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data penelitian.

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya didasarkan pada kondisi alamiah (*natural setting*). Penelitian ini dilakukan pada obyek alamiah. Obyek alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya yang tidak dimanipulasi oleh peneliti serta kehadiran peneliti tidak mempengaruhi pada dinamika obyek tersebut (Sugiyono, 2022: 8).

Pada penelitian kualitatif peneliti sendiri berkedudukan sebagai *human instrument* dengan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara mendalam), sehingga peneliti harus berinteraksi langsung dengan sumber data. Dengan demikian peneliti kualitatif harus mengenal betul siapa saja orang yang dapat memberikan data penelitian (Sugiyono, 2022:11).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini nantinya akan dilangsungkan di Kabupaten Klaten. Dimana yang terdampak jalan tol terdapat 11 kecamatan yang tersebar di 50 desa/kelurahan. Peneliti memilih 2 desa dalam 1 kecamatan secara *purposive* dengan pertimbangan tertentu yaitu Desa Joton dan Desa Dompnyongan, Kecamatan Jogonalan karena desa tersebut memiliki lahan terbanyak yang terdampak proyek tol Solo-Jogja di Kabupaten Klaten, dengan luas terdampak Desa Joton 283.527 m² dan luas terdampak Desa Dompnyongan 214.939 m². Waktu penelitian dimulai dari bulan April 2023 s.d bulan Desember 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ialah informan yang memberikan informasi tentang apa yang sedang diteliti oleh penulis. Sedangkan objek penelitian ialah segala pokok persoalan yang hendak dikaji. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang data yang kita inginkan, atau mungkin dia yang berkuasa sehingga lebih memudahkan peneliti dalam memahami obyek/situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2022: 219).

Menurut Lincoln dan Guba (1985) mengemukakan bahwa penentuan sampel dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif penentuan sampel tidak didasarkan pada perhitungan statistik, akan tetapi sampel yang dipilih tersebut akan berfungsi dalam mendapatkan informasi yang maksimal, bukan untuk digeneralisasikan.

Sehingga berdasarkan uraian diatas, yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Joton, Kepala Desa Dompnyongan, Masyarakat yang lahan pertaniannya terdampak proyek tol Solo-Jogja di Desa Joton dan Desa Dompnyongan Kecamatan Jogonalan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten, Ketua pengadaan tanah dari Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten dan pihak-pihak terkait lainnya. Sedangkan objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis dampak dari adanya alih fungsi lahan pertanian pada proyek tol Solo-Jogja terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Klaten.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan datanya dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulannya lebih banyak didapatkan dari *participant observation* (observasi berperan serta), *in depth interview* (wawancara mendalam), dan dokumentasi (Sugiyono, 2022: 225) Data primer pada penelitian ini didapatkan secara langsung baik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan Kepala Desa Joton, Kepala Desa Dompnyongan, Masyarakat yang lahan pertaniannya terdampak proyek tol Solo-Jogja di Desa Joton dan Dompnyongan Kecamatan Jogonalan, dan Koordinator Kelompok Substansi Pengadaan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, bisa didapatkan melalui orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder yang didapatkan dari penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten, instansi pemerintah, jurnal, artikel, serta data dari sumber lain yang relevan dengan variabel penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian itu sendiri adalah untuk mendapatkan data. Sehingga tanpa mengetahui teknik yang digunakan untuk pengumpulan data, maka peneliti tidak akan bisa mendapatkan data sesuai standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2022: 224).

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai *setting*, sumber, dan cara. Apabila dilihat dari *settingnya*, maka pengumpulan data dapat dilakukan melalui *setting* alamiah (*natural setting*), di laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, di suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain. Apabila dilihat dari sumbernya, maka pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan apabila dilihat dari caranya, maka pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuisioner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan. Metode observasi atau yang sering disebut pengamatan adalah suatu kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu panca indera lainnya. Kunci keberhasilan observasi tergantung pengamat itu sendiri. Pada penelitian kualitatif, metode observasi bertujuan untuk melahirkan teori dan hipotesis. Secara lebih rinci, metode observasi berfungsi dalam mendeskripsikan, mengisi, dan memberikan data yang dapat digeneralisasikan (Hasanah, 2017).

Sanafiah Faisal (1990) dalam *Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sugiyono, 2022: 226-227) menjelaskan bahwa observasi diklasifikasikan menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi secara terang-terangan dan tersamar (*over*

observation dan covert observation), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*).

Berdasarkan pengkalsifikasian diatas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi terus terang dan tersamar. Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan secara terus terang kepada masyarakat di Desa Joton dan Desa Dompoyongan, Kecamatan Jogonalan yang lahannya terdampak proyek tol Solo-Jogja bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga yang menjadi informan mengetahui dari awal sampai akhir kegiatan yang dilakukan peneliti.

2. Wawancara

Menurut Esterberg (2002) dalam *Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sugiyono, 2022: 231) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide yang dilakukan melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara ini dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal secara lebih mendalam. Sehingga dengan wawancara tersebut peneliti akan mengetahui hal-hal lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal-hal ini tidak bisa didapatkan melalui metode observasi.

Adapun macam-macam wawancara menurut Esterbeg (2002) dibedakan menjadi: wawancara terstruktur (*structured interview*), wawancara semi-struktur (*semistructure interview*), dan wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*). Dalam penelitian ini, peneliti lebih memilih menggunakan teknik wawancara terstruktur, dimana sebelum melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis beserta alternatif jawabannya. Melalui wawancara terstruktur ini, setiap informan diberi pertanyaan yang sama dan dicatat oleh pengumpul data. Selain itu, dalam melakukan wawancara tersrstruktur ini selain membawa instrument pedoman

wawancara, pengumpul data juga membawa alat bantu berupa tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu memperlancar berjalannya kegiatan wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau menganalisis subjek sendiri atau orang lain. Dokumentasi ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi digunakan untuk menyempurnakan data yang telah didapat dari observasi dan wawancara (Sugiyono, 2022: 240). Hasil penelitian akan lebih kredibel/dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumen yang berupa tulisan, gambar, atau karya-karya mengenai proyek jalan tol Solo-Jogja, keadaan sosial ekonomi masyarakat yang lahannya terdampak, serta dokumen-dokumen penting lain yang mendukung penelitian ini.

F. Uji Keabsahan data

Uji keabsahan data dalam penelitian umumnya hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, jika ingin mendapatkan data yang valid, reliabel dan obyektif, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan instrument yang valid dan reliabel, dilakukan pada sampel yang mendekati jumlah populasi dan pengumpulan serta analisis data dilakukan dengan cara yang benar. Sehingga data penelitian kualitatif dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan keadaan sebenarnya pada objek yang diteliti. Akan tetapi, kebenaran reabilitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil dari proses mental setiap individu dengan berbagai latar belakangnya (Sugiyono, 2022: 268-269). Adapun dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data meliputi uji, *credibility* (validitas interval), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Uji keabsahan data pada penelitian ini akan menggunakan uji kredibilitas data

dengan menggunakan triangulasi. William Wiersman, 1986 dalam *Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sugiyono, 2022: 273) mengatakan, triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Setelah melakukan pengecekan kepada sumber-sumber yang berbeda kemudian data tersebut didiskripsikan dan dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan yang spesifik dari sumber-sumber tersebut. Sehingga menghasilkan analisis data yang menghasilkan suatu kesimpulan, dan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber-sumber data tersebut.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama akan tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, pertama data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau menggunakan kuisisioner. Apabila setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan teknik yang berbeda tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap paling benar. Atau mungkin saja semuanya benar, hanya saja sudut pandangnya yang berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Kredibilitas data juga seringkali dipengaruhi oleh waktu. Untuk itu dalam pengujian kredibilitas data dengan triangulasi waktu dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan teknik pengambilan data yang sama akan tetapi dalam waktu atau situasi yang

berbeda. Apabila didapatkan hasil dari data yang berbeda, maka harus dilakukan secara berulang sampai menemukan kepastian datanya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan Menyusun data yang dioeroleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami, dan temuan hasil penelitian tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2022: 244). Analisis data dilakukan melalui proses mengorganisasikan data, kemudian menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan yang terakhir membuat kesimpulan yang akan diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu, Miles dan Huberman (1984), dalam *Buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sugiyono, 2022: 246) mengemukakan bahwa aktivitas analisis data dalam penelitian kualitatif dilangsungkan secara interaktif dan secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data tersebut meliputi:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Pada tahap reduksi data peneliti akan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas bagi peneliti, serta memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila dibutuhkan. Dalam melakukan reduksi data, peneliti dapat menggunakan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan cara memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

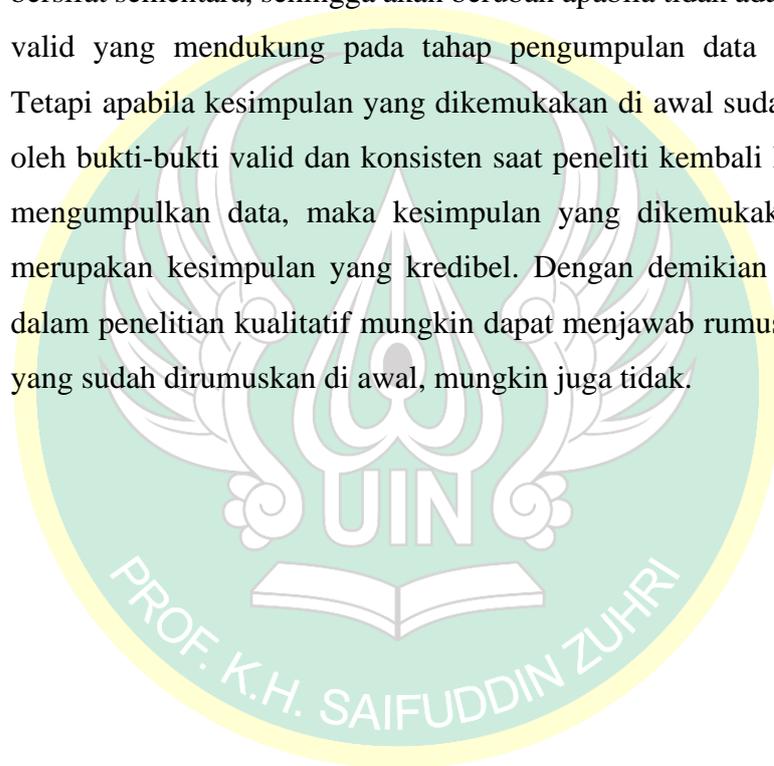
2. *Data Display* (Penyajian Data)

Tahap selanjutnya setelah data direduksi adalah *display* data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan *display* data, maka akan mempermudah peneliti memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang telah dikemukakan peneliti masih bersifat sementara, sehingga akan berubah apabila tidak ada bukti-bukti valid yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan di awal sudah didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan di awal, mungkin juga tidak.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Klaten

1. Sejarah Singkat Kabupaten Klaten

Sejarah berdirinya Kabupaten Klaten sudah banyak beredar dalam catatan, arsip kuno dan kolonial, dan tulisan Jawa. Keberadaan candi-candi Hindu Budha serta adanya barang peninggalan zaman dulu juga menjadi tonggak berdirinya Kabupaten Klaten. Sedangkan asal muasal nama Klaten sendiri memiliki dua pandangan yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa nama Klaten berasal dari kata kelathi, yang artinya buah bibir. Lalu kata kelathi mengalami dismilasi menjadi Klaten. Kemudian atas dasar orangtua sebagaimana yang ditulis dalam *Buku Klaten Dari Masa ke Masa* yang diterbitkan oleh Bagian Ortakala Setda Kabupaten Dati II Klaten Tahun 1992/1993 mengatakan nama Klaten diambil dari kata melati (dalam Bahasa Jawa dibaca mlathi). Lalu berubah penyebutannya menjadi klathi, namun kata klathi kemudian dirubah lagi menjadi klathen untuk memudahkan pengucapannya.

Kurang lebih pada 560 tahun lalu seorang kyai mendatangi tempat yang wujudnya masih hutan belantara. Kyai itu memiliki nama lengkap lengkap Mlati Sekolekan. Ternyata Kyai Mlati merupakan seorang abdi dalem Keraton Mataram, yang setiap harinya diperintah untuk mencari bunga melati dan buah joho untuk putera-puteri keraton. Kyai Mlati akhirnya memutuskan untuk menetap di tempat tersebut. Seiring waktu semakin padat warga yang tinggal di tempat yang ditinggali Kyai Mlati dan istrinya, daerah tersebut yang sekarang ini menjadi Klaten yang sekarang. Kampung yang ditinggali Kyai Mlati kemudian diberi nama Dukuh Sekolekan oleh warga setempat, yang merupakan nama belakang Kyai Mlati. Kemudian nama Sekolekan lebih sering disebut Sekalekan sampai sekarang. Kyai Mlati terkenal dengan pekerti luhur dan kesaktiannya. Karena kesaktiannya itulah yang menjadikan perkampungannya aman dari perampok. Di dukuh

Sekalekan tersebut sekaligus menjadi tempat peristirahatan terakhir Kyai Mlati.

Awal mulanya Kabupaten Klaten merupakan bagian dari bekas daerah swapraja Kasunan Surakarta. Keberadaan Kabupaten Klaten dapat ditelusuri dari *Nawala Sampeyan Dalem Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana Senopati Ing Alaga Abdul Rahman Sayidin Panata Gama VII*, Senin Legi 23 Jumadil Akhir Tahun Dal 1775 pada bab 13 dituliskan: "...Keraton Dalam Surakarta Adiningrat nganakake Kabupaten cacah enem ...". "...Kabupaten cacah enem iku Nagara Surakarta, Kartosuro, Klaten, Boyolali, Ampel, lan Sragen...".

Ada pula beberapa peristiwa bersejarah di Kabupaten Klaten, antara lain: Pertama, pembangunan benteng atau loji sebagai simbol kekuasaan tradisional pada masa kolonial yang dibangun pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwana IV Sabtu Kliwon tanggal 12 Rabiul Akhir, Alip, 1731 (Rupa Mantri Swaraning Jalak) atau pada 28 Juli 1804 yang kemudian menjadi tanggal lahirnya Kabupaten Klaten; Kedua, berdirinya Pos Tundan di Kabupaten Klaten untuk mendukung kegiatan penjagaan keamanan yang sebelumnya sudah dibangun benteng. Pos Tundan didirikan dari hasil perjanjian Sunan Paku Buwana VII dengan pemerintah kolonial Belanda setelah berakhirnya masa perang Diponegoro berdasarkan Surat Keputusan Sunan Paku Buwana VII pada hari Senin, 15 Ruwah 1768 atau 12 Oktober 1840; Ketiga, ditetapkannya Klaten sebagai Kabupaten Gunung Polisi pada 5 Juni 1847 berdasarkan Staatsblad Nomor 30 Tahun 1847, Staatsblad Nomor 32 Tahun 1854, dan Staatsblad Nomor 209 Tahun 1874. Karena pada saat itu Kabupaten Klaten sudah terbagi kedalam wilayah distrik dan onderdistrik, juga sudah memiliki pejabat dan administrasi pemerintahan yang jelas.

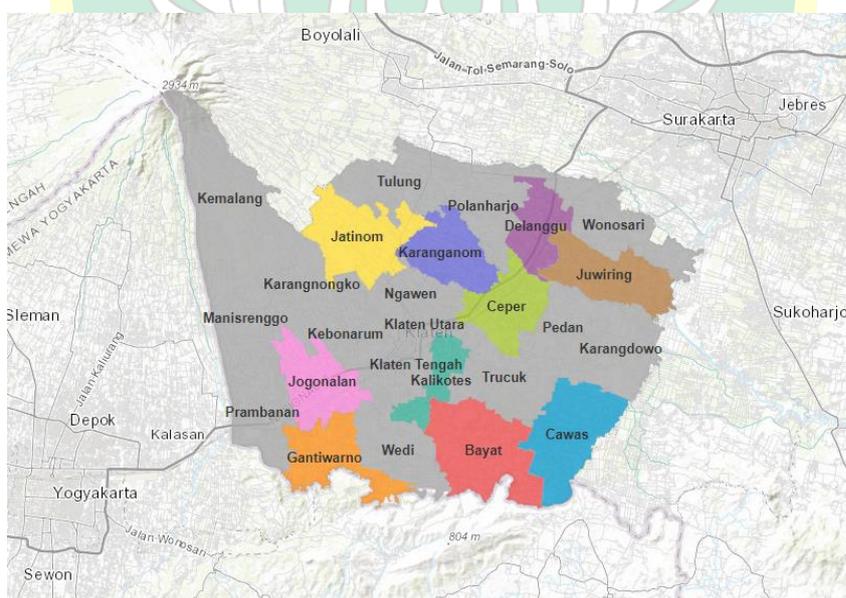
Kabupaten yang hingga kini disebut dengan nama Klaten ini sejak dahulu sudah menjadi perbincangan ramai orang-orang akan kesuburan tanahnya. Sejak masa kerajaan Hindu-Budha sampai Islam, Kabupaten Klaten termasuk disebut-sebut sebagai wilayah negaragung (Negara

Agung) karena terkenal dengan kesuburannya. Kabupaten Klaten menjadi kawasan pertanian yang sangat penting pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dulunya terdapat dua belas perkebunan tebu (gula) dan delapan belas lahan tembakau. Diantaranya perkebunan kopi, coklat, pala, merica, dan kapok berada di bagian lereng gunung Merapi.

Di Klaten juga terdapat pabrik gula dan perkebunan tebu yang berlokasi di Gondang Winangun, Ceper, Cokro, Tulung, Ketandan dan Manishardjo. Kemudian ada daerah Delanggu yang terkenal akan produksi berasnya. Selain itu di kaki gunung Merapi terkenal dengan sumber airnya yang melimpah, sehingga menjadikan Klaten sebagai daerah yang asri dan subur. Hingga kini daerah yang terus dikembangkan sebagai tempat wisata air dan pemandian yang sangat indah antara lain Geneng, Jolutundho, Ponggok, dan Ingas.

2. Kondisi Administratif dan Geografis Kabupaten Klaten

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Klaten



Kabupaten Klaten termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu Kota Kabupaten Klaten terletak di Kota Klaten, yang terdiri dari tiga kecamatan yaitu: Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan. Kota Klaten dulunya merupakan kota administratif, namun sejak berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dihapuslah kota administratif sehingga Kota Klaten kembali menjadi bagian dari Kabupaten Klaten.

Kesuburan tanah dan ketersediaan lahan pertanian menjadikan sektor pertanian secara turun menurun menjadi mata pencaharian mayoritas penduduk di Kabupaten Klaten. Hal tersebut yang menjadikan Kabupaten Klaten dikenal sebagai daerah agraris sebagaimana mayoritas kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Peran Kabupaten Klaten dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah cukup penting dan strategis. Letaknya yang strategis karena berada di tengah-tengah Daerah Tujuan Wisata (DTW) antara Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadikan Kabupaten Klaten sebagai pusat kedua kota tersebut karena terdapat jalan arteri utama yang menghubungkannya. Akibat dari sistem pergerakan masa antar wilayah yang terjadi, Kabupaten Klaten seringkali menjadi tujuan baru untuk pertumbuhan permukiman, industri dan pariwisata sehingga memberikan peluang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berdampak baik untuk pemanfaatan ruang kedepannya.

Kabupaten Klaten memiliki luas 655,56 km² yang memiliki sumbangsih sebesar 2,01% terhadap luas Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten secara administratif memiliki 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan dengan Rukun Tetangga (RT) berjumlah 9.559 dan Rukun Warga (RW) berjumlah 3.663. Kabupaten Klaten terletak antara Bujur Timur: 110° 26' 14" - 110° 47' 51" dan Lintang Selatan: 7° 32' 19" - 7° 48' 33". Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Klaten berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo

Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY)

Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DIY)

Wilayah Kabupaten Klaten dibagi menjadi tiga:

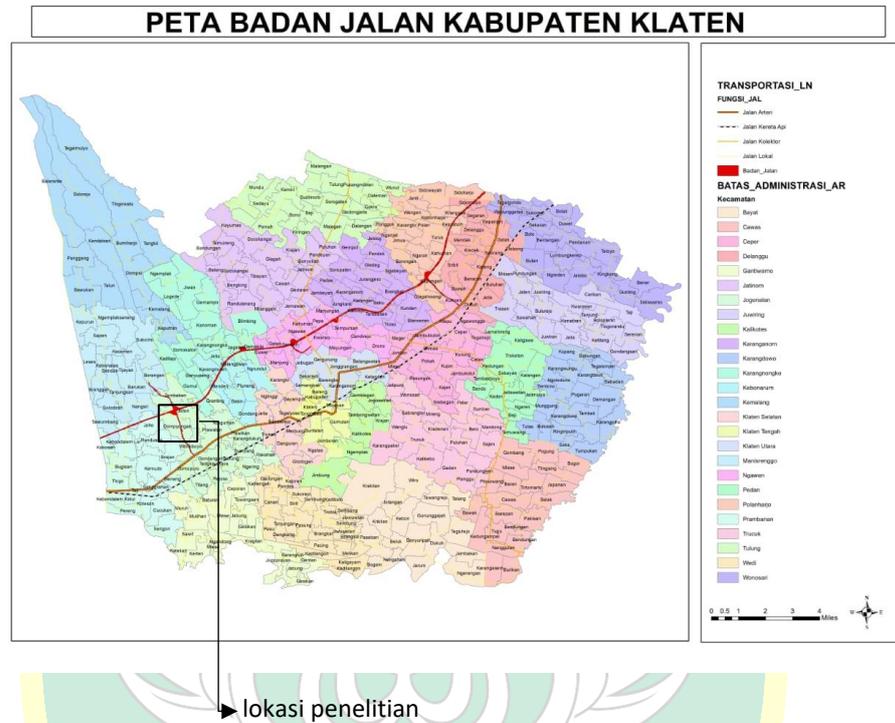
Sebelah Utara : Dataran lereng Merapi, yang meliputi Sebagian kecil sebelah utara yaitu wilayah Kecamatan Kemalang, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Jatinom, dan Kecamatan Tulung.

Sebelah Timur : Membujur dataran rendah, yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Klaten kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.

Sebelah Selatan : Dataran Gunung Kapur, yang meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan Kecamatan Cawas.



Gambar 4.2
Peta Badan Jalan Kabupaten Klaten
yang Akan dilalui Jalan Tol Solo-Jogja



Sumber: Arsip Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten 2023

B. Gambaran Khusus Desa Joton dan Desa Dompok Kecamatan Jogonalan

1. Gambaran Khusus Desa Joton

a. Sejarah Desa Joton

Menurut penuturan dari simbah Ta'ala Somo Tiyoso sesepuh dukuh Joton yang lahir pada tahun 1900 Masehi, beliau pernah menceritakan kepada penyusun tentang sejarah desa Joton. Desa Joton pada awalnya merupakan penggabungan dari dua desa, yaitu desa Ngerangan dan Desa Tangkulan. Dikarenakan dua desa tersebut wilayah masing-masing tidak begitu luas maka setelah kemerdekaan Indonesia digabung menjadi satu desa dengan nama **Desa Joton**. Kepala desa pertama adalah Bapak H. Sidik Parto Wiryono yang bertempat tinggal dan juga

merupakan Balai Desa pertama, yaitu terletak di dukuh Purwowarno. Setelah tahun 1966 Kantor Desa Joton dipindahkan yang saat ini berada di dukuh Kios Tegal Mampir RT 008/ RW 003.

Menurut sesepuh dukuh Joton tersebut menceritakan sejarah berdirinya dukuh Joton menjadi legenda turun temurun. Pada awalnya ada seorang musafir penziar agama Islam yang menetap di dukuh Joton yang dikenal dengan sebutan **Eyang Raden**, beliau seorang yang sakti dan menyebarkan syariat agama Islam. Pada suatu hari, Eyang Raden kedatangan tamu agung yaitu sultan dari Kerajaan Mataram, sang Sultan meminta kepada Eyang Raden untuk memetik buah kelapa muda untuk diminum. Eyang Raden lalu mengambilkan sebutir kelapa muda tanpa memanjat pohonnya, akan tetapi dengan cara beliau melambaikan tangannya kepada pohon kelapa dan pohon kelapa yang sangat tinggi tersebut lalu merunduk menuju pada Eyang Raden, lalu beliau memetik sebutir kelapa setelah itu pohon kelapa kembali berdiri tegak, lalu membuka kulit kelapa tanpa menggunakan alat. Beliau membuka kelapa dengan telapak tangannya dan kemudian diminum oleh sang Sultan. Menyaksikan kesaktian dari Eyang Raden, lalu sang Sultan berkata "kamu memang pininjul, karena kepinunjulanmu daerahmu ini aku beri nama **Joton**". Demikian sejarah nama Joton yang menjadi legenda turun temurun sampai sekarang ini, yang diceritakan oleh para sesepuh kepada anak cucunya di dukuh Joton (Arsip Desa Joton, 2023)

b. Kondisi Geografis Desa Joton

Gambar 4.3
Peta Desa Joton



Sumber: Arsip Desa Joton

Desa Joton termasuk salah satu desa di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Desa Joton memiliki luas 205, 9052 Ha. Batas-batas wilayah Desa Joton adalah:

- 1) Bagian Utara berbatasan dengan desa Tambakan
- 2) Bagian Timur berbatasan dengan desa Prawatan dan desa Gumul
- 3) Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Domyongan dan Desa Wonoboyo
- 4) Bagian Barat berbatasan dengan Desa Domyongan dan desa Nangsri

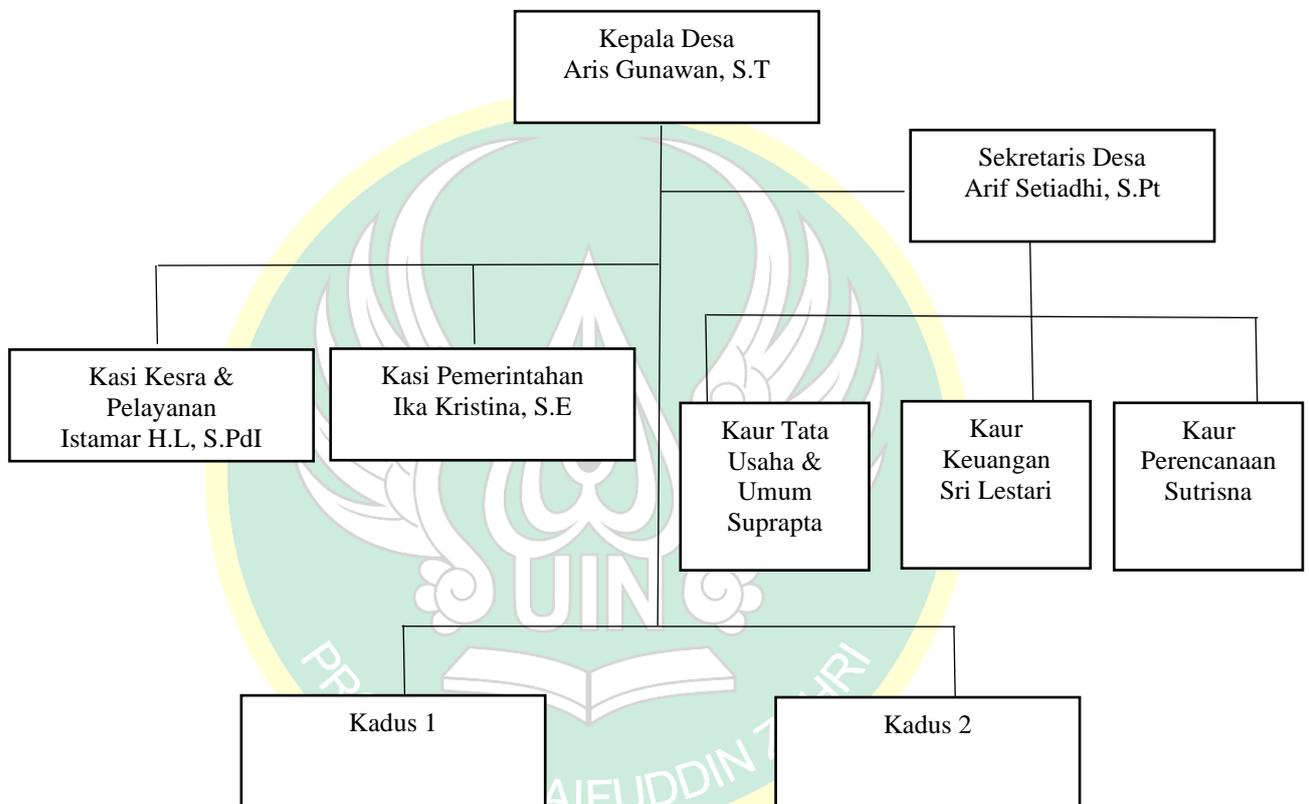
Secara administratif, Desa Joton memiliki 16 Dusun, 9 Rukun Warga, dan 21 Rukun Tetangga. Tipologi Desa Joton terdiri dari persawahan, perdagangan, perkebunan, peternakan, kerajinan, industri kecil, jasa dan perdagangan.

f. Struktur Pemerintah Desa Joton

Berdasarkan observasi yang saya lakukan ketika di Kantor Desa Joton, Adapun struktur pemerintah desa Joton pada periode saat ini tersusun dalam tabel berikut:

Gambar 4.4

Struktur Pemerintah Desa Joton Tahun 2023



Sumber: Observasi di Kantor Kepala Desa Joton 11 Oktober 2023

g. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Joton

Berikut ini data mengenai kondisi sosial ekonomi Desa Joton, Kecamatan Jogonalan sebagaimana dipaparkan dibawah ini:

1) Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Joton saat ini secara keseluruhan sebanyak 3.728 jiwa. Adapun secara lebih detil akan dipaparkan sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Joton Menurut Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|--------------------|
| Laki-laki | 1.758 orang |
| Perempuan | 1.970 orang |
| Total | 3.728 orang |

Sumber: Arsip Data Monografi Desa Joton Tahun 2021

2) Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat Desa Joton ada yang berasal dari lembaga pendidikan umum dan lembaga pendidikan khusus, namun kebanyakan masyarakat Desa Joton menamatkan pendidikannya pada tingkat SMA/SLTA.

Tabel 4.2

Jumlah Lulusan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Jenis Pendidikan | Jumlah |
|-----------------------------|-------------|
| Lulusan Pendidikan Umum : | |
| Taman Kanak-Kanak | 500 orang |
| Sekolah Dasar | 876 orang |
| SMP/SLTP | 509 orang |
| SMA/SLTA | 1.025 orang |
| Akademi (D1-D3) | 72 orang |
| Sarjana (S1-S3) | 104 orang |
| Lulusan Pendidikan Khusus : | |
| Pondok Pesantren | 5 orang |
| Madrasah | 2 orang |
| Pendidikan Keagamaan | - |
| Sekolah Luar Biasa | - |
| Kursus/Ketrampilan | 10 orang |

Sumber: Arsip Data Monografi Desa Joton Tahun 2021

3) Mata Pencaharian Penduduk

Adapun mata pencaharian penduduk di Desa Joton sangat bervariasi, diantaranya:

Tabel 4.3

Mata Pencaharian Penduduk Desa Joton

| Jenis Mata Pencaharian | Jumlah |
|------------------------|------------|
| Karyawan | 308 orang |
| Wiraswasta/Pedagang | 166 orang |
| Tani | 100 orang |
| Buruh Harian Lepas | 1228 orang |
| Buruh Tani | 34 orang |
| Pensiunan | 37 orang |
| Nelayan | - |
| Pemulung | - |
| Jasa | 16 orang |
| Belum/Tidak bekerja | 575 orang |
| Mengurus rumah tangga | 274 orang |
| Pelajar/Mahasiswa | 719 orang |
| PNS | 20 orang |
| Lainnya | 312 orang |

Sumber : Arsip Data Monografi Desa Joton Tahun 2021

2. Gambaran Khusus Desa Dompnyongan

a. Sejarah Desa Dompnyongan

Pada akhir pemerintahan Kerajaan Pajang dan berdirinya pemerintahan Kasunanan Surakarta berpindah ke pemerintahan Kasunanan Solo, diutuslah wakil untuk melanjutkan pemerintahan, mengatur, dan mengelola rakyat dan tanah serta kekayaan di atas kewilayahan Pademangan Gondangalas dan Pademangan Dompnyongan. Pademangan Gondangalas yang berada di Desa Gondangalas dipimpin oleh Ki Demang Soemidjono dan Pademangan Dompnyongan yang

berada di Desa Dompnyongan yang dipimpin oleh Ki Demang Karto Soediro.

Pada saat itu kewilayahan Kabupaten, Kawedanan, Pademangan telah dihapus dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia maka maka Pademangan Gondangalas dan Pademangan Dompnyongan diubah menjadi pemerintahan Desa Dompnyongan karena system pemerintahan kerajaan sudah dihapuskan. Maka dengan itu Pademangan Gondangalas dengan perangkat serta kewilayahannya dan Pademangan Dompnyongan dengan perangkat dan kewilayahannya dijadikan satu (diblenket) menjadi pemerintahan Desa Dompnyongan dibawah pemerintahan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintahan Desa Dompnyongan dipimpin oleh kepala desa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Berikut ini nama-nama pejabat yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Dompnyongan:

Tabel 4.4

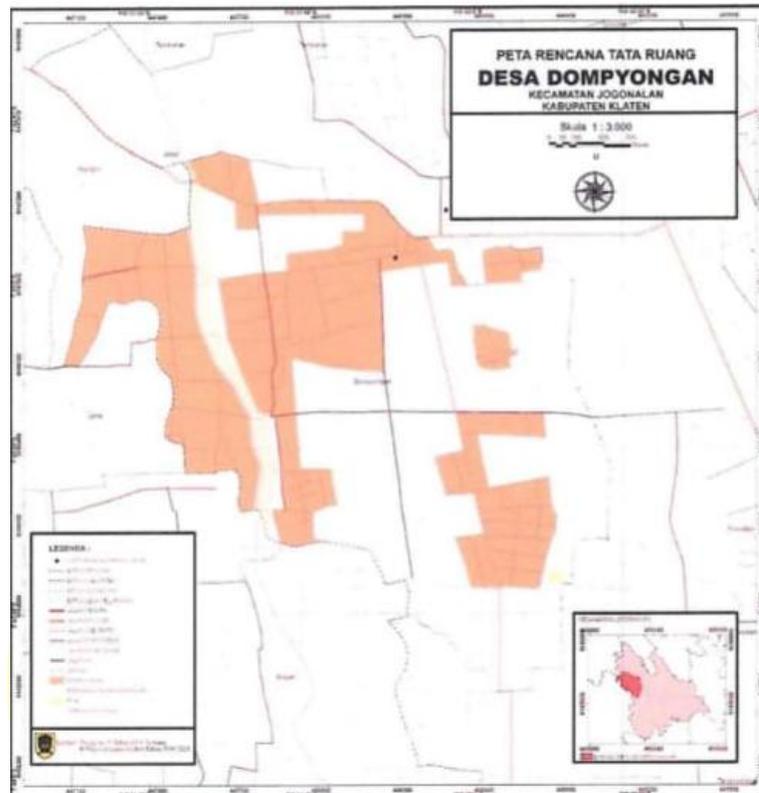
Daftar Nama Pejabat Kepala Desa Dompnyongan

| No. | Nama Pejabat | Tahun Menjabat |
|-----|--------------|----------------|
| 1. | Soekarman | 1964-19972 |
| 2. | Subandriyo | 1997-2006 |
| 3. | Sugimin | 2006-2011 |
| 4. | Subandriyo | 2011-2016 |
| 5. | Sarono | 2016-2023 |
| 6. | Sarono | 2023-2029 |

Sumber : Arsip Desa Dompnyongan Tahun 2023

b. Kondisi Geografis Desa Dompnyongan

Gambar 4.5
Peta Desa Dompnyongan



Sumber: Arsip Desa Dompnyongan Tahun 2023

Desa Dompnyongan memiliki nomor kode 3310080016 yang termasuk salah satu desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan luas desa sekitar 231, 8995 Ha. Wilayah ini secara administrasi berbatasan dengan :

Sebelah utara : Desa Joton, Jogonalan
 Sebelah timur : Desa Wonobojo, Jogonalan
 Sebelah selatan : Desa Joho, Prambanan
 Sebelah barat : Desa Joton, Jogonalan

Jarak dari pusat pemerintahan Desa Joton yaitu:

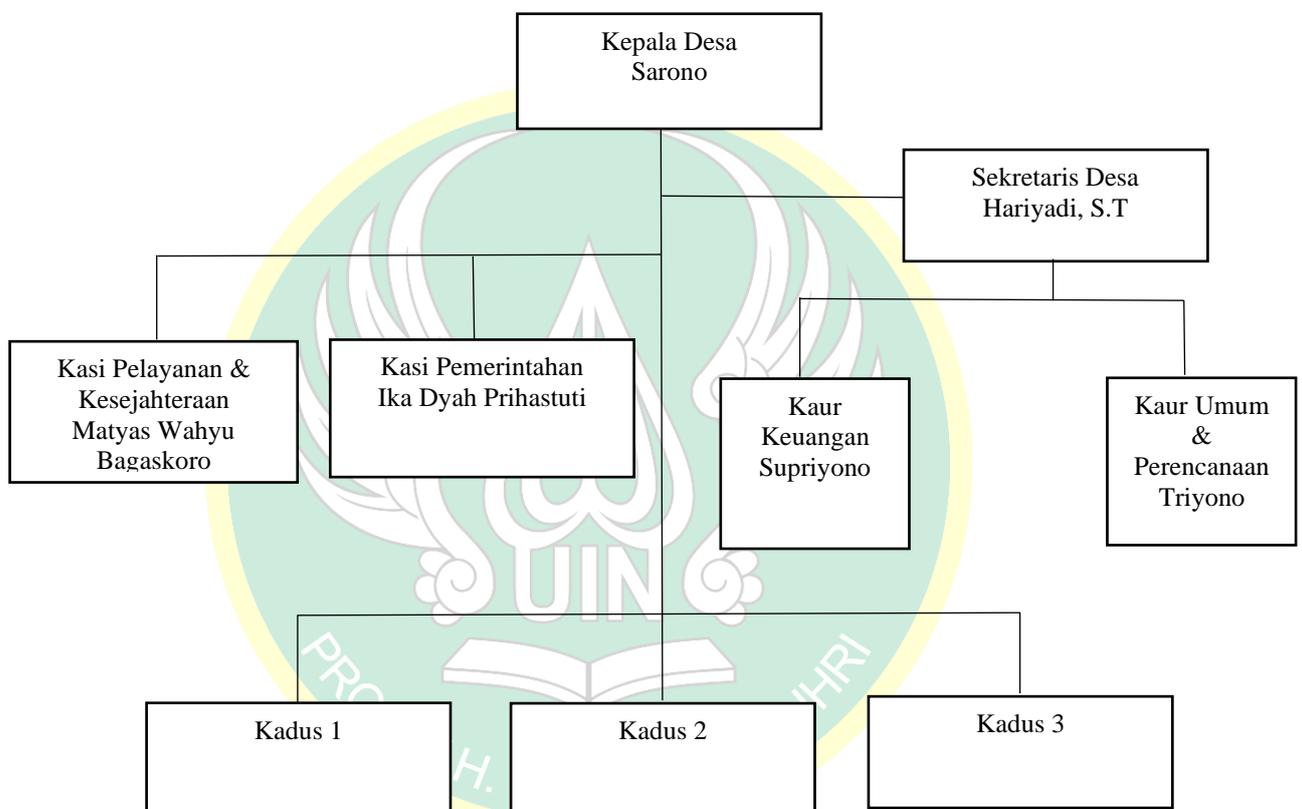
- 1) Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan: 4 km
- 2) Jarak dari ibu kota Kabupaten/Kota : 8 km

c. Struktur Pemerintah Desa Dompnyongan

Berdasarkan observasi yang saya lakukan ketika di Kantor Desa Dompnyongan, adapun struktur pemerintah desa Dompnyongan pada periode saat ini tersusun dalam struktur dibawah ini:

Gambar 4.6

Struktur Pemerintah Desa Dompnyongan Tahun 2023



Sumber: Observasi di Kantor Kepala Desa Dompnyongan 11 Oktober 2023

d. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Dompnyongan

Berikut ini dipaparkan mengenai kondisi sosial ekonomi di Desa Dompnyongan, Kecamatan Jogonalan sebagaimana berikut:

1) Kependudukan

Jumlah penduduk desa Dompnyongan saat ini secara keseluruhan berjumlah sebanyak 4.162 jiwa. Adapun secara lebih detail akan dipaparkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.5

Jumlah Penduduk Desa Dompnyongan Menurut Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|--------------------|
| Laki-laki | 2.086 orang |
| Perempuan | 2.076 orang |
| Total | 4.162 orang |

Sumber: Arsip Data Monografi Desa Dompnyongan Tahun 2023

2) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan masyarakat di Desa Dompnyongan masih tergolong rendah. Masyarakat Desa Dompnyongan kebanyakan baru dapat menamatkan pendidikannya sampai di jenjang SMP/SLTP, dapat dilihat dalam uraian tabel dibawah ini:

Tabel 4.6

Jumlah Lulusan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Jenis Pendidikan | Jumlah |
|-----------------------------|-------------|
| Lulusan Pendidikan Umum : | |
| Taman Kanak-Kanak | 691 orang |
| Sekolah Dasar | 320 orang |
| SMP/SLTP | 1.182 orang |
| SMA/SLTA | 718 orang |
| Akademi (D1-D3) | 1.011 orang |
| Sarjana (S1-S3) | 184 orang |
| Lulusan Pendidikan Khusus : | |
| Pondok Pesantren | 5 orang |
| Madrasah | - |
| Pendidikan Keagamaan | - |
| Sekolah Luar Biasa | - |
| Kursus/Ketrampilan | - |

Sumber: Arsip Data Monografi Desa Dompnyongan 2023

3) Mata Pencaharian Penduduk

Masyarakat di Desa Dompoyongan lebih didominasi oleh petani dan buruh tani. Sejumlah 276 orang bekerja sebagai petani dan 143 orang bekerja sebagai buruh tani. Sedangkan mata pencaharian lain dapat dilihat dalam uraian tabel berikut:

Tabel 4.7

Mata Pencaharian Penduduk Desa Dompoyongan

| Jenis Mata Pencaharian | Jumlah |
|------------------------|-----------|
| Karyawan | 250 orang |
| Wiraswasta/Pedagang | 293 orang |
| Tani | 276 orang |
| Buruh Harian Lepas | 32 orang |
| Buruh Tani | 143 orang |
| Pensiunan | 23 orang |
| Nelayan | - |
| Pemulung | - |
| Jasa | 24 orang |

Sumber : Arsip Data Monografi Desa Dompoyongan Tahun 2023

C. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Proyek Tol Solo-Jogja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten

Penelitian ini dilakukan di Desa Joton dan Desa Dompoyongan, Kecamatan Jogonalan yang mewakili daerah-daerah di Kabupaten Klaten yang terdampak pembangunan proyek tol Solo-Jogja dalam waktu kurang lebih 2 bulan. Perlu diketahui bahwa saat penelitian ini berlangsung pembangunan jalan tol masih dibangun secara bertahap karena proses alih fungsi lahan juga belum terselesaikan secara keseluruhan.

Sebelum melakukan wawancara lebih mendalam dengan masyarakat yang lahan pertaniannya terdampak pembangunan proyek tol, terlebih dahulu dilakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu lahan pertanian yang

terdampak pembangunan proyek tol Solo-Jogja di kedua desa tersebut, yaitu Desa Joton dan Desa Dompokan, Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. Adapun hasil yang didapatkan dari pengamatan langsung tersebut sebagai berikut (Hasil pengamatan langsung 10 Oktober 2023):

1. Lahan pertanian di kedua desa tersebut belum keseluruhan selesai dibebaskan, beberapa masih belum dapat dibebaskan karena masih menunggu uang ganti rugi turun
2. Berubahnya lahan pertanian yang semulanya berupa lahan produktif berubah menjadi timbunan tanah
3. Suhu udara yang bertambah panas karena berkurangnya lahan hijau
4. Kondisi jalan pemukiman penduduk rusak karena dilalui oleh truk besar dan alat berat
5. Pada daerah yang sudah mulai berjalan proses pembangunannya, banyak menimbulkan polusi udara dari debu proyek tersebut

Sehingga setelah melakukan pengamatan langsung tersebut kemudian barulah dilakukan wawancara dengan masyarakat yang lahan pertaniannya terdampak proyek tol Solo-Jogja di dua desa tersebut untuk memperdalam informasi. Dari hasil wawancara tersebut mendapatkan hasil bahwa dampak yang dirasakan setiap masyarakat terhadap kondisi sosial ekonomi mereka berbeda-beda, akan tetapi secara keseluruhan merasakan dampak yang sama, tentunya ada dampak positif dan dampak negatif yang dirasakan.

Sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh (Hasan dan Aziz, 2018) mengenai dampak pembangunan, bahwa pada dasarnya pembangunan ekonomi merupakan suatu kebijakan yang diambil dari banyaknya pilihan strategi. Kebijakan pembangunan yang dipilih tersebut akan selalu memunculkan dua sisi yang bertolak belakang. Sehingga dari kebijakan yang telah dipilih tersebut akan selalu ada akibat yang harus ditanggung.

Selain itu menurut teori mengenai perubahan-perubahan yang terjadi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat adanya suatu pembangunan dalam *Buku Sosial Ekonomi Pertanian* (Gunawan et al., 2020) bahwa dalam menjalankan suatu proyek pasti memiliki dampak positif dan negatif yang

masing-masing dirasakan langsung oleh berbagai pihak. Oleh karenanya, aspek sosial dan ekonomi ini perlu dipertimbangkan sebelum menjalankan suatu proyek, karena dampak kedepannya sangat luas. Dengan harapan, dampak positif lebih banyak yang diberikan dibandingkan dampak negatif. Artinya dengan adanya suatu proyek dapat memberikan banyak manfaat daripada kerugiannya dalam aspek sosial dan ekonomi. Berikut ini hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Desa Joton dan Desa Domyongan, Kecamatan Jogonalan mengenai dampak yang dirasakan akibat adanya alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan untuk pembangunan proyek tol Solo-Jogja:

1. Dampak sosial

Dampak di bidang sosial yang dirasakan masyarakat Desa Joton dan Desa Domyongan, Kecamatan Jogonalan yang lahan pertaniannya terdampak proyek tol Solo-Jogja yaitu meliputi:

a. Dampak positif

1) Meningkatnya status sosial masyarakat

Adanya pengalih fungsian lahan pertanian menjadi proyek tol Solo-Jogja ini dirasa dapat memberikan dampak positif dalam hal status sosial masyarakat. Pasalnya, setelah mereka memperoleh uang ganti rugi yang dinilai cukup besar, masyarakat mempergunakannya untuk bermacam-macam. Ada yang mempergunakannya untuk membeli lahan pertanian baru, ada yang mempergunakannya untuk membiayai kehidupan sehari-hari, ada yang mempergunakannya untuk membeli kendaraan baru, ada yang mempergunakannya untuk merenovasi rumah, bahkan ada yang sampai bisa membangun rumah baru untuk anaknya.

Seperti salah satu informan bernama Pak Sarman warga Dusun Ngrangan, Desa Joton. Lahan pertanian beliau yang terdampak luasnya sekitar 2.000 m² dan mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp 2.200.000.000, ketika ditanya uang ganti rugi tersebut dimanfaatkan untuk apa beliau menjawab:

"Ya untuk beli tanah baru, malah bisa dapat lebih luas dan masih sisa uangnya untuk membuat rumah anak" (Sarman, 2023).

Informan lain bernama pak Sakri, warga Dusun Ngrangan, Desa Joton (Sakri, 2023) juga mengatakan bahwa dari lahan pertaniannya yang terdampak tersebut beliau mendapat uang ganti rugi sejumlah Rp 1.800.000.000 yang dipergunakan untuk membeli lahan pertanian baru di kecamatan lain, dan lebihnya untuk membelikan kendaraan anaknya dan untuk biaya hidup sehari-hari.

Hal ini jelas menunjukkan adanya perubahan status sosial pada masyarakat tersebut, dari yang sebelumnya status sosialnya hanya biasa saja kini menjadi lebih tinggi status sosialnya.

2) Kepuasan masyarakat dengan adanya pembangunan jalan tol

Meski pada awalnya masyarakat tidak setuju karena lahan pertaniannya harus dialihfungsikan, akan tetapi karena adanya pembangunan jalan tol ini digunakan untuk kepentingan bersama sehingga pada akhirnya masyarakat menyetujui dan merelakan lahannya dialihfungsikan. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Yatno warga Dusun Tempelsari, Desa Dompok, Desa Dompok. Beliau menyetujui akan adanya pembangunan tol Solo-Jogja ini karena menurut beliau dengan pembangunan jalan tol Solo-Jogja ini dapat mempercepat waktu tempuh perjalanan bila hendak berpergian, karena saudara rumahnya jauh-jauh (Yatno, 2023).

b. Dampak Negatif

1) Perubahan parameter lingkungan

Berkurangnya lahan hijau pertanian menjadi pembangunan proyek jalan tol ini menjadikan udara disekitar bertambah panas ditambah lagi dengan musim kemarau yang panjang. Sebagian besar informan mengaku turut merasakan perubahan parameter lingkungan sekitar tempat tinggal akibat adanya proyek tol tersebut. Salah satunya yang sangat dirasakan masyarakat adalah polusi udara.

"Ya pasti, kan sekarang dampaknya yang dirasakan debu, banyak yang mengeluh banyak debu, apalagi sedang musim kemarau hawanya juga tambah panas apalagi ini rumah saya depan sawah banget yang akan kena pembangunan, cuma sawah itu belum mulai di bego karena belum dibayar." tutur pak Sakri (Sakri, 2023) salah satu warga Dusun Ngrangan, Desa Joton.

Hal serupa juga dirasakan oleh masyarakat di Desa Dompnyongan:

"Kalau waktu pembangunan iya ada, karena musim kemarau ya. tapi ya udah disirami tapi ya masih ada debunya, karena juga dampak kemarau." tutur Sugiyatno selaku ketua RT 25 RW 13 Dusun Dompnyongan, Desa Dompnyongan (Sugiyatno, 2023).

Namun dari dampak polusi udara yang ditimbulkan tersebut masih menjadi hal yang wajar terjadi, sehingga masyarakat masih memaklumi. Karena memang tahun ini terjadi kemarau panjang, sehingga menyebabkan cuaca panas dan debu-debu dari proyek bertebakan menyebabkan polusi karena belum ada hujan.

2) Gangguan kesehatan

Polusi udara yang ditimbulkan berpengaruh kepada kesehatan masyarakat di sekitar proyek. Banyak masyarakat yang merasakan gangguan kesehatan terutama batuk, sesak dan pilek. Namun gangguan kesehatan ini tidak serta-merta sepenuhnya disebabkan dari polusi yang ditimbulkan dari proyek tol tersebut. Faktor lain seperti musim kemarau panjang yang menyebabkan cuaca panas juga menjadi salah satu pemicu gangguan kesehatan tersebut.

3) Konflik emosional

Konflik emosional ini dirasakan oleh pihak masyarakat kepada pihak pengadaan tanah. Ada beberapa masyarakat yang merasa uang ganti rugi tersebut belum sesuai, bukan karena nominalnya yang kecil tapi karena pengukuran lahan yang dirasa tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini dirasakan oleh pihak keluarga Bu Wahyuni, seorang warga Dusun Bladu, Desa Joton (Wahyuni,

2023), ketika ditanya mengenai kesesuaian uang ganti rugi yang diberikan beliau menjawab:

"Ya mau tidak mau terima aja lah. karena kalau mau mengajukan banding juga ribet, harus bawa-bawa pengacara. Karena yang saya rasakan itu sebenarnya terdapat hasil pengukuran yang berbeda antara luas asli dengan yang diukur pihak BPN".

Hal serupa juga dirasakan oleh informan lain bernama pak Sakri, warga Dusun Ngrangan, Desa Joton (Sakri, 2023), beliau mengungkapkan keresahannya terkait uang ganti rugi yang diberikan:

"Ya sebenarnya belum sesuai, mau gimana-gimana juga nggak bakal ditanggapi. padahal punya saya kurang 130 an meter, sudah mencoba menggugat tiga kali tapi tidak ditanggapi, ya namanya orang kecil ya jadi harus terima-terima saja."

Informan lain yaitu Pak Suhari, warga Dusun Tempelsari, Desa Dompnyongan juga merasa uang ganti rugi yang diberikan belum sesuai, beliau mengatakan:

"Sebetulnya belum sesuai, karena menurut saya harga tanah kurang menjangkau, tapi ya saya nurut saja lah sama pemerintah" (Suhari, 2023).

2. Dampak ekonomi

Sedangkan dampak dalam bidang ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat yang telah saya wawancara adalah:

a. Dampak Negatif

1) Perubahan mata pencaharian masyarakat

Berikut ini ditampilkan data mengenai mata pencaharian masyarakat sebelum dan sesudah adanya alih fungsi lahan pertanian karena proyek tol Solo-Jogja:

Tabel 4.8
Pekerjaan Masyarakat Sebelum dan Sesudah
Alih Fungsi Lahan Pertanian

| Nama | Pekerjaan Sebelumnya | Pekerjaan Sesudahnya |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Suami Bu Wahyuni | Petani | Petani |
| Sarman | Petani | Petani |
| Sakri | Petani | Petani |
| Karmi | Petani | Menganggur |
| Sugiyatno | Petani | Jualan Online dan Tukang Pijet |
| Ngatiman | Petani | Buruh Bangunan |
| Yatno | Petani | Petani |
| Jimin Asbani | Petani | Petani |
| Suhari | Petani | Menganggur |

Sumber: Wawancara dengan masyarakat yang lahan pertaniannya dialihfungsikan

Kebanyakan informan bermata pencaharian sebagai petani yang meggarap lahan pertanian produktif miliknya sendiri. Beberapa orang menyatakan bahwa alih fungsi lahan pertanian ini tidak mempengaruhi mata pencaharian mereka, yang semula bertani tetap bekerja sebagai petani, karena memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan untuk membeli lahan pertanian baru lagi, meskipun ada yang lahan barunya harus pindah di luar kecamatan seperti seorang informan yang bernama Pak Sakri, beliau yang tadinya lahan pertaniannya berada di Desa Joton dekat dengan rumahnya harus membeli lahan baru di Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan Karangnongko.

Namun ada juga yang berubah mata pencahariannya dari yang semula bekerja sebagai petani berpindah ke pekerjaan lain. Seperti halnya yang dirasakan oleh Pak Sugiyatno seorang warga Dusun

Dompyongan, Desa Dompyongan, selama ini sebelum adanya alih fungsi lahan pertanian beliau menggarap lahannya sendiri, selain itu juga memiliki pekerjaan sampingan jualan *online* dan sebagai tukang pijat/terapi. Akan tetapi setelah adanya pembebasan lahan pertanian ini, beliau lebih memilih melanjutkan jualan *online* nya karena lahan sisa yang sekarang kurang produktif untuk kegiatan bertani. Ada juga pak Ngatiman warga Dusun Dompyongan, Desa Dompyongan yang kini bekerja sebagai buruh/kuli bangunan karena uang ganti rugi yang didapatkan harus dibagi-bagi dengan keluarga dan untuk merenovasi rumah sehingga tidak bisa membeli lahan pertanian baru.

Kemudian ada juga yang benar-benar kehilangan pekerjaannya. Beliau Bu Karmi seorang warga Dusun Gondangalas, Desa Dompyongan sebagai seorang kepala keluarga dirumahnya. Sebelumnya beliau bekerja sebagai petani di lahan pertanian miliknya sendiri. Tetapi, akibat adanya alih fungsi lahan pertanian menyebabkan beliau saat ini menganggur,

"Iya hilang pekerjaan sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bekerja karena uang ganti rugi sedikit tidak bisa buat beli sawah lagi, jadi sekarang menganggur anak yang bekerja" (Karmi, 2023).

- 2) Berkurangnya luas lahan produktif dan berubahnya pendapatan masyarakat

Lahan sebagai salah satu faktor produksi memiliki peran penting karena mempengaruhi hasil produksi pertanian. Dibawah ini ditampilkan perubahan luas lahan pertanian yang dimiliki masyarakat akibat terdampak alih fungsi lahan:

Tabel 4.9

Luas Lahan Pertanian Masyarakat Sebelum Terdampak Beserta
Besarnya Luas yang Terdampak

| Nama | Luas Lahan Pertanian Sebelumnya | Luas Lahan Pertanian yang Terdampak |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Wahyuni | 2.300 m ² | 2.300 m ² |
| Sarman | 2.000 m ² | 2.000 m ² |
| Sakri | 1.700 m ² | 1.700 m ² |
| Karmi | 10 m ² | 10 m ² |
| Sugiyatno | 1.259 m ² | 512 m ² |
| Ngatiman | 2.140 m ² | 2.140 m ² |
| Yatno | 2.025 m ² | 637 m ² |
| Jimin Asbani | 1.000 m ² | 600 m ² |
| Suhari | 1.050 m ² | 720 m ² |

Sumber: Wawancara dengan masyarakat yang lahan pertaniannya dialihfungsikan

Berdasarkan data dari tabel diatas, akibat alih fungsi lahan pertanian menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian produktif. Hal ini diungkapkan juga oleh Pak Sugiyatno, Ketua RT 25 RW 13 Dusun Dompnyongan, Desa Dompnyongan dari 1.259 m² lahan pertanian yang dimilikinya, sebanyak 512 m² terdampak pembebasan yang mana itu merupakan lahan pertanian produktif, seperti yang diungkapkan beliau pada saat wawancara:

"Penghasilan saya jadi berkurang karena lahan yang terdampak pembebasan itu sebenarnya lahan produktif kalau yang masih sisa itu kurang produktif" (Sugiyatno, 2023).

Berkurangnya lahan produktif juga menyebabkan penurunan hasil panen. Pernyataan ini diungkapkan oleh Pak Yatno warga Dusun Tempelsari, Desa Dompnyongan:

"Adanya alih fungsi lahan pertanian ini tidak menyebabkan saya kehilangan pekerjaan, tapi hasil panen jadi menurun" (Yatno, 2023).

Selain itu karena adanya alih fungsi lahan pertanian menyebabkan berubahnya pendapatan masyarakat. Banyaknya pendapatan dari bertani dipengaruhi beberapa faktor diantaranya: luas lahan, tingkat produksi, identitas pengusaha, pertanaman, serta efisiensi penggunaan tenaga kerja (Kamarudin et al., 2016). Sebelum adanya alih fungsi lahan pertanian, hampir seluruh informan berpenghasilan <Rp 3.000.000 dalam sebulan yang didapatkan murni dari hasil bertani.

Akan tetapi, hal ini tentunya berbeda setelah adanya alih fungsi lahan pertanian. Meskipun rata-rata masyarakat masih berprofesi sebagai petani, tetapi karena lahan pertanian yang mereka miliki sekarang semakin menyempit luasnya, hal ini tentu menyebabkan berubahnya penghasilan di bidang pertanian, seperti halnya Pak Yatno warga Dusun Tempelsari, Desa Dompoyongan mengatakan bahwa:

"Setelah ini saya tetap bertani memanfaatkan lahan sisa yang ada, tapi lahannya tinggal sedikit, jadi hanya ditanami kacang-kacangan saja, dan hasil panen tersebut tidak dijual, dimakan sendiri jadi ya tidak punya penghasilan dari bertani lagi" (Yatno, 2023).

Kemudian beberapa masyarakat yang berpindah pekerjaannya, tentunya hal ini juga berpengaruh kepada pendapatan mereka. Dari yang tadinya mendapatkan penghasilan sendiri dari hasil panen, yang berubah pekerjaannya menjadi buruh/kuli bangunan kini pendapatannya menjadi tidak tentu. Bahkan ada juga yang benar-benar tidak berpenghasilan, seperti halnya Bu Karmi yang saat ini menganggur karena sudah kehilangan pekerjaan.

3) Tidak memberikan pemerataan ekonomi

Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan proyek tol Solo-Jogja secara teori seharusnya memberikan pemerataan ekonomi. Akan tetapi hal tersebut kurang ditanggapi positif oleh kebanyakan informan. Mereka berpendapat bahwa dalam pengalihfungsian lahan pertanian ini pemerintah hanya sekedar memberikan uang ganti rugi pada masyarakat yang terdampak tanpa memberikan kesempatan kerja untuk turut ikut serta dalam pembangunan proyek tersebut.

4) Tidak meningkatkan taraf hidup masyarakat

Dari hasil wawancara mendapatkan hasil bahwa, kebanyakan informan berpendapat bahwa dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi proyek tol Solo-Jogja sejauh ini tidak berpengaruh dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena keluarga yang terdampak alih fungsi lahan pertanian sejauh ini tidak merasakan adanya perubahan ekonomi ke arah yang lebih baik.

5) Tidak meningkatkan perekonomian masyarakat

Meski pada dasarnya alih fungsi lahan pertanian ini diberikan uang ganti rugi, tetapi uang ganti rugi tersebut tidak menjamin dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah seorang informan yang bernama Pak Sakri warga Dusun Ngrangan, Desa Joton berpendapat seperti ini (Sakri, 2023):

"Ya yang kena dampaknya meningkat, bagi yang enggak ya enggak. contohnya begini, mbak kalau punya tanah 2.000 m punya sendiri ya senang, tapi kalau 2.000 m punya saudara 10 ya enggak senang jadinya, karena harus dibagi orang 10. bahkan malah nggak bisa beli tanah lagi".

b. Dampak Positif

1) Memudahkan distribusi barang

Adanya pembangunan proyek jalan tol Solo-Jogja ini kedepannya dapat mempermudah dalam pendistribusian barang sehingga lebih efisiensi waktu dan biaya, hal ini yang kemudian nantinya akan

berdampak pada ekonomi daerah dan nasional. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Sugiyatno Ketua RT 25 Dusun Dompoyongan, Desa Dompoyongan:

"Ya saya setuju saja sih dengan adanya pembangunan jalan tol ini, karena ini kan program nasional. Kedepannya saya rasa juga akan memudahkan misalnya kalau dalam perjalanan dan perdagangan itu lebih efisien" (Sugiyatno, 2023).

2) Menumbuhkan titik perekonomian baru

Untuk saat ini pembangunan jalan tol masih dalam tahap konstruksi, akan tetapi kedepannya setelah jalan tol ini mulai beroperasi diharapkan dapat menumbuhkan titik perekonomian baru, baik bagi masyarakat setempat, pemerintah daerah, maupun secara nasional. Salah satu informan bernama Pak Ngatiman warga Dusun Dompoyongan, Desa Dompoyongan percaya dengan adanya pembangunan jalan tol ini nanti dapat memberikan peluang kepada masyarakat setempat untuk dapat membuka lapangan usaha baru di sekitar jalan tol.

D. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten Setelah Adanya Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Proyek Tol Solo-Jogja

Fenomena alih fungsi lahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Namun apabila fenomena ini terus terjadi, tentunya akan menimbulkan penyusutan lahan pertanian produktif yang kemudian akan berdampak pada ketahanan pangan di Kabupaten Klaten. Berikut ini ditampilkan data mengenai luas lahan pertanian di Kabupaten Klaten tahun 2022 setelah mulai adanya proses alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan proyek tol Solo-Jogja.

Tabel 4.10
Lahan Pertanian, Lahan Bukan Pertanian dan Luas Wilayah di
Kabupaten Klaten Tahun 2022 (ha)

| No | Kecamatan | Lahan Pertanian | | Lahan Bukan Pertanian | Luas Wilayah |
|-----|--------------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | Sawah | Bukan Sawah | | |
| 1. | Prambanan | 1.214,2 | 11,7 | 1.383,6 | 2.609,5 |
| 2. | Gantiwarno | 1.607,2 | 155,0 | 882,3 | 2.644,5 |
| 3. | Wedi | 1.538,7 | 18,0 | 1.069,0 | 2.625,7 |
| 4. | Bayat | 807,0 | 784,1 | 2.617,8 | 4.209,8 |
| 5. | Cawas | 2.135,1 | 46,0 | 1.412,4 | 3.593,5 |
| 6. | Trucuk | 1.869,2 | 2,0 | 1.597,4 | 3.468,6 |
| 7. | Kalikotes | 707,1 | 8,0 | 695,8 | 1.410,9 |
| 8. | Kebonarum | 701,7 | 2,0 | 337,9 | 1.041,6 |
| 9. | Jogonalan | 1.464,1 | 1,0 | 1.294,2 | 2.759,3 |
| 10. | Manisrenggo | 1.428,0 | 138,3 | 1.494,0 | 3.060,3 |
| 11. | Karangnongko | 722,8 | 850,5 | 1.375,9 | 2.949,2 |
| 12. | Ngawen | 1.016,3 | 8,0 | 821,2 | 1.845,5 |
| 13. | Ceper | 1.400,5 | 7,0 | 1.169,2 | 2.576,7 |
| 14. | Pedan | 833,5 | 444,3 | 722,1 | 1.999,9 |
| 15. | Karangdowo | 2.043,7 | 69,0 | 968,0 | 3.080,7 |
| 16. | Juwiring | 1.930,2 | 12,0 | 1.147,9 | 3.090,1 |
| 17. | Wonosari | 2.122,0 | 14,0 | 1.204,1 | 3.340,1 |
| 18. | Delanggu | 1.248,5 | 1,0 | 753,5 | 2.003,0 |
| 19. | Polanharjo | 1.730,0 | 92,0 | 699,6 | 2.521,6 |
| 20. | Karanganom | 1.621,7 | 11,0 | 929,0 | 2.561,7 |
| 21. | Tulung | 1.664,9 | 466,3 | 1.312,8 | 3.444,0 |
| 22. | Jatinom | 570,1 | 1.540,4 | 1.600,5 | 3.711,0 |

| | | | | | |
|--------|----------------|----------|---------|----------|----------|
| 23. | Kemalang | 25,1 | 1.847,8 | 4.146,2 | 6.019,1 |
| 24. | Klaten Selatan | 760,4 | 2,9 | 745,8 | 1.509,1 |
| 25. | Klaten Tengah | 273,0 | 1,0 | 685,5 | 959,5 |
| 26. | Klaten Utara | 272,5 | 39,9 | 805,0 | 1.17,4 |
| Jumlah | | 31.708,4 | 6.573,2 | 31.870,4 | 70.152,0 |

Sumber: Website DKPP Kabupaten Klaten diakses pada 17 November 2023

Berdasarkan tabel diatas, terlihat adanya perubahan luas lahan pertanian di Kabupaten Klaten akibat adanya alih fungsi lahan pertanian yang sebelumnya luas lahan pertanian 31.771,1 Ha pada tahun 2020, saat ini mengalami penurunan menjadi 31.708,4 Ha meskipun perubahan yang terjadi pada luas lahan pertanian tersebut tidak begitu banyak.

Tak hanya itu, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi pembangunan proyek tol Solo-Jogja sehingga menyebabkan adanya perubahan pola pemanfaatan lahan pertanian dan penurunan aktivitas produktif di bidang pertanian yang tentunya dapat memberikan dampak pada perubahan tatanan kehidupan masyarakat terutama dalam aspek sosial dan ekonomi, entah itu perubahan besar atau kecil yang dirasakan oleh masyarakat.

Sehingga dibawah ini akan diuraikan mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Klaten setelah adanya alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan proyek tol Solo-Jogja:

1. Demografi penduduk

Tabel 4.11

Indikator Kependudukan Kabupaten Klaten

| Uraian | 2020 | 2022 |
|--|-------|-------|
| Jumlah Penduduk (juta jiwa) | 1.261 | 1.276 |
| Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²) | 1.923 | 1.946 |
| Sex Ratio (L/P) (%) | 99,16 | 99,08 |

Sumber: Website BPS Kabupaten Klaten diakses pada 30 Desember 2023

Kepadatan penduduk suatu wilayah dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan luas wilayahnya. Dengan luas wilayah mencapai 65.556 km, Penduduk di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan sejak tiga tahun terakhir. Peningkatan jumlah penduduk tersebut baik disebabkan karena faktor pertumbuhan alami maupun faktor migrasi. Pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Klaten sebesar 1.261.000 jiwa, sedangkan pada tahun 2022 penduduk di Kabupaten Klaten meningkat menjadi 1.276.000 jiwa. Sehingga dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dengan luas lahan yang semakin menyempit menyebabkan kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten juga meningkat, dimana sebelumnya pada tahun 2020 kepadatan penduduk 1.923 jiwa per km² pada tahun 2022 kepadatan penduduk menjadi 1.946 jiwa per km². Kedepannya apabila jalan tol Solo-Jogja sudah mulai beroperasi dan menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah yang semakin maju sehingga tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak pendatang-pendatang baru di Kabupaten Klaten.

2. Pendidikan

Tabel 4.12

Indikator Pendidikan Kabupaten Klaten

| Uraian | 2020 | 2022 |
|--------------------------------|--------|--------|
| Angka Melek Huruf | 93,65% | 96,41% |
| Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 8,58 | 9,09 |

Sumber: Website BPS Kabupaten Klaten diakses pada 30 Desember 2023

Pada umumnya cara seseorang berfikir dan bertindak dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka. Seseorang yang mampu manamatkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak pengalaman yang akan berpengaruh terhadap produktifitas dan kemampuan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan untuk menciptakan mutu kehidupan yang lebih layak. Kemampuan baca tulis penduduk Kabupaten Klaten terus mengalami

peningkatan selama tiga tahun terakhir. Hal ini terlihat dari angka melek huruf di tahun 2020 sebesar 93,65 % naik menjadi 96,41 % di tahun 2022. Dilihat dari lamanya bersekolah, penduduk di Kabupaten Klaten tahun 2022 sudah mengalami Wajib Belajar 9 tahun. Indikator ini ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah tahun 2022 yang berada di angka 9,09 tahun, atau setara dengan kelas 1 SMA atau lulus SMP. Angka ini lebih tinggi dari Jawa Tengah yaitu 7,93 tahun.

Keberhasilan dalam pelayanan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Apabila kedepannya setelah adanya pembangunan jalan tol Solo-Jogja Kabupaten Klaten menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah yang lebih maju, akan memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sehingga tidak menutup kemungkinan bagi penduduknya untuk lebih sadar akan pendidikan dan menumbuhkan keinginan untuk menamatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

3. Kesehatan

Tabel 4.13

Indikator Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2022

| Uraian | Persentase (%) | |
|-------------------------|----------------|-------|
| | 2020 | 2022 |
| Angka Keluhan Kesehatan | 31,94 | 30,43 |
| Angka Kesakitan | 21,22 | 11,27 |

Sumber: Website BPS Kabupaten Klaten diakses pada 30 Desember 2023

Morbiditas (Angka Kesakitan) menunjukkan bahwa seseorang mengalami gangguan/keluhan kesehatan yang mengganggu keseharian seseorang baik ketika sedang sekolah, bekerja, mengurus rumah tangga, atau sedang melakukan kegiatan lain. Umumnya gangguan kesehatan yang dikeluhkan masyarakat seperti: demam, batuk, pilek, sesak napas, sakit kepala berulang, sakit gigi, diare, campak, dll. Jika semakin banyak keluhan

kesehatan yang dilaporkan oleh masyarakat, berarti tingkat kesehatan di wilayah tersebut rendah dan menunjukkan angka kesakitan di wilayah tersebut tinggi. Masyarakat di Kabupaten Klaten yang mengalami keluhan kesehatan dalam satu bulan terakhir di tahun 2022 menunjukkan persentase 30,43% menurun dari tahun 2020 sebanyak 31,94%. Sedangkan hasil Susenas pada tahun 2020 sebelumnya menunjukkan angka kesakitan Kabupaten Klaten mencapai 21,22%. Sedangkan pada tahun 2022 angka kesakitan menurun menjadi 11,27%. Hal ini berarti adanya pembangunan proyek tol Solo-Jogja yang sedang berjalan meskipun banyak menimbulkan debu dan menyebabkan masyarakat mengalami sakit batuk dan pilek, hal ini masih dinilai wajar sebagai konsekuensi efek sementara yang dirasakan masyarakat selama proyek jalan tol Solo-Jogja berlangsung.

4. Mata Pencaharian Penduduk

Tabel 4.14

Persentase Komposisi Penduduk Bekerja
Menurut Lapangan Usahanya

| Jenis Lapangan Usaha | Persentase (%) | |
|--------------------------------|----------------|------|
| | 2020 | 2022 |
| Pertanian | 19 | 18 |
| Industri Pengolahan/Manufaktur | 25 | 33 |
| Perdagangan | 29 | 31 |
| Jasa Kemasyarakatan | 13 | 13 |
| Lainnya | 14 | 5 |

Sumber: Website BPS Kabupaten Klaten diakses pada 30 Desember 2023

Distribusi penduduk berdasarkan lapangan usahanya merupakan salah satu pengukuran yang digunakan untuk melihat seberapa besar penyerapan tenaga kerja. Ukuran ini memberikan gambaran sektor mana yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dan sebaliknya. Adanya alih fungsi lahan pertanian tentunya menyebabkan penurunan pada komposisi penduduk bekerja pada lapangan usaha bidang pertanian meskipun pada kenyataannya

penurunannya tidak begitu drastis. Hal ini ditunjukkan bahwa pada tahun 2020 komposisi penduduk bekerja di bidang pertanian menunjukkan persentase sebanyak 19% kini pada tahun 2022 komposisi penduduk bekerja di bidang pertanian menunjukkan jumlah persentase sebanyak 18% yang artinya penduduk yang bekerja di bidang pertanian mengalami penurunan meskipun tidak banyak. Sedangkan lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Kabupaten Klaten pada tahun 2022 adalah industri pengolahan dan perdagangan. Adapun indikator tersebut dilihat berdasarkan pekerjaan utama penduduk.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Sehingga didapatkan kesimpulan tentang penelitian Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Proyek Tol Solo-Jogja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten sebagaimana berikut ini:

1. Adanya alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan proyek jalan tol Solo-Jogja ini berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak positif dalam aspek sosial meliputi: meningkatnya status sosial masyarakat serta adanya kepuasan terhadap pembangunan jalan tol. Sedangkan dampak negatif dalam aspek sosial meliputi: adanya perubahan parameter lingkungan sekitar seperti berkurangnya lahan hijau, dan banyaknya debu yang berasal dari proyek sehingga menyebabkan polusi udara. Adanya gangguan kesehatan yang dirasakan masyarakat seperti batuk, pilek, serta gangguan pernafasan lainnya. Konflik emosional yang terjadi antara masyarakat dengan pihak pengadaan tanah terkait Uang Ganti Rugi (UGR) yang diberikan. Meskipun pada awalnya masyarakat tidak setuju lahan pertaniannya dialih fungsikan menjadi proyek jalan tol, akan tetapi pada akhirnya masyarakat setuju karena pembangunan jalan tol dirasa untuk tujuan dan kepentingan bersama sehingga kedepannya dengan adanya jalan tol yang melalui Kabupaten Klaten dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di Kabupaten Klaten.

Adapun dampak dalam aspek ekonomi yang dirasakan masyarakat meliputi: Adanya perubahan mata pencaharian masyarakat bahkan sampai ada beberapa yang kehilangan pekerjaan, Berkurangnya luas

lahan produktif sehingga berakibat pada menurunnya pendapatan di bidang pertanian. Sejauh ini masyarakat belum merasakan adanya peningkatan ekonomi dan taraf hidup serta pemerataan ekonomi, karena pembangunan jalan tol Solo-Jogja belum selesai. Akan tetapi kedepannya apabila jalan tol Solo-Jogja sudah dapat beroperasi maka akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuka lapangan usaha baru yang dapat dilakukan masyarakat akibat adanya efek multiplier pembangunan jalan tol.

2. Perubahan pada indikator-indikator sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Klaten setelah adanya alih fungsi lahan pertanian dalam pembangunan proyek tol Solo-Jogja yang sudah mulai terlihat antara lain: menyempitnya lahan pertanian masyarakat, indikator kepadatan penduduk semakin tinggi akibat lahan yang semakin berkurang, pada indikator pendidikan memperlihatkan bahwa masyarakat di Kabupaten Klaten sudah mampu mengalami Wajib Belajar 9 tahun, indikator kesehatan tidak memperlihatkan adanya peningkatan angka kesakitan yang berarti gangguan kesehatan yang dialami masyarakat masih bersifat wajar dari adanya dampak pembangunan proyek, sedangkan pada indikator mata pencaharian penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami sedikit penurunan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, diharapkan lebih memantau masyarakat yang terdampak proyek. Apabila dampak negatif yang dirasakan masyarakat lebih banyak, maka pemerintah segera mengambil peran untuk mencari solusi agar masyarakat tidak merasa dirugikan.
2. Bagi pihak pengadaan tanah diharapkan lebih terbuka kepada masyarakat dalam hal pengukuran lahan yang terdampak, penentuan besarnya Uang Ganti Rugi (UGR) yang akan diberikan, sampai pada pelaksanaan mekanisme pencairan Uang Ganti Rugi (UGR) sehingga tidak menimbulkan konflik.

3. Bagi pihak masyarakat diharapkan memberikan persepsi yang positif dan sama-sama mendukung pembangunan jalan tol Solo-Jogja ini, karena pembangunan jalan tol ini untuk kepentingan bersama.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti analisis dampak pembangunan jalan tol setelah mulai beroperasi atau memperdalam hasil penelitian mengenai teknis pemberian Uang Ganti Rugi (UGR) yang sempat disinggung dalam penelitian ini serta memperkuat studi literatur digital agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih memuaskan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2018). *Pembangunan Ekonomi Perkotaan Edisi 2*. Graha Ilmu. Expert, Yogyakarta.
- Admin. (2016). "Al-Qur'an – Tentang Tata Ruang dan Kelestarian Lingkungan". Diakses 13 September 2023 dari bappedalitbang.banjarmasinkota.go.id, diakses pukul 12.47.
- Ahmad, F. S. (2022). Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah The Impact of Trans Java Toll Road Construction on Economic Growth in Central Java. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 11(1), 1–18.
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 1(2), 196–210.
- Ante, E., Benu, N. M., & Moniaga, V. R. . (2016). Dampak Ekonomi dan Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian Hortikultura Menjadi Kawasan Wisata Bukit Rurukan Di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 12(September), 113–124.
- Basrowi, & Juariyah, S. (2010). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 7(1), 58–81.
- Faozi, M., & Syariffudin, N. I. (2017). Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Perumahan Dan Dampak Kesejahteraan Ekonomi Petani Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 69–78.
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 203–211.
- Gunawan, C. I., Suroto, K. S., & Nugroho, A. P. (2020). *Sosial Ekonomi Pertanian*.
- Hasan, M., & Aziz, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*.
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Hatu, Rauf A. (2013). *Sosiologi Pembangunan*. Intermedia
- Huntoro, L. D., & Raharjo, S. Y. (2022). Identifikasi Dampak Rencana

Pembangunan Interchange Jalan Tol Jogja-Solo Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan di Wilayah Sekitarnya. *Seminar Nasional Dan Dimensi Tugas Akhir*, 432–442.

Intanni, Y. S. (2016). Dampak Pembangunan Jalan Tol Surabaya Mojokerto Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Mhasiswa Universitas Negeri Surabaya*, 01, 9–12.

Jamaludin, Dr. Adon Nasrullah. (2018). *Sosiologi Pembangunan*. CV Pustaka Setia, Bandung.

Jaya, Wihana Kirana. (2021). *Ekonomi Kelembagaan dan Desentralisasi*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Kamarudin, L., Anwardan, C., & Sading, Y. (2016). Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali. *Jurnal Katalogis*, 4(12), 47–55.

Khasanah, U., Nugraha, N., & Kokotiasa, W. (2017). Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Kertosono Terhadap Hak Ekonomi Masyarakat Desa Kasreman Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 108–120.

Kholifah, A. (2020). Penerapan Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi. *JESkape*, 4(2), 333–356.

Mohammad Muhibbin. (2017). Perspektif Hukum Islam Tentang Konsep Penguasaan Tanah (The Concept Of Land Ownership In The Perspective Of Islamic Law). *Al - Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17(1), 61–74.

Noor, T. R., Hamdan, A., Saifuddin, & Fanan, M. A. (n.d.). Analisis Pembangunan Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kec . Wringinanom , Kec . Kedamean , Kec . Driyorejo. *Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti*, 268–280.

Nurul Huda, et al. (2017). *Ekonomi Pembangunan Islam Edisi Pertama*. PT Kharisma Putra Utama. Kencana, Jakarta.

Ompusunggu, V. M. (2019). Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 15 Tahun 2005. *Jalan Tol*

- Purwanti, T. (2018). Petani, Lahan dan Pembangunan: Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Kehidupan Ekonomi Petani Tari. *Indonesian Journal of Anthropology*, 3(2), 95–104.
- Qur'an, A. A. (2018). Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 1–24.
- Raharja, M. C., & Lestari, U. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Omnibus Law Cipta Kerja. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 6(2), 86–101.
- Rosalina, D. (2020). Alih Fungsi Lahan Pertanian Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Dan Masalah Mursalah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 1–9.
- Rupini, A. A. A. D., Dewi, N. K. A., & Sueca, N. P. (2017). Implikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Perkembangan Spasial Daerah Pinggiran Kota (Studi Kasus: Desa Batubulan, Gianyar). *Jurnal Ilmiah Arsitektur*, 5(2), 9–18.
- Sembrani, N. (2020). *Janji Manis Pembangunan: Menelaah Rencana Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo- Yogyakarta-NYIA-Kulon Progo*. 1–17.
- Shofi, Z. D. F., Subekti, R., & Purwono Sungkowo Raharjo. (2022). Aspek Hukum Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *E-Journal Komunikasi Yustisia*, 5, 290–299.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Siddiq, M. I. (2016). Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pandaan Terhadap Masyarakat Petani yang Lahannya Dibebaskan di Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Swara Bhumi*, 1(2), 143-151.
- Sinaga, R. D., Sudarma, I. M., & Dewi, R. K. (2021). Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Subak Sesetan. *Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata*, 10(2), 727–736.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 6(2), 115-130.
- Syahdan, R, L. O. M., & Yusuf, M. (2018). *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik Studi Pada Kantor Camat Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan*. 1–12.

Tim Penyusun. Tafsir Qur'an Kemenag diakses dari <https://quran.kemenag.go.id>

Tim Penyusun. (2008) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa

Tim Penyusun. (2021). *Statistik Daerah Kabupaten Klaten 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.

Tim Penyusun. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Klaten 2023*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten.

Umanilo, M. C. B. (2016). *Marginalisasi Buruh Tani Akibat Alih Fungsi Lahan*. In Farm Publishing.

Wiji Nur Hayat. (2023) "Seksi I Tol Solo-Yogya-Kulon Progo Kelar 2023, Ini Rutenya", diakses 23 April 2023 dari cnbcindonesia.com, diakses pukul 13.49



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Beserta Draft Wawancara

Lampiran 1.1 Pedoman Beserta Draft Wawancara dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Yth:

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten

Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir saya pada Program Studi Strata 1 (S1) Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto maka saya sebagai penulis sedang menyusun skripsi dengan judul **“Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Proyek Tol Solo-Jogja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten”**. Oleh karena itu dengan kerendahan hati saya memohon kesediaan bapak untuk mengisi kuisisioner wawancara ini sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada untuk mendapatkan informasi yang akurat. Hasil dari pengisian kuisisioner ini tidak akan disebarluaskan dan hanya untuk kepentingan akademik saja. Atas perhatian dan kerjasama bapak/ibu saya ucapkan terimakasih.

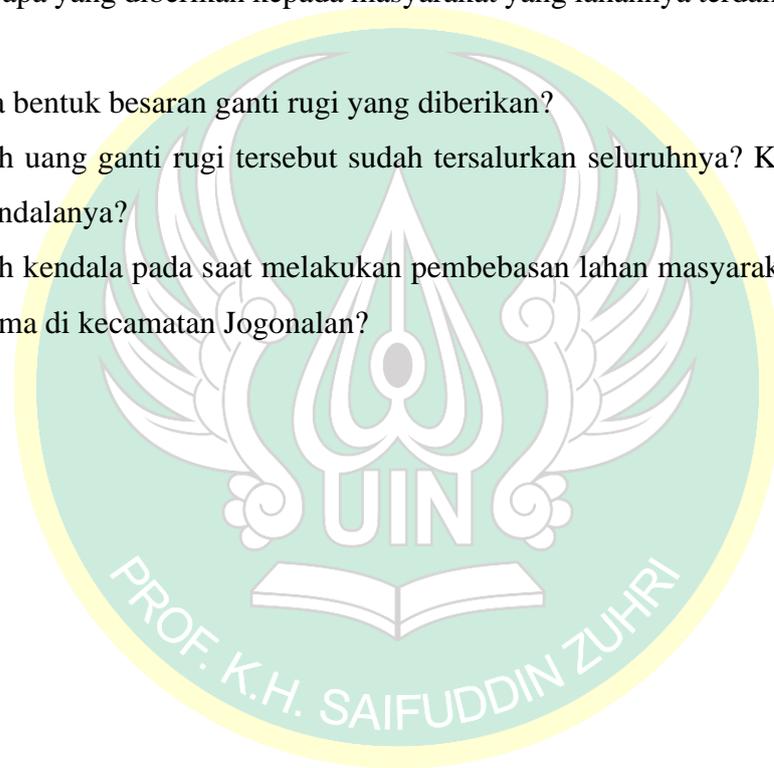
Hormat Saya,

Nur Aisyah

NIM. 2017201075

DRAFT WAWANCARA

1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Klaten?
2. Pengadaan tanah di Kabupaten Klaten sudah dimulai sejak kapan? Apakah sudah selesai semuanya?
3. Berapa luas lahan masyarakat yang dibebaskan? Adakah data per kecamatan dan per desanya?
4. Solusi apa yang diberikan kepada masyarakat yang lahannya terdampak proyek tol?
5. Berapa bentuk besaran ganti rugi yang diberikan?
6. Apakah uang ganti rugi tersebut sudah tersalurkan seluruhnya? Kalau belum, apa kendalanya?
7. Adakah kendala pada saat melakukan pembebasan lahan masyarakat tersebut? Terutama di kecamatan Jogonalan?



Lampiran 1.2 Pedoman Beserta Draft Wawancara dengan Masyarakat yang Lahan Pertaniannya Terdampak Proyek Tol Solo-Jogja

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Yth:

Bapak/Ibu masyarakat Desa Joton

Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir saya pada Program Studi Strata 1 (S1) Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto maka saya sebagai penulis sedang menyusun skripsi dengan judul **“Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Proyek Tol Solo-Jogja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten”**. Oleh karena itu dengan kerendahan hati saya memohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi kuisisioner wawancara ini sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada untuk mendapatkan informasi yang akurat. Hasil dari pengisian kuisisioner ini tidak akan disebarluaskan dan hanya untuk kepentingan akademik saja. Atas perhatian dan kerjasama bapak/ibu saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Nur Aisyah

NIM. 2017201075

PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Yth:

Bapak/Ibu masyarakat Desa Dompnyongan

Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir saya pada Program Studi Strata 1 (S1) Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto maka saya sebagai penulis sedang menyusun skripsi dengan judul “**Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Proyek Tol Solo-Jogja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten**”. Oleh karena itu dengan kerendahan hati saya memohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi kuisisioner wawancara ini sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada untuk mendapatkan informasi yang akurat. Hasil dari pengisian kuisisioner ini tidak akan disebarluaskan dan hanya untuk kepentingan akademik saja. Atas perhatian dan kerjasama bapak/ibu saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Nur Aisyah

NIM. 2017201075

DRAFT WAWANCARA

A. Identitas

1. Nama (Kedudukan dalam keluarga) :
2. Umur :
3. Jenis kelamin :
4. Pendidikan terakhir :
5. Alamat :
6. Pekerjaan :

B. Draft Pertanyaan

1. Berapakah jumlah anggota keluarga?
2. Berapa luas lahan sawah yang bapak/ibu miliki?
3. Apakah penghasilan utama bapak/ibu hanya berasal dari pertanian?
4. Apakah bapak/ibu memiliki penghasilan lain dari pekerjaan sampingan?
Jika iya, apa pekerjaan sampingan tersebut?
5. Berapa penghasilan bapak/ibu dalam sebulan?
 - < Rp 3.000.000
 - Rp 3.000.001 – Rp 5.000.000
 - > Rp 5.000.001
6. Berapa luas lahan sawah bapak/ibu yang terdampak proyek tol?
7. Berapa besarnya uang ganti rugi yang bapak/ibu dapatkan?
8. Apakah menurut bapak/ibu uang ganti rugi yang diperoleh sudah sesuai?
Sertakan alasannya
9. Uang ganti rugi tersebut akan digunakan untuk apa?
10. Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut?
Sertakan alasannya
11. Apakah alih fungsi lahan pertanian menyebabkan bapak/ibu kehilangan pekerjaan?
12. Pekerjaan apa yang hendak dilakukan setelah lahan pertanian bapak/ibu tersebut dialihfungsikan?
13. Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitar, misalnya polusi udara? Sertakan alasannya

14. Apakah menurut bapak/ibu pencemaran yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol akan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar? Sertakan alasannya
15. Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan? Sertakan alasannya
16. Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar? Sertakan alasannya
17. Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya jalan tol akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar? Sertakan alasannya
18. Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan membantu dalam pemerataan ekonomi setempat? Sertakan alasannya



Lampiran 1.3 Transkrip Hasil Wawancara dengan Pihak BPN Klaten

Hasil Wawancara dengan Bapak Sukirmo selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengadaan Tanah dari Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Klaten

1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol di Kabupaten Klaten?

Kalau dari kantor BPN dimulai dari pelimpahan wewenang dari Kanwil untuk pelaksanaan pengadaan tanah. Tapi kalau secara umum, sebelum penetapan lokasi ada tahapannya sendiri juga, tapi bukan dari kantor BPN yang mengurus. Nah dasar pelimpahan wewenang itu berdasarkan surat penetapan lokasi dari Gubernur. Setelah panlok kemudian pelimpahan wewenang dari kepala kantor wilayah BPN Jawa Tengah ke kepala kantor pertanahan kabupaten Klaten. Setelah itu kepala kantor membentuk tim pelaksana pengadaan tanah yang diketuai oleh kepala kantor pertanahan (lebih jelas dalam PP no 19 tahun 2001 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum). Dalam pembentukan tim pelaksana, ada tahapan pembentukan satgas A dan satgas B. Satgas A yang membidangi pengukuran data fisik, dari pengukuran tersebut diketahui luas yang terkena, hasil dari pengukuran tersebut adalah peta bidang tanah yang terdampak tol. Satgas B merupakan bagian yuridis (dokumen-dokumen yang dikumpulkan) yang terdiri dari BPN, Dinas PU Kabupaten Klaten, dan dinas pertanian yang memiliki tugas masing-masing. Dinas PU mendata bangunan yang terkena. Dihitung volume bangunan berapa. Dinas pertanian mendata tanaman. BPN mendata kepemilikan (sertifikat, dll). Pada tahap pendataan ini disebut tahap identifikasi. Setelah terkumpul data-datanya kemudian dibuatkan daftar data nominative per desa berdasarkan nama kepemilikan yang terdampak. Kemudian daftar tersebut diumumkan secara terbuka di balai desa. Setelah diumumkan kemudian ada verifikasi data apakah sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau belum, dengan cara mengundang masyarakat kemudian mencocokkan datanya satu per satu apakah sudah betul datanya atau belum. Jika sudah betul maka masyarakat harus menyetujui. Kemudian setelah semua setuju pendataan data diberikan ke penilai pertanahan (appraisal). Setelah data itu

diberikan ke apresial akan didapatkan nilai uang ganti rugi. Uang ganti rugi selain mencakup tanah, bangunan, tanaman, juga mencakup biaya proses pencarian tanah pengganti, biaya masa tunggu, biaya ikatan emosional. Setelah muncul total keseluruhan, masyarakat dikumpulkan kembali guna melakukan musyawarah ganti kerugian akan diberikan dalam bentuk apa, apakah uang, tanah pengganti, atau saham sesuai dengan nilai yang telah dihitung oleh apresial. Nilai tersebut bersifat final dan mengikat. Kemudian setelah semua pihak sepakat, selanjutnya validasi untuk dilakukan pembayaran. Adapun yang mengajukan pembayaran tersebut dari kementerian PPK. Kemudian PPK mengajukan ke LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Setelah dari LMAN disetujui barulah uang ganti rugi tersebut diberikan ke warga. Apabila ada warga yang tidak setuju dengan uang ganti rugi tersebut, maka diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari setelah hasil musyawarah. Apabila hasil gugatan kalah, maka mau tidak mau akan tetap dilakukan eksekusi, dan nilai ganti rugi ditetapkan ke pengadilan.

2. Pengadaaan tanah di Kabupaten Klaten sudah dimulai sejak kapan? Apakah sudah selesai semuanya?

Sudah dimulai sejak tahun 2020. Belum selesai, dari 4.071 bidang tanah kurang 217 bidang tanah yang belum selesai.

3. Berapa luas lahan masyarakat yang dibebaskan? Adakah data per kecamatan dan per desa nya?

terlampir

4. Solusi apa yang diberikan kepada masyarakat yang lahannya terdampak proyek tol?

Diberikan ganti rugi sesuai dengan yang telah dijelaskan diatas

5. Berapa bentuk besaran ganti rugi yang diberikan?

Beda-beda, tergantung jenisnya. yang memberikan oleh apresial, mereka punya panduan sendiri.

6. Apakah uang ganti rugi tersebut sudah tersalurkan seluruhnya? Kalau belum, apa kendalanya?

Kurang 217 bidang yang masih dalam proses

7. Adakah kendala pada saat melakukan pembebasan lahan masyarakat tersebut? Terutama di kecamatan Jogonalan?

Salah satunya yang tidak menyetujui besarnya nilai ganti rugi, kemudian kalau tanah wakaf yang terkena pembangunan maka harus mencari tanah pengganti sehingga memerlukan waktu karena tidak bisa diganti uang, kemudian untuk tanah kas desa harus ada izin dari bupati dan gubernur. biasanya warga yang tidak setuju karena besar nilai uang ganti rugi yang diberikan. untuk konflik secara umum di kecamatan jogonalan tidak ada, mungkin konflik kecil tanah yang masih jadi sengketa keluarga sehingga belum bisa diberikan uang ganti rugi.



Lampiran 1.4 Transkrip Hasil Wawancara dengan Masyarakat yang Lahan Pertaniannya dibebaskan di Desa Joton dan Desa Dompoyongan, Kecamatan Jogonalan

P : Peneliti
I : Informan

Informan 1

A. Identitas

1. Nama (Kedudukan dalam keluarga) : Wahyuni
2. Umur : 42 tahun
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Pendidikan terakhir : SMK
5. Alamat : Dusun Bladu RT 04 RW 02, Desa Joton, Kecamatan Jogonalan
6. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

B. Draft Pertanyaan

1. P : Berapakah jumlah anggota keluarga?
I : Ada 4 orang (Suami, istri, dan 2 orang anak)
2. P : Berapa luas lahan sawah yang bapak/ibu miliki?
I : $\pm 2.300 \text{ m}^2$
3. P : Apakah penghasilan utama bapak/ibu hanya berasal dari pertanian?
I : Iya, karena suami bekerja sebagai petani sehari-harinya
4. P : Apakah bapak/ibu memiliki penghasilan lain dari pekerjaan sampingan? Jika iya, apa pekerjaan sampingan tersebut?
I : Tidak memiliki pekerjaan sampingan
5. P : Berapa penghasilan bapak/ibu dalam sebulan?
I :
 $< \text{Rp } 3.000.000$
 $\text{Rp } 3.000.001 - \text{Rp } 5.000.000$

> Rp 5.000.001

6. P : Berapa luas lahan sawah bapak/ibu yang terdampak proyek tol?
I : Semuanya terdampak
7. P : Berapa besarnya uang ganti rugi yang bapak/ibu dapatkan?
I : Sekitar 2 milyar lebih 300 kalau tidak salah, kalau sawah itu ganti rugi per meternya 1 juta mbak
8. P : Apakah menurut bapak/ibu uang ganti rugi yang diperoleh sudah sesuai? Sertakan alasannya
I : Ya mau tidak mau terima aja lah, padahal mah masih kurang sesuai. karena kalau mau mengajukan banding juga ribet, harus bawa pengacara. karena yang saya rasakan itu sebenarnya terdapat hasil pengukuran yang beda antara luas asli dengan yang diukur pihak BPN
9. P : Uang ganti rugi tersebut akan digunakan untuk apa?
I : Untuk beli sawah lagi di desa Tambakan, sepatok itu harga belinya 725 juta tapi belum mencakup biaya-biaya lain
10. P : Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut? Sertakan alasannya
P : Sebenarnya saya setuju nggak setuju sih mbak dengan adanya pembangunan jalan tol ini. karena bagi saya lebih enak berkumpul dekat dengan tetangga-tetangga rumah. kan kalau gini jadi banyak yang digusur rumahnya
11. P : Apakah alih fungsi lahan pertanian menyebabkan bapak/ibu kehilangan pekerjaan?
I : Tidak, karena bisa beli sawah baru lagi
12. P : Pekerjaan apa yang hendak dilakukan setelah lahan pertanian bapak/ibu tersebut dialihfungsikan?
I : masih bertani
13. P : Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitar, misalnya polusi udara? Sertakan alasannya
I : Iyalah, debunya masuk rumah banyak banget

14. P : Apakah menurut bapak/ibu pencemaran yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol akan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar? Sertakan alasannya
- I : Bisa mbak, banyak yang batuk pilek. apalagi sekarang sedang kemarau panjang, banyak debu, polusi
15. P : Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan? Sertakan alasannya
- I : Bisa, karena saat pembangunan menyebabkan jalan-jalan rusak
16. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar? Sertakan alasannya
- I : Belum tahu sih mbak, belum merasakan
17. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya jalan tol akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar? Sertakan alasannya
- I : Belum tahu karena belum merasakan
18. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan membantu dalam pemerataan ekonomi setempat? Sertakan alasannya
- I : Enggak lah, karena kan tergantung keadaan ekonomi sendiri-sendiri mbak.

Informan 2

A. Identitas

1. Nama (Kedudukan dalam keluarga) : Sarman (Kepala Keluarga)
2. Umur : 62 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan terakhir : SLTA
5. Alamat : Dusun Ngrangan, Desa Joton,
Kecamatan Jogonalan
6. Pekerjaan : Petani

B. Draft Pertanyaan

1. P : Berapakah jumlah anggota keluarga?
I : Tinggal 2 orang, saya dan istri

2. P : Berapa luas lahan sawah yang bapak/ibu miliki?
I : 2.000 m²
3. P : Apakah penghasilan utama bapak/ibu hanya berasal dari pertanian?
I : Iya, menggarap lahan sawah sendiri
4. P:Apakah bapak/ibu memiliki penghasilan lain dari pekerjaan sampingan? Jika iya, apa pekerjaan sampingan tersebut?
Jawab: tidak memiliki pekerjaan sampingan
5. P : Berapa penghasilan bapak/ibu dalam sebulan?
I :
 < Rp 3.000.000
 Rp 3.000.001 – Rp 5.000.000
 > Rp 5.000.001
6. P : Berapa luas lahan sawah bapak/ibu yang terdampak proyek tol?
I : semuanya terdampak
7. P : Berapa besarnya uang ganti rugi yang bapak/ibu dapatkan?
I : sekitar 2, 2 milyar
8. P : Apakah menurut bapak/ibu uang ganti rugi yang diperoleh sudah sesuai? Sertakan alasannya
I: ya sudah lah mbak, karena sudah diterima
9. P : Uang ganti rugi tersebut akan digunakan untuk apa?
I : beli sawah baru, malah bisa dapat lebih luas dan masih sisa uangnya untuk bangun rumah anak
10. P : Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut? Sertakan alasannya
I : la kan sudah disepakati ya setuju saja mbak, mau gak mau yang menggunakan pemerintah
11. P : Apakah alih fungsi lahan pertanian menyebabkan bapak/ibu kehilangan pekerjaan?
I : enggak, biasa saja. karena masih tetap bekerja sebagai petani

12. P: Pekerjaan apa yang hendak dilakukan setelah lahan pertanian bapak/ibu tersebut dialihfungsikan?

I : masih bertani

13. P: Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitar, misalnya polusi udara? Sertakan alasannya

I : ya memang dampaknya terkena debunya, tapi ya masih wajar

14. P: Apakah menurut bapak/ibu pencemaran yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol akan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I : iya, pasti dampaknya ada batuk, sesak

15. P: Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan? Sertakan alasannya

I : enggak ada

16. P: Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I : enggak, kalau ada yang bekerja di proyeknya lah baru bisa menguntungkan, kalau ndak ada ya biasa-biasa saja

17. P: Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya jalan tol akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I : kalau saya biasa-biasa saja mbak

18. P: Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan membantu dalam pemerataan ekonomi setempat? Sertakan alasannya

P : saya rasa enggak mbak, karena kalau yang kena ya pasti untung

Informan 3

A. Identitas

1. Nama (Kedudukan dalam keluarga) : Sakri (Kepala Keluarga)
2. Umur : 60 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki

4. Pendidikan terakhir : SLTA
5. Alamat : Dusun Ngrangan, Desa Joton,
Kecamatan Jogonalan
6. Pekerjaan : Petani

B. Draft Pertanyaan

1. P : Berapakah jumlah anggota keluarga?
I : 3 orang (Suami, istri, dan 1 orang anak)
2. P : Berapa luas lahan sawah yang bapak/ibu miliki?
I : 1.700 m²
3. P : Apakah penghasilan utama bapak/ibu hanya berasal dari pertanian?
I : Iya, tapi saya cuma jadi buruh tani
4. P : Apakah bapak/ibu memiliki penghasilan lain dari pekerjaan sampingan? Jika iya, apa pekerjaan sampingan tersebut?
I : tidak ada
5. P : Berapa penghasilan bapak/ibu dalam sebulan?
I :
 < Rp 3.000.000
 Rp 3.000.001 – Rp 5.000.000
 > Rp 5.000.000
6. P : Berapa luas lahan sawah bapak/ibu yang terdampak proyek tol?
I : semuanya terdampak
7. P : Berapa besarnya uang ganti rugi yang bapak/ibu dapatkan?
I : Jawab: sekitar 1,8 milyar
8. P : Apakah menurut bapak/ibu uang ganti rugi yang diperoleh sudah sesuai? Sertakan alasannya
I : ya sebenarnya belum, mau gimana-gimana juga gak bakal ditanggapi. padahal punya saya kurang 130 an m. sudah mencoba menggugat 3 kali tapi tidak ditanggapi, ya Namanya orang kecil harus terima-terima saja.
9. P : Uang ganti rugi tersebut akan digunakan untuk apa?
I :Jawab: untuk beli sawah lagi tapi di kecamatan lain, di Manisrenggo dan Karangnongko agak jauh dari rumah karena memang yang disekitar

sini sudah tidak ada lagi. Lebih sedikit buat biaya hidup dan beli kendaraan anak kami.

10. P: Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut? Sertakan alasannya

I : ya setuju mbak, orang kenyataannya sudah dimulai

11. P: Apakah alih fungsi lahan pertanian menyebabkan bapak/ibu kehilangan pekerjaan?

I : tidak

12. P: Pekerjaan apa yang hendak dilakukan setelah lahan pertanian bapak/ibu tersebut dialihfungsikan?

I : masih bertani

13. P: Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitar, misalnya polusi udara? Sertakan alasannya

I : ya pasti, kan sekarang dampaknya yang dirasakan debu, banyak yang mengeluh banyak debu, apalagi sedang musim kemarau hawanya juga tambah panas apalagi ini rumah saya depan sawah banget yang akan kena pembangunan, cuma sawah itu belum mulai di bego karena belum dibayar

14. P: Apakah menurut bapak/ibu pencemaran yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol

akan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I: iya, kan banyak yang batuk mbak. terus udaranya tu tambah panas, karena pohon-pohon ditebangi. masuk akal itu. kalau musim hujan, mungkin agak berkurang

15. P: Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan? Sertakan alasannya

I : ya pasti ada, tapi kalau ini belum ada. katanya orang-orang sih, aku juga belum mengalami. katanya kalau yang udah-udah ada yang retak-retak temboknya karena mungkin getaran mobil maupun mesin-mesin yang berat

16. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar? Setakan alasannya

I : ya enggak mbak, karena hanya beberapa orang yang ikut disitu. sama saja kalau saya pribadi

17. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya jalan tol akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

P : ya yang kena dampaknya meningkat, bagi yang enggak ya enggak. contohnya begini, mbak kalau punya tanah 2.000 m punya sendiri ya senang, tapi kalau 2.000 m punya saudara 10 ya nggak senang jadinya, karena harus dibagi orang 10. bahkan malah nggak bisa beli tanah lagi

18. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan membantu dalam pemerataan ekonomi setempat? Sertakan alasannya

I : enggak mbak, pemerataan itu kalau ada lapangan kerja terus bisa kerja disitu kalau begini ini kan hanya beberapa orang mbak yang digunakan

Informan 4

A. Identitas

1. Nama (Kedudukan dalam keluarga) : Karmi (Kepala Keluarga)
2. Umur : 58 tahun
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Pendidikan terakhir : SLTP
5. Alamat: Dusun Gondangalas RT 14 RW 07, Desa Dompok, Kecamatan Jogonalan
6. Pekerjaan : Petani

B. Draft Pertanyaan

1. P : Berapakah jumlah anggota keluarga?
I : 2 orang, saya dan 1 anak
2. P : Berapa luas lahan sawah yang bapak/ibu miliki?
I : seperempat itu sekitar 10 meter kayaknya, cuma sedikit kok mbak

3. P : Apakah penghasilan utama bapak/ibu hanya berasal dari pertanian?
I : Iya
4. P : Apakah bapak/ibu memiliki penghasilan lain dari pekerjaan sampingan? Jika iya, apa pekerjaan sampingan tersebut?
I : tidak ada
5. P : Berapa penghasilan bapak/ibu dalam sebulan?
I :
 < Rp 3.000.000
 Rp 3.000.001 – Rp 5.000.000
 > Rp 5.000.001
6. P : Berapa luas lahan sawah bapak/ibu yang terdampak proyek tol?
I : iya semuanya
7. P : Berapa besarnya uang ganti rugi yang bapak/ibu dapatkan?
I : 100 juta
8. P : Apakah menurut bapak/ibu uang ganti rugi yang diperoleh sudah sesuai? Sertakan alasannya
I : ya sesuai lah
9. P : Uang ganti rugi tersebut akan digunakan untuk apa?
I : untuk beli kendaraan anak dan biaya hidup
10. P : Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut? Sertakan alasannya
I : setuju, karena dapat uang bisa buat jajan (biaya hidup)
11. P : Apakah alih fungsi lahan pertanian menyebabkan bapak/ibu kehilangan pekerjaan?
I : iya hilang pekerjaan sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bekerja karena uang ganti rugi sedikit tidak bisa buat beli sawah lagi
12. P : Pekerjaan apa yang hendak dilakukan setelah lahan pertanian bapak/ibu tersebut dialihfungsikan?
I : menganggur, anak yang bekerja
13. P : Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitar, misalnya polusi udara?

Sertakan alasannya

I : kurang tahu, karena belum merasakan pembangunannya belum sampai sini

14. P : Apakah menurut bapak/ibu pencemaran yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol

akan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I : kurang tahu, belum merasakan

15. P : Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan? Sertakan alasannya

P : wah kurang tahu ya mbak

16. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

P : tidak, sama saja

17. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya jalan tol akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I : tidak, karena di keluarga saya juga tidak ada perubahan yang lebih baik

18. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan membantu dalam pemerataan ekonomi setempat? Sertakan alasannya

I : tidak

Informan 5

A. Identitas

1. Nama (Kedudukan dalam keluarga) : Sugiyatno (Kepala Keluarga)
2. Umur : 42 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan terakhir : STM
5. Alamat : Dusun Dompnyongan RT 25 RW
13, Desa Dompnyongan, Kecamatan Jogonalan
6. Pekerjaan : Petani

B. Draft Pertanyaan

1. P: Berapakah jumlah anggota keluarga?
I : 3 orang (Suami, istri, dan 1 orang anak)
2. P: Berapa luas lahan sawah yang bapak/ibu miliki?
I : 1.259 m²
3. P: Apakah penghasilan utama bapak/ibu hanya berasal dari pertanian?
Jawab: enggak juga, tapi juga sebelumnya menggarap lahan sendiri
4. P: Apakah bapak/ibu memiliki penghasilan lain dari pekerjaan sampingan? Jika iya, apa pekerjaan sampingan tersebut?
I : jualan online sama jadi tukang pijet/terapi
5. P: Berapa penghasilan bapak/ibu dalam sebulan?
I :
 < Rp 3.000.000
 Rp 3.000.001 – Rp 5.000.000
 > Rp 5.000.001
6. P: Berapa luas lahan sawah bapak/ibu yang terdampak proyek tol?
I : 512 m²
7. P: Berapa besarnya uang ganti rugi yang bapak/ibu dapatkan?
I : kurang lebih 500 juta
8. P: Apakah menurut bapak/ibu uang ganti rugi yang diperoleh sudah sesuai? Sertakan alasannya
I : kalau untuk lahan sawah saya kira sudah cukup lah
9. P: Uang ganti rugi tersebut akan digunakan untuk apa?
I : untuk beli sawah lagi, masih disekitar sini
10. P: Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut? Sertakan alasannya
I : ya saya setuju saja dengan adanya pembangunan jalan tol ini, karena untuk program nasional yak karena misalnya kalau dalam perjalanan dan perdagangan itu lebih efisien
11. P: Apakah alih fungsi lahan pertanian menyebabkan bapak/ibu kehilangan pekerjaan?

I : bukan kehilangan, tapi penghasilan jadi berkurang kan lahannya sebenarnya itu produktif kalau yang masih sisa itu kurang produktif

12. P : Pekerjaan apa yang hendak dilakukan setelah lahan pertanian bapak/ibu tersebut dialihfungsikan?

I : jualan online dan menjadi tukang pijat/terapi

13. P : Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitar, misalnya polusi udara? Sertakan alasannya

I : kalau waktu pembangunan iya ada, karena musim kemarau ya. tapi ya udah disirami tapi ya masih ada debunya, karena juga dampak kemarau

14. P : Apakah menurut bapak/ibu pencemaran yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol akan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I : belum mulai sih mbak kalau sini ini baru mau mulai tiga hari yang lalu itu yang disekitar jembatan, jadi ya belum merasakan sih dampaknya

15. P : Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan? Sertakan alasannya

I : kalau menurut saya sih enggak, mungkin kalau ntar ada penghijauan pohon mungkin lebih sejuk

16. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I : ya kalau yang dapat sih iya

17. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya jalan tol akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I : ya, tetangga sekitar jadi ada yang punya rumah, mobil kalau saya mah biasa aja hehe

18. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan membantu dalam pemerataan ekonomi setempat? Sertakan

alasannya

I : insyaallah bisa.

Informan 6

A. Identitas

1. Nama (Kedudukan dalam keluarga) : Ngatiman (Kepala Keluarga)
2. Umur : 53 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan terakhir : SMA
5. Alamat : Dusun Dompnyongan RT 25 RW
13, Desa Dompnyongan, Kecamatan Jogonalan
6. Pekerjaan : Petani

B. Draft Pertanyaan

1. P : Berapakah jumlah anggota keluarga?
I : 5 orang
2. P : Berapa luas lahan sawah yang bapak/ibu miliki?
I : 2.140 an m²
3. P : Apakah penghasilan utama bapak/ibu hanya berasal dari pertanian?
I : iya, bertani
4. P : Apakah bapak/ibu memiliki penghasilan lain dari pekerjaan sampingan? Jika iya, apa pekerjaan sampingan tersebut?
I : kadang glidig bangunan mbak
5. P : Berapa penghasilan bapak/ibu dalam sebulan?
I :
 < Rp 3.000.000
 Rp 3.000.001– Rp 5.000.000
 > Rp 5.000.001
6. P : Berapa luas lahan sawah bapak/ibu yang terdampak proyek tol?
I : semua
7. P : Berapa besarnya uang ganti rugi yang bapak/ibu dapatkan?
I : sekitar 2 miliar 700

8. P : Apakah menurut bapak/ibu uang ganti rugi yang diperoleh sudah sesuai? Sertakan alasannya
I : sudah sesuai
9. P : Uang ganti rugi tersebut akan digunakan untuk apa?
I : untuk renovasi rumah, dan dibagi dengan keluarga
10. P : Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut? Sertakan alasannya
I : setuju, karena dapat uang ganti rugi jadi bisa benerin rumah
11. P : Apakah alih fungsi lahan pertanian menyebabkan bapak/ibu kehilangan pekerjaan?
I : sama saja tidak berubah
12. P : Pekerjaan apa yang hendak dilakukan setelah lahan pertanian bapak/ibu tersebut dialihfungsikan?
I : buruh bangunan
13. P : Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitar, misalnya polusi udara? Sertakan alasannya
I : karena belum sampai sini pembangunannya belum merasakan, tapi kalau polusi udara ya iya debu itu
14. P : Apakah menurut bapak/ibu pencemaran yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol akan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar? Sertakan alasannya
I: kalau saya belum merasakan mbak
15. P : Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan? Sertakan alasannya
I : belum merasakan karena belum sampai daerah sini pembangunannya
16. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar? Sertakan alasannya
I : kemungkinan, karena ada yang ikut proyek trus ada juga yang jaga keamanan.

17. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya jalan tol akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I : ya kemungkinan iya, tapi karena ini kan belum sampai sini mbak. kalau sudah sampai kan nanti juga mungkin banyak warung-warung yang jualan disekitar situ

18. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan membantu dalam pemerataan ekonomi setempat? Sertakan alasannya

I : belum tahu kalau untuk pemerataan ekonomi

Informan 7

A. Identitas

1. Nama (Kedudukan dalam keluarga) : Yatno (Kepala Keluarga)
2. Umur : 73 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan terakhir : SLTA
5. Alamat : Dusun Tempelsari, Desa Domyongan, Kecamatan Jogonalan
6. Pekerjaan : Petani

B. Draft Pertanyaan

1. P : Berapakah jumlah anggota keluarga?
I : 2 orang (dengan istri)
2. P : Berapa luas lahan sawah yang bapak/ibu miliki?
I : 2.025 m²
3. P : Apakah penghasilan utama bapak/ibu hanya berasal dari pertanian?
I : iya
4. P : Apakah bapak/ibu memiliki penghasilan lain dari pekerjaan sampingan? Jika iya, apa pekerjaan sampingan tersebut?
I : tidak ada
5. P : Berapa penghasilan bapak/ibu dalam sebulan?
I :

< Rp 3.000.000

Rp 3.000.001 – Rp 5.000.000

> Rp 5.000.001

6. P : Berapa luas lahan sawah bapak/ibu yang terdampak proyek tol?
I : 637 m²
7. P : Berapa besarnya uang ganti rugi yang bapak/ibu dapatkan?
I : ± 790 juta
8. P : Apakah menurut bapak/ibu uang ganti rugi yang diperoleh sudah sesuai? Sertakan alasannya
I : sudah sesuai
9. P : Uang ganti rugi tersebut akan digunakan untuk apa?
I : untuk memperbaiki rumah, sisanya untuk ditabung
10. P : Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut? Sertakan alasannya
I : setuju, karena menurut saya dengan adanya jalan tol nantinya dapat mempercepat waktu tempuh perjalanan, karena saudara rumahnya jauh-jauh
11. P : Apakah alih fungsi lahan pertanian menyebabkan bapak/ibu kehilangan pekerjaan?
I : tidak, masih ada sisa lahan tetapi hasil panen jadi menurun
12. P : Pekerjaan apa yang hendak dilakukan setelah lahan pertanian bapak/ibu tersebut dialihfungsikan?
I : tetap bertani memanfaatkan lahan sisa yang ada, lahannya tinggal sedikit jadi ditanami kacang-kacangan saja, hasil panen tersebut tidak dijual untuk dimakan sendiri jadi sekarang juga tidak punya penghasilan dari bertani
13. P : Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitar, misalnya polusi udara? Sertakan alasannya
I : pasti ada, banyak debu itu lho mbak
14. P : Apakah menurut bapak/ibu pencemaran yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol

akan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I : kalau sekarang ini belum ada

15. P : Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan? Sertakan alasannya

P : tidak, karena kesepakatan dengan pengembang pembangunan ini tidak akan merugikan masyarakat, mungkin kalau hujan nantinya akan dibuatkan saluran irigasi disekitar proyek agar urugan tanah proyek tidak menyebabkan longsor

16. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I : yang mau berusaha saja bisa menambah

17. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya jalan tol akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I : ya bisa

18. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan membantu dalam pemerataan ekonomi setempat? Sertakan alasannya

I : yang kena bisa, tapi yang tidak kena ya biasa saja

Informan 8

A. Identitas

1. Nama (Kedudukan dalam keluarga) : Jimin Asbani (Kepala Keluarga)
2. Umur : 63 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan terakhir : SLTA
5. Alamat : Dusun Tempelsari, Desa Dompokan, Kecamatan Jogonalan
6. Pekerjaan : Petani

B. Draft Pertanyaan

1. P : Berapakah jumlah anggota keluarga?
I : 2 orang (dengan istri)

2. P : Berapa luas lahan sawah yang bapak/ibu miliki?
I : Jawab: 1.000 m²
3. P : Apakah penghasilan utama bapak/ibu hanya berasal dari pertanian?
I : iya, menggarap sawah milik sendiri
4. P : Apakah bapak/ibu memiliki penghasilan lain dari pekerjaan sampingan? Jika iya, apa pekerjaan sampingan tersebut?
I : tidak ada
5. P : Berapa penghasilan bapak/ibu dalam sebulan?
I :
 < Rp 3.000.000
 Rp 3.000.001– Rp 5.000.000
 > Rp 5.000.001
6. P : Berapa luas lahan sawah bapak/ibu yang terdampak proyek tol?
I : 600 m²
7. P : Berapa besarnya uang ganti rugi yang bapak/ibu dapatkan?
I : ± 800 an juta
8. P : Apakah menurut bapak/ibu uang ganti rugi yang diperoleh sudah sesuai? Sertakan alasannya
I : sudah sesuai
9. P : Uang ganti rugi tersebut akan digunakan untuk apa?
I : beli tanah baru sama luasnya 600 m², masih di dekat rumah ya sekitar 5 kiloan lah dari rumah, sisanya dibagikan untuk kakak karena sawah saya kan masih tanah waris, jadi ya meskipun yang kena bagian saya tetap saya bagi dengan kakak uang ganti ruginya, dan sisanya lagi untuk diberikan ke anak
10. P : Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut? Sertakan alasannya
I : setuju tidak setuju, ya karena sudah menjadi peraturan pemerintah
11. P : Apakah alih fungsi lahan pertanian menyebabkan bapak/ibu kehilangan pekerjaan?
I : tidak

12. P : Pekerjaan apa yang hendak dilakukan setelah lahan pertanian bapak/ibu tersebut dialihfungsikan?

P : masih bertani

13. P : Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitar, misalnya polusi udara? Sertakan alasannya

P : belum tahu, karena belum sampai sini, tapi yang sudah mulai kalau yang dekat ya merasakan

14. P : Apakah menurut bapak/ibu pencemaran yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol akan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I : kalau sekarang ini banyak yang batuk-batuk karena polusi apalagi sedang kemarau panjang, kalau sini itu sampai sekarang belum turun hujan

15. P : Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan? Sertakan alasannya

I : enggak

16. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I : wah kalau itu menurut saya sih enggak

17. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya jalan tol akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

Jawab: untuk masyarakat kecil seperti saya ini ya enggak mbak, karena dari proyek tersebut juga tidak membuka kesempatan kerja untuk masyarakat sekitar karena sudah dikerjakan pemborong

18. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan membantu dalam pemerataan ekonomi setempat? Sertakan alasannya

I : tidak tahu karena saya pun belum merasakan apa-apa

Informan 9

A. Identitas

1. Nama (Kedudukan dalam keluarga) : Suhari (Kepala Keluarga)
2. Umur : 74 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan terakhir : SMP
5. Alamat : Dusun Tempelsari, Desa Domyongan, Kecamatan Jogonalan
6. Pekerjaan : Petani

B. Draft Pertanyaan

1. P : Berapakah jumlah anggota keluarga?
I : 2 orang (dengan istri)
2. P : Berapa luas lahan sawah yang bapak/ibu miliki?
I : 1.050 m²
3. P : Apakah penghasilan utama bapak/ibu hanya berasal dari pertanian?
I : iya
4. P : Apakah bapak/ibu memiliki penghasilan lain dari pekerjaan sampingan? Jika iya, apa pekerjaan sampingan tersebut?
Jawab: tidak ada
5. P : Berapa penghasilan bapak/ibu dalam sebulan?
I :
 < Rp 3.000.000
 Rp 3.000.001 – Rp 5.000.000
 > Rp 5.000.001
6. P : Berapa luas lahan sawah bapak/ibu yang terdampak proyek tol?
I : 720 m²
7. P : Berapa besarnya uang ganti rugi yang bapak/ibu dapatkan?
I : ± 800 juta
8. P : Apakah menurut bapak/ibu uang ganti rugi yang diperoleh sudah sesuai? Sertakan alasannya

I : sebetulnya belum sesuai, karena menurut saya harga tanah kurang menjangkau, tapi ya nurut saja lah sama pemerintah

9. P : Uang ganti rugi tersebut akan digunakan untuk apa?

I : untuk buat rumah untuk tinggal anak cucu

10. P : Apakah bapak/ibu setuju dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut? Sertakan alasannya

I : sebenarnya kurang setuju

11. P : Apakah alih fungsi lahan pertanian menyebabkan bapak/ibu kehilangan pekerjaan?

I : bisa, karena sekarang memang tidak bekerja

12. P : Pekerjaan apa yang hendak dilakukan setelah lahan pertanian bapak/ibu tersebut dialihfungsikan?

I : sekarang menganggur, karena sisa lahan anak yang menggarap anak

13. P : Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitar, misalnya polusi udara? Sertakan alasannya

I : ya bisa mencemarkan

14. P : Apakah menurut bapak/ibu pencemaran yang ditimbulkan dari pembangunan jalan tol akan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I : bisa

15. P : Apakah menurut bapak/ibu pembangunan jalan tol tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan? Sertakan alasannya

I : bisa

16. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I : saya kira enggak, karena pendapatan masih sama saja

17. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya jalan tol akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar? Sertakan alasannya

I : tidak, karena kan lahan pertanian berkurang otomatis hasil panen ya jadi berkurang

18. P : Apakah menurut bapak/ibu dengan adanya pembangunan jalan tol akan membantu dalam pemerataan ekonomi setempat? Sertakan alasannya

I : tergantung masing-masing orangnya sih mbak



Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 2.1



Dokumentasi Ketika Observasi BPN Kabupaten Klaten.
Wawancara dengan Bapak Sukirmo selaku Koordinator
Kelompok Subtansi Pengadaan Tanah.
(Klaten, 11 Oktober 2023)

Lampiran 2.2



Dokumentasi dengan Bapak Aris Gunawan Terkait
Permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data
di Kantor Kepala Desa Joton.
(Klaten, 11 Oktober 2023)

Lampiran 2.3



Dokumentasi dengan Bapak Kelik Terkait
Permohonan Izin Penelitian dan Pengambilan Data
di Kantor Kepala Desa Dompnyongan.
(Klaten, 11 Oktober 2023)

Lampiran 2.4 Dokumentasi Wawancara dengan Masyarakat yang Lahan Pertaniannya dialihfungsikan



Dokumentasi wawancara dengan Bu Wahyuni
sebagai informan 1
(Klaten, 16 Oktober 2023)



Dokumentasi wawancara dengan Pak Sarman
sebagai informan 2
(Klaten, 16 Oktober 2023)



Dokumentasi wawancara dengan Pak Sakri
sebagai informan 3
(Klaten, 16 Oktober 2023)



Dokumentasi wawancara dengan Bu Karmi
sebagai informan 4
(Klaten, 17 Oktober 2023)



Dokumentasi wawancara dengan Pak Sugiyatno
sebagai informan 5
(Klaten, 17 Oktober 2023)



Dokumentasi wawancara dengan Pak Ngatiman
sebagai informan 6
(Klaten, 17 Oktober 2023)



Dokumentasi wawancara dengan Pak Yatno
sebagai informan 7
(Klaten, 13 November 2023)



Dokumentasi wawancara dengan Pak Jimin Asbani
sebagai informan 8
(Klaten, 13 November 2023)



Dokumentasi wawancara dengan Pak Suhari
sebagai informan 9
(Klaten, 13 November 2023)

Lampiran 2.5

Dokumentasi Lahan Pertanian Sebelum dialihfungsikan
(Klaten, 16 Oktober 2023)

Lampiran 2.6





Dokumentasi Lahan Pertanian Setelah dialihfungsikan
(Klaten, 13 November 2023)



Lampiran 3 Surat Izin Observasi Pendahuluan di BPN Kabupaten Klaten



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Faa: 0281-636553; Website: febl.uinsaiwu.ac.id

Nomor : 1990/Un.19/FEBLJES/PP.009/05/2023 Purwokerto, 15 Mei 2023
 Lamp. : -
 Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Klaten
 Di
 Klaten

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul Implikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Proyek Tol Solo-Jogja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten. Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nur Aisyah
2. NIM : 2017201075
3. Semester / Program Studi : 6 /Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Polodadi, Tarubasan, Karanganom, Klaten

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Besarnya uang ganti rugi lahan pertanian yang terdampak proyek tol Solo-Jogja
2. Tempat/ Lokasi : Dinas yang bersangkutan
3. Waktu Observasi : Bulan Mei 2023 s/d selesai

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Koordinator Prodi Ekonomi Syariah

 Dwi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
 NIP. 19851112 200912 2 007

Tembusan Yth.
 1. Wakil Dekan I
 2. Kasubbag Akademik
 3. Arsip

Lampiran 4 Surat Balasan Izin Observasi dari BPN Kabupaten Klaten



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Veteran No. 88 Klaten, Telp. (0272) 324534, 321983 Fax. (0272) 321172, Kode Pos 574001

| | | |
|----------|--|---------------------|
| Nomor | : UP.02.01/519-33.10.100/V/2023 | Klaten, 19 Mei 2023 |
| Sifat | : Biasa | |
| Lampiran | : - | |
| Hal | : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan | |

Yth. Koord. Prodi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara tertanggal 15 Mei 2023 Nomor :
1990/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/05/2023 hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat di atas, bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya Kami tidak keberatan
menerima Permohonan Izin Observasi Pendahuluan Mahasiswa atas nama :

| | |
|-----------------|--|
| Nama | : Nur Aisyah |
| NIM | : 2017201075 |
| Objek observasi | : Besarnya uang ganti rugi lahan pertanian yang terdampak proyek tol Solo-Jogja |
| Waktu Observasi | : Bulan Mei 2023 s/d selesai |

Berdasarkan hal tersebut, yang bersangkutan dipersilahkan untuk datang ke
Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten bertemu dengan Kepala Seksi Pengadaan
Tanah dan Pengembangan pada Jam Dinas, dan wajib mengikuti peraturan yang
berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum dan untuk diindahkan.

a.n.Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Klaten
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

Ditandatangani secara
Elektronik

Hariadi, S.SiT., M.H.
NIP. 197310281994031001



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku.

Melayani, Profesional, Terpercaya

v.1.1.4

Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Riset Individual

Lampiran 5.1 Surat Permohonan Izin Riset Individual ke Kantor Kepala Desa Joton



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaiwu.ac.id

Nomor : 4253/Un.19/FEBLJ.ES/PP.009/IX/2023 Purwokerto, 27 September 2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.
Kepala Desa Joton
Di
Klaten

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nur Aisyah
2. NIM : 2017201075
3. Semester / Program Studi : VII / Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2023 / 2024
5. Alamat : Polodadi RT 04/ RW 02, Tarubasan, Karanganom, Klaten
6. Judul Skripsi : Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Proyek Tol Solo-Jogja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Profil desa Joton sebelum dan sesudah adanya alih fungsi lahan pertanian pada pembangunan proyek tol Solo-Jogja, banyaknya lahan pertanian yang dialihfungsikan serta besarnya ganti rugi yang diberikan
2. Tempat/ Lokasi : Desa Joton
3. Waktu Penelitian : September 2023 s/d selesai
4. Metode Penelitian : Kualitatif

Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Aehad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaiwu.ac.id

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



ord. Prodi Ekonomi Syariah

Dewi Laela Hilyatin, M.S.I.

Tembusan Ydt.
1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip

Lampiran 5.2 Surat Permohonan Izin Riset Individual ke Kantor Kepala Desa Dompoyongan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaiizu.ac.id

Nomor : 4256/Un.19/FEBLJ.ES/PP.009/IX/2023

Purwokerto, 27 September 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth,
Kepala Desa Dompoyongan
Di
Klaten

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Nur Aisyah
2. NIM : 2017201075
3. Semester / Program Studi : VII / Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2023 / 2024
5. Alamat : Polodadi RT 04/ RW 02, Tarubasan, Karanganom, Klaten
6. Judul Skripsi : Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Proyek Tol Solo-Jogja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Profil desa Dompoyongan sebelum dan sesudah adanya alih fungsi lahan pertanian pada pembangunan proyek tol Solo-Jogja, banyaknya lahan pertanian yang dialihfungsikan serta besarnya ganti rugi yang diberikan
2. Tempat/ Lokasi : Desa Dompoyongan
3. Waktu Penelitian : September 2023 s/d selesai
4. Metode Penelitian : Kualitatif

Tembusan Yth.

1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaiwu.ac.id

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Depart. Prodi Ekonomi Syariah

[Signature]
Dewi Laela Hilyatin, M.S.I.

Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip

Lampiran 6 Surat Balasan Izin Riset Individual

Lampiran 6.1 Surat Balasan Izin Riset Individual dari Kantor Kepala Desa Joton



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN JOGONALAN
DESA JOTON
Alamat : dk. Kios Tegal Mampir RT/RW: 08/03 Desa Joton ; Kode Pos: 57482
Email : desajoton@gmail.com

Nomor : B/140/ 695 /34.8/2017
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Ijin Penelitian**

Joton, 11 Oktober 2023

Kepada Yth :
Koord. Prodi Ekonomi Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Di
PURWOKERTO

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat yang Kami terima dari Kementrian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan Nomor : 4253/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009.IX/2023, tanggal 27 September 2023 tentang Permohonan Ijin Riset Individual dengan judul "**Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Proyek Tol Solo-Jogja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten**".

Bersama dengan surat ini Kami, Kepala Desa Joton selaku Pemerintah Desa Joton memberitahukan bahwa Kami **Memberikan Ijin Penelitian** di wilayah Desa Joton Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, Kepada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yaitu :

- Nama : NUR AISYAH
- NIM : 2017201075
- Prodi : Ekonomi Syariah
-

Kami berharap Mahasiswa yang melaksanakan penelitian untuk :

- Menjaga, menjunjung tinggi norma aturan yang berlaku
- Menjaga Almamater Kampus
- Menerapkan disiplin Protokol Kesehatan

Demikian Surat Pemberian Ijin Penelitian ini kami sampaikan, Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

Wasalamu'alaikum wr.wb.

Hormat kami,
Kepala Desa Joton



ARIS GUNAWAN, ST.

Lampiran 6.2 Surat Balasan Izin Riset Individual dari Kantor Kepala Desa Dompoyongan

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *SAKONO*

Jabatan : *Kepala Desa Dompoyongan*

Dengan ini telah memberikan izin kepada mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Nur Aisyah

NIM : 2017201075

Program Studi : Ekonomi Syariah

Untuk melakukan riset penelitian skripsinya yang berjudul "Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian pada Proyek Tol Solo-Jogja terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten". Dengan ini, mahasiswa yang bersangkutan telah diberikan izin untuk mengambil data-data yang diperlukan guna menyelesaikan skripsi tersebut terhitung sejak 12 Oktober 2023 s.d selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Klaten, 12 Oktober 2023

Kepala Desa Dompoyongan



Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53125
Telp: 0281-835624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 3161/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/6/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Nur Aisyah
NIM : 2017201075
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing Skripsi : Umdah Aulia Rohmah, M.H.
Judul : Implikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Proyek Tol Solo-Jogja Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Klaten

Pada tanggal 19 Juni 2023 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 27 Juni 2023
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 203/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/3/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Nur Aisyah
NIM : 2017201075
Program Studi : Ekonomi Syariah

Pada tanggal 28 Maret 2024 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **83 / A-**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 28 Maret 2024
Koord. Prodi Ekonomi Syariah

H. Sochimim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Lampiran 9 Sertifikat Lulus BTA PPI



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/18273/27/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

| | | |
|-------------|----------|-------------------|
| NAMA | : | NUR AISYAH |
| NIM | : | 2017201075 |

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

| | | |
|------------------------|----------|-----------|
| # Tes Tulis | : | 96 |
| # Tartil | : | 95 |
| # Imla' | : | 80 |
| # Praktek | : | 95 |
| # Nilai Tahfidz | : | 95 |



Purwokerto, 27 Jul 2021



ValidationCode

Lampiran 10 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab


IAIN PURWOKERTO
وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بوروكرتو
الوحدة لتنمية اللغة
 عنوان: شارع جنرال احمد باتي رقم: ٤٠ أ بوروكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٢٨١ - ٦٣٥٦٤ - www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٣٥٥ / ٢٠٢١

| | |
|-----------------------------|----------|
| | منحت الى |
| اسم : نور عائشة | الاسم |
| المولود : ١٧ سبتمبر ٢٠٠٢ | المولودة |
| الذي حصل على | |
| ٥٢ : فهم المسموع | |
| ٥٠ : فهم العبارات والتراكيب | |
| ٥٠ : فهم المقروء | |
| ٥٠٥ : النتيجة | |



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ٤
فبراير ٢٠٢١

بوروكرتو، ٢٨ مايو ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠١



ValidationCode

Lampiran 11 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris



IAIN PURWOKERTO

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/23505/2021

This is to certify that :

Name : **NUR AISYAH**
Date of Birth : **KLATEN, September 17th, 2002**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on January 4th, 2021, with obtained result as follows:

| | |
|-------------------------------------|------|
| 1. Listening Comprehension | : 60 |
| 2. Structure and Written Expression | : 49 |
| 3. Reading Comprehension | : 58 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Obtained Score | : 559 |
|-----------------------|--------------|



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, May 28th, 2021
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

Lampiran 12 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0228/K.LPPM/KKN.52/09/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **NUR AISYAH**
NIM : **2017201075**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-52 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **96 (A)**.



Certificate Validation

Lampiran 13 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan



SERTIFIKAT

Nomor: B-475/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/3/2024

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

NAMA : NUR AISYAH

NIM : 2017201075

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2024 mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2024 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai **A**

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munawaziyah/Skripsi.

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Hj. Yotz Shofwa Shafrani SP., M.Si.
NIP. 19781231 200601 2 027

Purwokerto, 25 Maret 2024

Kepala Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Hj. Yotz Shofwa Shafrani SP., M.Si.
NIP. 19781231 200601 2 027

Lampiran 14 Sertifikat Praktik Bisnis Mahasiswa (PBM)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281 - 635624, Fax : 0281 - 636553, Website : febi.uinsatzu.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : 4322/Un.19/ID.FEBMPP.005/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Nur Aisyah
NIM : 2017201075

Dinyatakan Lulus Dengan Nilai A
 Dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023.

Mengetahui,
 Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Signature)

Dr. H. Jama' Abdul Aziz, M.Ag.
 NIP./19730921 200212 1 004

Kepala Laboratorium
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

(Signature)

H. Sochimiy, Lc., M.Si.
 NIP. 19691009 200312 1 001

Purwokerto, 2 Oktober 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nur Aisyah
2. NIM : 2017201075
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 17 September 2002
4. Alamat : Polodadi 04/02, Tarubasan, Karanganom, Klaten
5. Nama Orang Tua
Ayah : Badrun Rahmad Aryadi
Ibu : Toipah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tarubasan (2006-2008)
2. SD : SD N 1 Tarubasan (2008-2014)
3. SMP : SMP N 1 Karanganom (2014-2017)
4. SMA : SMK N 1 Klaten (2017-2020)
5. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (dalam proses)

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Manajemen Marketing Komunitas CEO FEBI UIN SAIZU 2022-2023
2. Sekretaris Umum Komunitas FEBI ARABIC CLUB UIN SAIZU 2022-2023
3. Koordinator Departemen Sosial Ekonomi dan Kewirausahaan ADIKSI UIN SAIZU 2022-2023

Purwokerto, 29 Januari 2024



Nur Aisyah